

BAMSOET DUKUNG PEMISAHAN DJP DENGAN KEMENKEU

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.04/TH.XVII/APRIL 2023



PERLUNYA TAP MPR TENTANG PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 Refleksi
Literasi Digital, Keniscayaan yang Harus Segera Dutanggapi Negara

16 Nasional
Sangat Prematur Meributkan Wacana Penundaan Pemilu

39 Selingan
Perempuan Bersatu Menuntut Hak

58 Sosialisasi
Istilah Empat Pilar MPR RI Sesuai Keputusan MK



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI



08 BERITA UTAMA

Perlunya Tap MPR tentang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

MPR RI perlu mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat beschikking (penetapan) tentang pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut. Dengan Ketetapan (Tap) MPR itu, presiden dan wakil presiden yang dilantik memiliki dasar hukum yang lebih kuat berupa Ketetapan MPR RI, bukan lagi semata berdasarkan berita acara pelantikan dan keputusan KPU saja.



16 Nasional
Masih Sangat Prematur Meributkan Wacana Penundaan Pemilu



58 Sosialisasi
Istilah Empat Pilar MPR RI Sesuai Keputusan MK



39 SELINGAN
Perempuan Bersatu Menuntut Hak



82 Profil
Maman Imanul Haq

| | |
|-----------------------------|----|
| Pengantar Redaksi | 04 |
| Perspektif | 06 |
| Aspirasi Masyarakat | 47 |
| Gema Pancasila | 48 |
| Varia MPR | 74 |
| Wawancara | 76 |
| Figur | 78 |
| Ragam | 80 |
| Dari Rumah Kebangsaan | 86 |
| Rehal | 88 |



COVER

Edisi No.04/TH.XVII/April 2023
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Ketetapan (Tap) MPR Tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden

PADA bulan Oktober 2024, Indonesia secara resmi akan memiliki presiden dan wakil presiden baru hasil dari Pemilihan Umum 2024. Seperti sudah menjadi konvensi, pada beberapa kali Pemilu sebelumnya, pelantikan presiden dan wakil presiden juga diselenggarakan pada bulan Oktober. Pada Oktober 2024 itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Paripurna MPR dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih hasil Pemilu 2024 untuk masa jabatan 2024-2029.

Tapi pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024 mungkin agak berbeda dengan pelantikan presiden dan wakil presiden sebelumnya. Jika pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019, MPR hanya mengeluarkan dokumen berita acara pelantikan dan (berlandaskan) keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2024, MPR berencana mengeluarkan satu Ketetapan (Tap) MPR.

Ketetapan (Tap) MPR itu adalah Tap MPR tentang Penetapan Capres-Cawapres Pemenang Pemilu sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode masa jabatan lima tahun ke depan. Dengan dikeluarkannya Tap MPR tersebut maka presiden dan wakil presiden yang dilantik dalam Sidang Paripurna MPR memiliki dasar hukum yang lebih kuat berupa Tap MPR, dan tidak lagi berdasarkan berita acara pelantikan dan keputusan KPU saja.

Perlunya MPR mengeluarkan Tap MPR tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu itu merupakan salah satu kesimpulan Rapat Pimpinan MPR yang digelar pada 27 Februari 2023. Rapat Pimpinan MPR dihadiri para wakil ketua Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Rapim di antaranya

menerima dan menyetujui hasil kajian dan rekomendasi dari Badan Pengkajian MPR terkait pelantikan presiden dan wakil presiden RI.

Hasil kajian dan rekomendasi Badan Pengkajian MPR tersebut, yakni sebagai pelaksanaan wewenang melantik presiden dan/atau wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden", maka MPR perlu mengeluarkan Ketetapan (Tap) yang bersifat penetapan (beschikking) tentang Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Pemenang Pemilu sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode masa jabatan lima tahun ke depan.

Patut digarisbawahi, Ketetapan (Tap) MPR yang dimaksud adalah bechikking (penetapan), bukan regelling. Tap ini penting menjadi dasar dan mengubah status hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Ketetapan MPR ini merupakan *conditio sine qua non* (harus ada) dalam rangkaian pelantikan presiden dan wakil presiden.

Sebenarnya, Badan Pengkajian MPR telah melakukan kajian terhadap kewenangan MPR untuk membuat Ketetapan MPR. Kajian kerjasama Badan Pengkajian MPR dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah dibukukan dengan judul: "Kajian Akademik: Penataan Wewenang dan Tugas MPR" yang diterbitkan tahun 2020. Dalam kajian itu disimpulkan bahwa tidak ada urgensi memberikan kewenangan MPR untuk membentuk Tap MPR yang bersifat mengatur (regelling). Namun, masih dimungkinkan bagi MPR untuk membentuk Tap MPR yang bersifat penetapan (beschikking).

Dalam konteks itulah MPR masih berwenang untuk mengeluarkan Tap MPR yang bersifat beschikking tentang penetapan Capres-Cawapres pemenang Pemilu sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Dyastasita, Heri Herawan,
Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Indro Gutomo

KOORDINATOR REPORTASE

Euis Karmila

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,
Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Yenita Revi, Try Syilvani,
Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta ,
Alfonso DK Tahapary

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,
Restu, Suprianto, Faridz Rizky,
Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayati

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Anggun Permana,
Achmad Farobi,
Widya Permataningrum

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan
Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238,
57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Literasi Digital, Keniscayaan yang Harus Segera Ditanggapi Negara

LITERASI digital bagi semua komunitas sudah selayaknya mendapatkan perhatian ekstra. Untuk meminimalisir akses yang muncul dari teknologi digital negara perlu menghadirkan program yang berfokus pada upaya mendorong dan memberi pemahaman akan literasi digital bagi semua komunitas.

Adalah nyata dan tak terbantahkan bahwa teknologi digital menghadirkan banyak manfaat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat era terkini. Dia menandai kemajuan peradaban dan perubahan zaman. Namun, di saat yang bersamaan, masyarakat juga melihat serangkaian akses atau dampak negatif dari era digitalisasi sekarang. Rangkaian akses itu nyata, bahkan nyaris sudah menjadi bagian dari keseharian hidup bersama. Rangkaian akses itu mengemuka karena beberapa platform digital begitu sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Platform digital yang populer dan sering digunakan masyarakat di antaranya Whatsapp, Youtube, Instagram, Facebook atau LINE.

Dengan dukungan beberapa platform digital itu sebagian besar masyarakat memanfaatkannya untuk kegiatan positif dan produktif, seperti kegiatan belajar-mengajar, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi semisal promosi dan pemasaran. Namun, sudah menjadi kenyataan yang harus diakui bahwa beberapa platform digital itu sering digunakan para petualang dan oportunistis untuk menyebarkan konten-konten negatif, termasuk konten berbau pornografi. Ketika masyarakat belum dibekali dengan literasi digital yang memadai, rangkaian konten negatif itu segera diserap, diterima, dan dipercayai begitu saja.

Penyalahgunaan beberapa platform digital itu sudah barang tentu berdampak negatif bagi semua elemen masyarakat, tak terkecuali remaja dan anak-anak, termasuk anak di bawah umur yang sudah akrab dengan gadget. Sekadar menunjuk contoh, salah satu indikator penyalahgunaan platform digital yang sangat sering dikeluhkan masyarakat adalah maraknya penyebaran berita bohong (hoax)

dan upaya melakukan penipuan online atau daring.

Dewasa ini, arus informasi melalui platform digital begitu deras. Sayangnya, sarat hoaks. Penyebaran hoaks tetap marak karena tidak semua pelaku ditindak sesuai ketentuan hukum. Sedangkan penipuan online terus membidik siapa saja. Masyarakat sudah menyimak dari pemberitaan pers bahwa penipuan on-line pun sudah menelan begitu banyak korban dengan nilai kerugian yang tidak kecil. Mereka menjadi korban karena tidak membekali diri dengan literasi digital.

Selain hoaks dan penipuan online, beberapa platform digital digunakan para petualang untuk menyemburkan ujaran kebencian, menghembuskan isu SARA, pengajaran sesat yang mendorong publik untuk bersikap intoleran, melakukan perundungan, hingga membuat konten yang bertujuan menyebarkan semangat radikalisme untuk melawan negara dan pemerintah.

Dengan menerima dan memahami kenyataan tentang dampak negatif dari penyalahgunaan platform-platform digital itu tidaklah sulit untuk merumuskan dan memprediksi tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi negara-bangsa, baik tantangan dan ancaman hari-hari ini maupun tantangan dan ancaman di masa depan. Kesimpulan sementara yang bisa dirumuskan saat ini adalah kenyataan bahwa penyalahgunaan platform-platform digital itu selalu berpotensi mengganggu dan merusak ketertiban umum.

Bahkan, pada gilirannya, penyalahgunaan platform digital itu pun berpotensi mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa serta menggoyahkan ketahanan nasional. Dewasa ini, sangat mudah untuk menyebarkan konten-konten yang mempertajam perbedaan, merusak kodrat kebhinnekaan bangsa, menyulut gaduh dan emosi, serta mendorong aksi-aksi kekerasan. Pun, adalah fakta bahwa pesatnya teknologi digital telah mengubah perilaku banyak komunitas dalam menanggapi berbagai isu di ruang publik. Beberapa isu yang kebenarannya masih diragukan sering ditanggapi langsung dengan

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI



sikap dan tindakan-tindakan destruktif.

Dengan merumuskan dan memprediksi tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi negara-bangsa, menjadi sangat jelas bahwa membekali semua komunitas dengan literasi digital yang memadai praktis menjadi sebuah keniscayaan. Urgensi literasi digital bagi semua individu menjadi tak terbantahkan, dan juga tak terhindarkan karena menjadi tuntutan zaman. Maka, menjadi keniscayaan pula jika negara peduli dan memberi perhatian ekstra terhadap masalah ini.

Sesuai pemaparan para pakar, literasi digital dipahami sebagai kegiatan dan upaya membangun kompetensi setiap individu dalam mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan, memilah dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital. Maka, sesuai tuntutan zaman, tidak berlebihan rasanya jika literasi digital disertakan sebagai salah satu komponen kegiatan belajar-mengajar sejak pendidikan dasar.

Telah hadirnya program Gerakan Nasional Literasi Digital patut diapresiasi. Program ini diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bersama Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) dan Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital. Terdapat empat 4 modul, meliputi Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture, serta tiga kerangka dalam menyusun program untuk tiga komponen masyarakat, yakni Digital Society, Digital Economy dan Digital Government. Tahun ini, ditargetkan 50 juta orang bisa menjadi peserta literasi digital.

Literasi digital bagi semua komunitas adalah

pekerjaan besar, sehingga benar bahwa pemerintah di tingkat pusat tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Selain butuh kontribusi peran swasta, tak kalah pentingnya adalah kepedulian dan peran semua pemerintah daerah. Maka, jelajah program Gerakan Nasional Literasi Digital ini harus mampu mencakup semua daerah.

Selain itu, sosialisasi program ini hendaknya segera dibuat masif. Lagi-lagi, peran dan keterlibatan semua pemerintah daerah menjadi sangat penting, karena sosialisasi bertujuan agar semua elemen masyarakat di semua daerah tahu, mengenal dan berminat menjadi peserta. Idealnya, di semua daerah dihadirkan kelompok-kelompok kerja agar sesegera mungkin merealisasikan program literasi digital ini.

Memberi tempat dan perhatian kepada generasi milenial dan generasi sebelumnya memang penting. Namun, tak kalah pentingnya adalah membawa dan menghadirkan program Gerakan Nasional Literasi Digital ini kepada komunitas generasi Z dan generasi Alfa. Dinamika kehidupan dua generasi ini praktis minim batasan (boundary-less generation), karena segala sesuatunya nyaris terkoneksi oleh internet.

Ketika berbicara tentang masa depan persatuan dan kesatuan bangsa, serta masa depan ketahanan nasional, segala aspeknya akan berada di pundak generasi Z dan Alfa. Literasi digital bagi kedua generasi ini idealnya bisa memperkokoh nasionalisme mereka. Itulah urgensinya negara harus memberi perhatian ekstra dengan menghadirkan program yang berfokus pada upaya mendorong dan memberi pemahaman akan literasi digital bagi semua komunitas. □

Perlunya **Tap MPR** tentang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR RI perlu mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat *beschikking* (penetapan) tentang pelantikan presiden dan wakil presiden. Dengan Ketetapan (Tap) MPR itu, presiden dan wakil presiden yang dilantik memiliki dasar hukum yang lebih kuat berupa Ketetapan MPR RI, bukan lagi semata berdasarkan berita acara pelantikan dan keputusan KPU saja.

RAPAT Pimpinan MPR pada 27 Februari 2023 memutuskan sesuatu terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, khususnya Pemilu Presiden (Pilpres). Rapat Pimpinan MPR yang dipimpin Ketua MPR, Bambang Soesatyo, itu menerima dan menyetujui hasil kajian dan rekomendasi Badan Pengkajian MPR terkait pelantikan Presiden dan/Wakil Presiden Republik Indonesia hasil Pemilu. Intinya, dalam melantik presiden dan/atau wakil presiden, MPR perlu mengeluarkan ketetapan yang bersifat penetapan (*beschikking*).

Ketetapan (Tap) MPR tersebut adalah Ketetapan MPR tentang Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Pemenang Pemilu Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode masa jabatan lima tahun ke depan. Dalam konteks saat ini, Ketetapan (Tap) MPR dikeluarkan dalam pelantikan presiden dan/atau wakil presiden hasil Pemilu 2024.

“Dengan Ketetapan (Tap) MPR itu, presiden dan/atau wakil presiden yang dilantik memiliki dasar hukum yang lebih kuat berupa Ketetapan MPR RI, bukan lagi semata berdasarkan berita acara pelantikan dan keputusan KPU saja,” ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam keterangan usai memimpin Rapim MPR.

Hadir dalam Rapim MPR itu para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur

Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Sesuai ketentuan konstitusi Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 : “MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”. MPR telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai konstitusi melantik presiden dan wakil presiden hasil Pemilihan Umum (Pemilu), seperti pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019. Pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 20 Oktober, MPR menggelar Sidang Paripurna dengan agenda tunggal pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu.

Pelantikan presiden dan wakil presiden seperti sebuah seremoni biasa. Presiden dan Wakil Presiden mengucapkan sumpah janji, kemudian menandatangani berita acara pelantikan di depan Pimpinan MPR RI disaksikan anggota MPR yang menghadiri Sidang Paripurna dan masyarakat Indonesia lewat siaran langsung televisi. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan surat keputusan tentang presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu.

Sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan MPR pada 27 Februari 2023, pelantikan presiden dan/atau wakil presiden dikembalikan secara konsisten sesuai kewenangan konstitusional MPR RI sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 3 ayat (2). Artinya, MPR RI perlu mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat *beschikking* (penetapan) tentang pelantikan presiden dan/atau wakil presiden tersebut.



Menurut Bamsoet, presiden dan wakil presiden memang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Meski demikian, pemilihan langsung tidak menghilangkan kewenangan MPR untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu. “Keputusan KPU hanya menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih karena suara yang diperolehnya. Tapi, untuk melaksanakan kewenangan sebagai presiden dan wakil presiden, maka pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU tersebut perlu ditetapkan dan dilantik oleh MPR,” terangnya.

Karena itulah, sesuai kajian dan rekomendasi Badan Pengkajian MPR, MPR perlu mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR yang bersifat *beschikking*, bukan *regeling* sebagai dasar status hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. “Ketetapan MPR ini merupakan *conditio sine qua non* (harus ada) dalam rangkaian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” imbuhnya.

Bamsoet kembali mempertegas perlunya

Tap MPR dalam diskusi Empat Pilar yang diadakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerjasama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR pada Rabu, 29 Maret 2023. Dalam diskusi bertema “PPHN Tanpa Amandemen” itu, Bamsoet menyebutkan tentang urgensi Ketetapan (Tap) MPR.

“PPHN tanpa amandemen dapat dilakukan dengan cara judicial review, yaitu mengembalikan kewenangan MPR mengeluarkan Ketetapan (Tap) baru (baik bersifat *beschikking* maupun *regeling* atau mengatur) dan konvensi ketatanegaraan yang merupakan sumber hukum tata negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam praktik ber hukum di Indonesia maupun di dunia internasional,” paparnya.

Dalam kaitan itu, Bamsoet menekankan pentingnya MPR mendapatkan kembali kewenangan mengeluarkan Tap MPR. Alasannya, Tap MPR merupakan salah satu solusi manakala terjadi kebuntuan konstitusi dan kedaruratan atau kegentingan yang memaksa. Bamsoet mengumpamakan Tap MPR sama seperti kewenangan Presiden

mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) manakala terjadi kedaruratan atau kegentingan memaksa.

“MPR bisa menggunakan kewenangan subjektif superlatif sebagai lembaga tertinggi negara. Kewenangan subjektif superlatif MPR ini juga penting jika negara menghadapi situasi kebuntuan politik antar lembaga negara atau antarcabang kekuasaan. Misalnya, kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan (pemerintah/eksekutif) dengan lembaga DPR (legislatif),” katanya.

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan yang juga ikut dalam Rapim MPR pada 27 Februari 2023 lebih jauh menjelaskan bahwa Rapim memang membahas tentang perlunya Ketetapan (Tap) MPR untuk penetapan dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu. Namun, untuk sampai pada pembentukan Tap MPR tersebut masih diperlukan kajian lebih mendalam. “Kita sedang mengkaji lebih mendalam soal perlunya Tap MPR tentang penetapan dan pelantikan presiden dan wakil presiden,” katanya kepada *Majelis*.

Mengapa Rapim MPR membahas soal

pelantikan presiden dan wakil presiden? Menurut Syarif Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, sebenarnya bagaimana mekanisme dalam pelantikan presiden dan wakil presiden itu belum terperinci secara jelas sesuai dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Selama ini MPR mengadakan Sidang Paripurna dengan agenda tunggal pelantikan presiden dan wakil presiden, tetapi sesungguhnya tidak terperinci bagaimana mekanisme pelantikan tersebut, bagaimana posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU), juga bagaimana posisi MPR sendiri, dan juga kedudukan Mahkamah Agung (MA).

“Ini yang sedang dilakukan kajian oleh Badan Pengkajian MPR, yaitu bagaimana mekanisme pelantikan presiden dan wakil

benar dan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Untuk itulah MPR kembali melakukan kajian secara mendalam. “Dan, semuanya akan kita kembalikan kepada proporsi yang sebenarnya sesuai UUD NRI Tahun 1945. Inilah yang sedang kita kaji,” tambah anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Kewenangan MPR Membentuk Tap

Sebelum UUD 1945 diamandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara. MPR menjadi lembaga tertinggi negara karena kedudukannya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tersebut

Tahun 1945 dan di atas undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Kini, perubahan kedudukan MPR setelah UUD 1945 diamandemen turut mengubah kedudukan dan status hukum yang dihasilkan MPR, yaitu Tap MPR yang baru (pasca perubahan UUD 1945). MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum berupa Tap MPR yang bersifat mengatur (*regeling*), tetapi MPR hanya bisa mengeluarkan Tap MPR yang bersifat (hanya sebatas) *beschikking* (penetapan).

Badan Pengkajian MPR periode 2014-2019 sebenarnya sudah pernah mengkaji soal kewenangan MPR untuk membentuk Tap MPR. Bekerjasama dengan Universitas



Syarief Hasan

presiden hasil Pemilu. Apakah perlu Ketetapan (Tap) MPR untuk pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut sebagai pegangan hukum. Hal-hal seperti ini semuanya perlu kita dudukkan dan luruskan kembali sesuai dengan aturan UUD NRI Tahun 1945. Karena itu sekarang MPR sedang melakukan kajian,” terangnya.

Termasuk soal Tap MPR tentang pelantikan presiden dan wakil presiden, lanjut Syarif Hasan, memang masih perlu kajian. “Memang ada urgensinya bagi MPR untuk mengeluarkan Tap MPR pelantikan presiden dan wakil presiden. Yaitu, agar tidak terjadi dispute (perselisihan) dan interpretasi bagaimana pelantikan presiden dan wakil presiden itu dilakukan,” katanya.

Syarief kembali mempertanyakan apakah mekanisme pelantikan presiden dan wakil presiden yang berlangsung selama ini sudah



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

disertai pula dengan kewenangan mengatur (*regeling*). Kewenangan mengatur itu dituangkan dalam produk hukum bernama Ketetapan MPR (Tap MPR).

Namun, seiring perubahan (amandemen) UUD 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum berupa Tap MPR. Perubahan kedudukan MPR membuat Tap MPR menjadi masalah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari kedudukan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, UU No. 10 Tahun 2004 tidak memasukkan Tap MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, dengan diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undang dan kedudukannya berada di bawah UUD NRI

Gajah Mada (UGM), Badan Pengkajian menuangkan kajian itu dalam buku dengan judul “Kajian Akademik: Penataan Wewenang dan Tugas MPR” yang diterbitkan tahun 2020. Salah satu bab dalam buku itu adalah kewenangan MPR untuk membentuk Tap MPR. Dari kajian itu disimpulkan bahwa tidak ada urgensi memberikan kewenangan MPR untuk membentuk Tap MPR yang bersifat mengatur (*regeling*). Namun, masih dimungkinkan bagi MPR untuk membentuk Tap MPR yang bersifat penetapan (*beschikking*).

Dalam sebuah sarasehan yang digelar MPR untuk memperingati Hari Konstitusi pada tahun 2018, Pimpinan Badan Pengkajian pada periode itu, Rambe Kamarul Zaman, menegaskan bahwa MPR masih bisa mengeluarkan atau membuat Tap MPR. Namun, Tap MPR itu harus menyangkut

beschikking, khususnya Tap MPR yang menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu. Dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, MPR bukan hanya mengeluarkan berita acara pelantikan, tetapi juga mengeluarkan Tap MPR.

“Dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, MPR seharusnya mengeluarkan Tap MPR. Ini akan memperkuat MPR menyangkut kewenangannya meski MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi,” katanya dalam sarasehan bertema “Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPR dan MPRS dalam Sistem Hukum Indonesia” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta, Sabtu, 18 Agustus 2018. Sarasehan itu juga menghadirkan mantan hakim konstitusi Prof. Dr. Maria Farida, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.

Menurut Rambe Kamarul Zaman, bukan hanya pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, MPR juga bisa mengeluarkan Tap MPR yang bersifat *beschikking* dalam hal presiden berhalangan di tengah jalan. “Ketika presiden berhalangan, MPR juga perlu mengeluarkan Tap yang bersifat *beschikking*,” ujarnya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, mengungkapkan, Badan Pengkajian MPR telah membahas tentang perlunya Tap MPR untuk pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu. Bahkan, dari pembahasan di Badan Pengkajian MPR sudah tercapai satu titik temu bahwa memang perlu penguatan terhadap pelantikan presiden dan wakil presiden yang selama ini hanya melalui berita acara saja.

“Jadi, seperti sudah ada kesepakatan di Badan Pengkajian MPR bahwa perlu Tap MPR khusus untuk pelantikan presiden dan wakil presiden. Tap MPR ini menjadi dasar untuk pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu. Sebab, aturan dari UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan KPU, terbuka ruang untuk Tap MPR guna mengatur pelantikan presiden dan wakil presiden,” kata anggota Badan Pengkajian MPR ini kepada *Majelis*.

Bahkan, Sodik Mudjahid menyebut kebutuhan Tap MPR untuk pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu adalah sesuatu yang urgent. “Saya kira ur-



Rambe Kamarul Zaman

gent karena ada penegasan dari UUD NRI Tahun 1945 bahwa MPR melantik presiden dan wakil presiden, sementara sekarang yang terjadi hanya dalam bentuk berita acara pelantikan. Terjadi kekosongan hukum. Ada kewajiban MPR untuk melantik presiden dan wakil presiden, tetapi tidak ada regulasi. Karena itu disepakati akan diatur dalam Tap MPR,” jelasnya.

Menurut anggota Komisi X DPR RI itu, untuk pembentukan Tap MPR tentang pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut diperlukan semacam konsensus, tanpa perlu amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Nanti khusus untuk pengaturan pelantikan presiden dan wakil presiden akan ada Tap MPR, tanpa perlu melakukan amandemen. Ini yang sedang dicari



Sodik Mudjahid

konsensusnya tanpa harus amandemen UUD NRI Tahun 1945. Tapi, karena dinilai perlu administrasi pelantikan, maka dicari konsensus mengaktifkan Tap MPR untuk mengatur (pelantikan) itu,” katanya.

Syarief Hasan juga berpendapat bahwa tidak perlu amandemen UUD untuk memberi kewenangan MPR membentuk Tap MPR yang bersifat *beschikking*. Pasalnya, UUD NRI Tahun 1945 sudah memberikan kewenangan MPR untuk melantik presiden dan wakil presiden. “Tidak perlu amandemen UUD, karena sudah jelas sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Kita sebenarnya tinggal meluruskan saja agar sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Tap MPR itu sendiri sudah cukup kuat menjadi dasar hukum pelantikan presiden dan wakil presiden,” katanya.

Sebaliknya, Bamsuet menyebutkan, perlu UU tentang MPR yang mengatur kewenangan MPR untuk membentuk Tap MPR. “Pembentukan ketetapan dan mekanisme tata cara pelantikan presiden dan/wakil presiden tersebut perlu penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang (UU) tentang MPR dan Peraturan Tata Tertib MPR,” katanya.

Bamsuet menyebutkan, selain mengatur tentang mekanisme pelantikan presiden dan/wakil presiden, UU tentang MPR RI dan Peraturan Tata Tertib MPR RI tersebut juga akan mengatur tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis, Sidang Tahunan MPR setiap 16 Agustus yang dilaksanakan secara tersendiri (tidak bergabung dengan Sidang Tahunan DPD maupun DPR), serta eksistensi Pimpinan MPR yang ditetapkan melalui Ketetapan MPR RI, bukan melalui berita acara.

“Badan Pengkajian MPR bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR akan merumuskan dan menyusun UU tentang MPR dan Peraturan Tata Tertib MPR. Ditargetkan dalam 6 bulan ke depan sudah bisa selesai,” imbuhnya.

Dengan kata lain, pada Sidang Paripurna MPR pada 20 Oktober 2024 dengan agenda tunggal pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2024 sudah menggunakan Tap MPR? Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menjawab, “Mudah-mudahan bisa, doakan saja.” □

MBO/BSC

Sejarah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR/MPRS)

UUD 1945 tidak eksplisit mencantumkan istilah Tap MPR/MPRS. Tap MPR/MPRS dikenal pada masa Orde Lama setelah pembentukan lembaga MPRS berdasarkan amanat Dekrit Presiden tahun 1959.

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan lembaga sejenis di negara-negara lainnya di dunia. Meskipun ada lembaga di negara lain yang mirip dengan MPR, sebut saja lembaga serupa yang diatur dalam konstitusi Tiongkok dan Republik Rusia yang juga terdiri dari unsur wakil rakyat dan wakil daerah, tapi kedudukan dan kewenangannya ternyata berbeda dengan MPR. Oleh karena itu, bisa dikatakan MPR merupakan lembaga yang murni dan berasal dari Indonesia.

Saat pembentukannya, MPR menjadi sebuah lembaga yang mewakili rakyat secara keseluruhan sebagai tempat bermusyawarah. MPR menjadi penyelenggara negara yang tertinggi dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat, seluruh daerah dan seluruh golongan ada di lembaga itu. Itu sebabnya, kedaulatan rakyat berada di satu lembaga, dan MPR melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Menjadi pelaksana kedaulatan rakyat pada tingkatan tertinggi, MPR diberi tugas dan wewenang untuk menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan negara, serta memilih presiden dan wakil presiden.

Selain itu, MPR juga diberi wewenang mengeluarkan produk hukum yang disebut putusan MPR berupa Ketetapan dan Keputusan MPR. Sebenarnya, pada saat pembentukannya, MPR tidak dimaksudkan sebagai badan pembuat peraturan (apalagi sebagai legislatif) kecuali menetapkan dan mengubah UUD. Namun, dalam perjalanannya, justru MPR dianggap berwenang membuat produk hukum yang bersifat mengatur atau dikenal dengan nama Ketetapan MPR.

Kemudian, sebagaimana diatur dalam Tap MPR Nomor I/MPR/1973, MPR diberi wewenang untuk mengeluarkan produk



Dekrit Presiden Tahun 1959

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

hukum berupa Ketetapan dan Keputusan MPR. MPR diberi wewenang untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengikat ke luar dan ke dalam. Bentuk Tap MPR(S) ini tumbuh dalam praktik ketatanegaraan sejak MPRS bersidang pertama kali tahun 1960.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia sejak tahun 1960-an, keberadaan Tap MPR memperlihatkan perkembangan dan perubahan materi muatan dari waktu ke waktu. Hal ini bisa dilihat dari judul-judul dan materi muatan produk hukum MPR yang pernah ada sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 1960 sampai dengan terakhir kali dikeluarkan pada tahun 2002. Dalam kurun waktu itu, tercatat MPR telah mengeluarkan sebanyak 139 Ketetapan MPR(S).

Masa Orde Lama

UUD 1945 tidak eksplisit mencantumkan istilah Tap MPR/MPRS. Tap MPR/MPRS dikenal pada masa Orde Lama setelah pembentukan lembaga MPRS berdasarkan amanat Dekrit Presiden tahun 1959. Dalam Sidang Umum pertama MPRS yang berlangsung tanggal

10 November sampai dengan 7 Desember 1960 di Bandung, dihasilkan dua ketetapan, yaitu: Tap MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN, dan Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959 itu mulai dikenal peraturan-peraturan produk MPRS yang memiliki sifat mengatur (regeling) dan mengikat ke luar. Pada periode tahun 1959 sampai dengan 1965 terdapat 8 Tap MPRS yang dihasilkan dari tiga Sidang Umum MPRS, yaitu: Sidang Umum MPRS tahun 1960, 1963, dan 1965. Dari 8 Tap MPRS tersebut banyak ketetapan yang bersumber dari pidato atau amanat Presiden RI Soekarno.

Tap MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN bersumber dari pidato yang disebut sebagai amanat negara yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang pertama MPRS pada hari Pahlawan 10 Nopvember 1960. Kemudian Tap MPRS

lainnya yang bersumber dari amanat presiden berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal sebagai manifesto politik RI, amanat presiden pada sidang pleno pertama Depernas mengenai pembangunan semesta berencana.

Selanjutnya Tap MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan

Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Selengkapnya, Tap-Tap MPR(S) yang dihasilkan pada masa Orde Baru adalah Tap MPR dalam rangka upaya pengembalian arah kebijakan negara berdasarkan UUD

Masa Reformasi

Pada era reformasi, dalam Sidang Istimewa MPR tahun 1998, MPR mengeluarkan sebanyak 12 Tap MPR. Pada tahun 1999, MPR menetapkan 12 Tap MPR. Pada tahun 1999 dimulai proses amandemen UUD 1945 yang berlangsung hingga 2002. Pada tahun 2002, amandemen keempat UUD 1945 ditetapkan. Dari seluruh rangkaian perubahan UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga 2002 adalah menurunkan kedudukan MPR dari sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara, menjadi lembaga negara.

Selain itu, kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN pun dihapus, karena MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dengan demikian, ditafsirkan pula bahwa MPR juga telah kehilangan landasan kewenangannya untuk membentuk Tap MPR, terutama Tap MPR yang bersifat mengatur (regeling). Pada era reformasi, MPR mengeluarkan Tap MPR terakhirnya, yakni Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/S Tahun 1960 sampai dengan 2002.

Dalam Tap No. I/MPR/2003 yang dikenal sebagai Tap “Sapu Jagat” seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan dalam 6 pasal (kategori) sesuai dengan materi dan status hukumnya. Kategori I Tap MPRS/MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 Ketetapan), kategori II Tap MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan), kategori III Tap MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan).

Kategori IV Tap MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang (11 Ketetapan), Kategori V Tap MPRS/MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan), dan kategori VI Tap MPRS/MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 Ketetapan). □

BSC



GBHN dan Haluan Pembangunan bersumber dari amanat presiden berjudul “Revolusi-Sosialisme Indonesia Pimpinan Nasional (Resopim); amanat presiden berjudul “Tahun Kemenangan” (Takem), dan amanat pengantar laporan berkala presiden/mandataris MPRS berjudul “Ambeg Parama Arta” (Berwatak pandai mendahulukan urusan yang penting).

Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, MPR mengeluarkan Tap MPR No. I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Tap itu menyebutkan bahwa bentuk dari putusan majelis, yaitu Ketetapan MPR dan Keputusan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam, sedangkan Keputusan MPR adalah peraturan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam majelis.

Pada masa Orde Baru ini, terdapat satu Tap MPR yang masih berlaku sampai saat ini, yaitu Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara

1945 dan Tap yang mengkaji ulang Ketetapan MPRS tahun 1960-1965. Misalnya, Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden RI Seumur Hidup; Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan UUD 1945.

Lalu Tap MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara; Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; Tap MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan-Ketetapan MPRS: No. II/MPRS/1960; No. IV/MPRS/1963; No. V/MPRS/1965; No. VI/MPRS/1965; dan No. VII/MPRS/1965.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

H. Yandri Susanto, S.Pt, Wakil Ketua MPR RI

Soal Tap MPR Tentang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Perlu Kajian Mendalam

SALAH SATU wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) adalah melantik presiden dan wakil presiden. Biasanya MPR menggelar Sidang Paripurna dengan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden pada bulan Oktober. Pada 20 Oktober 2019, MPR menggelar sidang paripurna dengan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dan, pada Oktober 2024, MPR kembali akan menggelar sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2024.

Pada pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dan sebelumnya, MPR hanya mengeluarkan dokumen berupa berita acara pelantikan dan (berlandaskan) pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilu. Tetapi pada pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan datang, dalam Sidang Paripurna MPR pada Oktober 2024, MPR berencana

akan mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR khusus berisi tentang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Ketetapan (Tap) MPR itu adalah Tap MPR tentang Penetapan Capres-Cawapres Pemenang Pemilu sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode masa jabatan lima tahun ke depan. Dengan dikeluarkannya Tap MPR tersebut maka presiden dan wakil presiden yang dilantik dalam Sidang Paripurna MPR memiliki dasar hukum yang lebih kuat, berupa Tap MPR dan tidak lagi berdasarkan berita acara pelantikan dan keputusan KPU saja.

Perlunya MPR mengeluarkan Tap MPR tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu itu merupakan salah satu bahasan dalam Rapat Pimpinan MPR yang digelar pada 27 Februari 2023. Rapat Pimpinan MPR menerima dan menyetujui hasil kajian dan rekomendasi Badan Pengkajian MPR terkait Tap MPR yang bersifat penetapan (beschikking) tersebut.

Untuk mendapat gambaran lebih jauh

soal Tap MPR tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto, S.Pt. Berikut wawancara dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN ini. Petikannya.

Rapat Pimpinan MPR pada 27 Februari 2023 menyebutkan, Pimpinan MPR menyetujui perlunya Ketetapan MPR (Tap MPR) tentang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu. Selama ini dokumen MPR hanya dalam bentuk berita acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Apa pendapat/komentar Bapak?

Wewenang dan tugas MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden merupakan amanah yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dikuatkan dalam UU MD3 tentang Kewenangan MPR, yakni MPR berwenang melantik Presiden dan Wapres RI hasil pemilu.

Setelah dilantik, kemudian Pimpinan MPR menyerahkan Berita Acara Pelantikan



sebagai dokumen resmi. Terkait wacana perlunya Ketetapan MPR atau TAP MPR sebagai regulasi tentang Pelantikan Presiden dan Wapres terpilih hasil Pemilu 2024, saya kira sangat bagus. Regulasi berupa Tap MPR ini akan memperkuat MPR menyangkut kewenangannya meski MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi.

Hasil dokumen pelantikan presiden dan wakil presiden berupa Tap MPR bukan lagi hanya berita acara pelantikan, maka sudah menjadi Tap produknya MPR. Sekali lagi menurut saya wacana itu bagus-bagus saja.

Apakah dirasakan perlu/urgent MPR mengeluarkan Tap MPR untuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih?

Soal urgensinya, memang penting Tap MPR itu menjadi bagian yang ikut mewarnai perjalanan bangsa ini, apalagi melihat sejarahnya dahulu. Tapi, itu memang perlu dikaji lagi ya. Perlu duduk bersama lagi seluruh Pimpinan MPR, bisa juga dilakukan berbagai diskusi, serap aspirasi dengan berbagai elemen masyarakat, seperti para akademisi, pakar-pakar tata negara, pakar hukum negara, agar jika Tap ini muncul untuk melantik Presiden dan Wapres, posisi hukumnya jelas dan kuat.

Bukankah setelah UUD diamandemen, sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Tap MPR, baik

yang bersifat mengatur (regeling) maupun penetapan (beschikking)?

Ya, perjalanan sejarahnya seperti itu. Era reformasi telah dilalui dan hasilnya salah satunya soal berubahnya kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya, itu harus dihormati sebagai pengejawantahan demokrasi di Indonesia.

Namun, pasca reformasi dan perubahan UUD 1945, ada penambahan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) menjadi salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setingkat di bawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berada setingkat di atas UU.

Memang MPR tidak lagi mengeluarkan Tap yang bersifat mengatur dan menetapkan, tapi kewenangan MPR dalam UU tetap yang tertinggi, yakni berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Ya sekali lagi, saya setuju saja dengan adanya Tap MPR tentang Pelantikan Presiden dan Wapres RI, tapi sekali lagi perlu dikaji lebih mendalam lagi.

Bagaimana cara untuk mengembalikan kewenangan MPR mengeluarkan Tap MPR? Apakah perlu amandemen UUD atau diatur dalam UU (UU tentang MPR)? Lalu, apakah menghidupkan kembali kewenangan MPR mengeluarkan Tap MPR akan menimbulkan kontroversi, karena ada kesan MPR bisa menjadi lembaga tertinggi lagi?

Ya, makanya kita semua harus kembali duduk bersama, membicarakan hal ini lebih detil lagi dengan melibatkan semua pihak, tidak bisa secara parsial saja, sehingga Tap MPR yang kemudian misalnya bisa muncul, tidak menimbulkan kegaduhan, tapi kuat pijakan hukumnya. Jika semua ada kesepakatan, menurut saya, ya bagus. Jadi, apapun hal-hal yang bersifat politik kan kalau semuanya sepakat bisa jadi tidak ada hambatan.

Kalau semuanya setuju, dari semua elemen baik MPR maupun masyarakat Indonesia, ya tinggal melangkah ke mekanisme yang sudah ditetapkan. Jika harus amandemen UUD ya diamandemen. Intinya, kalau semua setuju, saya rasa bagus untuk bangsa ini ya. □



Bamsoet: Masih **Sangat Prematur** Meributkan Wacana Penundaan Pemilu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Di dalam konstitusi maupun perundang-undangan belum mengatur perpanjangan atau penambahan masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, MPR, DPD dan DPRD.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemilihan umum (Pemilu) dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Karenanya, MPR RI akan menaati UUD NRI Tahun 1945 agar pelaksanaan Pemilu, baik legislatif ataupun pemilihan presiden, tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada tahun 2024. Kecuali ada suatu keadaan force majeure sebagaimana diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang.

“Jadi, meributkan soal wacana penundaan pemilu saat ini terlalu prematur. Sebab, MPR RI sendiri akan tetap berpijak pada ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Penundaan Pemilu hanya bisa dilakukan apabila terjadi force majeure, berupa kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang membuat Pemilu tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan,” ujar Bamsoet dalam acara press gathering bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (MPR/DPR/DPD-RI) di Bandung, Sabtu (18/3/23).

Hadir antara lain Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K. Harman, Sekretaris Fraksi PKB MPR RI Eem Marhamah, Plt. Deputi Administrasi/ Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Ariawan, serta para

wartawan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (MPR/DPR dan DPD RI).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini tidak menampik adanya wacana penundaan Pemilu. Terlebih, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasca dinyatakan tidak lolos ikut sebagai peserta Pemilu 2024. Dalam putusannya PN Jakarta Pusat menghukum KPU agar menunda pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

“Apabila Pemilu 2024 ditunda, kita belum punya pengaturannya. Para penyusun amandemen ke-4 UUD 1945 hanya mengatur perodesasi masa jabatan bagi Presiden/Wakil Presiden, DPR/DPD/MPR dan DPRD ditingkat provinsi, kota/kabupaten. Bagaimana dengan perpanjangan masa jabatan presiden, wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD ditingkat provinsi, kota/kabupaten yang habis pada tahun 2024. Apakah mereka tetap atau akan digantikan oleh pelaksana tugas ataupun pejabat sementara. Kepala daerah jelas ada Plt., tetapi bagaimana dengan presiden, wakil presiden, anggota DPR, MPR, DPD dan DPRD. Apakah disebut Plt. Presiden, Plt. Wakil Presiden, Plt. anggota DPR dan seterusnya. Kita kan nggak pernah membayangkan, dan saya yakin para pembuat UUD dulu



belum membayangkan ke arah itu. Tetapi kalau kita bicara soal ini pasti jadi ramai,” kata Bamsoet.

Kendati begitu, lanjut Bamsoet, sebagai bangsa kita harus berani membangun diskursus soal ini untuk berjaga-jaga. Karena dalam konstitusi hanya ada pengaturan masa jabatan presiden dan jabatan lain yang

berasal dari pemilu berakhir 20 Oktober setiap lima tahun sekali.

“Menurut saya, semua pihak harus berani menyiapkan diri dan bicara terbuka dengan kenyataan tersebut. Coba bayangkan kalau Covid-19 baru mulai hari ini, apakah dimungkinkan 2024 digelar Pemilu. Karena bencana pandemi tidak hanya berskala

nasional, tapi internasional,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, perlu dipikirkan aturan hukum baru mengenai masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD ditingkat provinsi, kota/kabupaten, apabila benar-benar terjadi penundaan Pemilu karena situasi force majeure sebagai diatur dalam konstitusi maupun undang-undang. Sebab, di dalam konstitusi maupun perundang-undangan belum mengatur perpanjangan atau penambahan masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, MPR, DPD dan DPRD.

“Aturan hukum baru mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD apabila terjadi penundaan Pemilu, menarik untuk dikaji oleh para stake holder bangsa. Semuanya perlu kita pikirkan dan atur guna mengantisipasi segala hal yang mungkin terjadi,” pungkas Bamsoet. □



Media Gathering 2023

Siti Fauziah Harap Media dan Humas MPR Bersinergi Tangkal Berita Hoaks

Dengan perannya sebagai salah satu pilar demokrasi, pers Indonesia diharapkan menjadi benteng berita hoaks



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BIRO Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar Media Gathering 2023 bertajuk: 'Peran Media dalam Mewujudkan Rumah Kebangsaan MPR RI'.

Acara yang diselenggarakan di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat malam (17/3/2023), dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beserta istri, perwakilan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Pimpinan Fraksi

Partai Demokrat MPR Benny K. Harman, Pimpinan Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., dan Ketua KWP Ariawan, serta para wartawan sebagai peserta.

Dalam sambutan di awal acara, Siti Fauziah melaporkan kepada Ketua MPR bahwa pelaksanaan Media Gathering ini melibatkan sekitar 90 wartawan media nasional, baik online, cetak, dan elektronik, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

komunikasi dan keakraban antara pimpinan dan anggota MPR dengan para jurnalis yang biasa bertugas di lingkungan parlemen.

"Melalui Media Gathering ini diharapkan muncul *chemistry* yang kuat, di mana para pimpinan dan anggota MPR adalah sumber berita yang kredibel bagi para jurnalis, dengan begitu akan muncul produk berita yang akurat dan berkualitas," ungkapnya.

Siti Fauziah menambahkan, pers Indonesia memiliki peran sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia. Dengan perannya itu, media memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi secara utuh dan menyeluruh pada masyarakat.

"Besarnya harapan kami, media dapat memberitakan hal-hal yang terjadi di lingkungan Parlemen secara utuh dan menyeluruh, serta ikut berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tugas jurnalistiknya," harap Siti Fauziah.

Dalam kesempatan itu pula, Siti Fauziah mengingatkan, munculnya berbagai berita hoaks dan kabar bohong di berbagai platform media social — sebagai dampak negative dari kemajuan teknologi informasi yang tidak bisa dibendung— tak dapat dipungkiri akan menjadi ancaman bagi para pelaku





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

industri media. “Tentu hal ini menjadi perhatian bagi unit penyelenggara kehumasan di instansi lembaga negara, dalam hal ini Biro Humas Setjen MPR,” ungkap Siti Fauziah.

“Untuk itu, Siti Fauziah mengajak semua teman media yang hadir untuk dapat bersama dengan Biro Humas guna menangkal penyebaran berita hoaks di lingkungan parlemen, dengan menyajikan produk jurnalisme dalam bentuk berita yang akurat dan terpercaya, melalui mekanisme redaksi yang sudah terstandarisasi di masing-masing media,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Siti Fauziah, bangsa Indonesia memasuki tahun politik. “Kami berharap, menjelang pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024, teman-teman

media bisa memberikan hal-hal yang menyejukkan pada masyarakat. Antara lain, bisa menyampaikan kepada publik bahwa pemilu ini merupakan ajang kompetisi politik para putera-puteri terbaik bangsa, sehingga tetap menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda pilihan,” katanya

Di sesi akhir, Siti Fauziah mengimbau media nasional untuk tidak lupa memberitakan atau mengampanyekan kepada masyarakat agar datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya yang telah dijamin UUD sebagai bentuk implementasi kedaulatan rakyat.

“Untuk para wartawan juga nih, sukseskan Pemilu 2024, jangan golput. Ajak seluruh keluarga ke TPS ,” pungkasnya. □

DER



Implementasi Sila-sila Pancasila

- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.
- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mutakat
- Berhenti besar kepala, mulailah bertangung dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 NKRI Sebagai Bentuk Negara
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Sembayan Negara

Media Gathering Bandung

Bamsoet Dukung Pemisahan DJP dengan Kemenkeu

Ide pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan sebenarnya bukan hal baru. Ini merupakan salah visi-misi kampanye Presiden Joko Widodo pada tahun 2014.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung rencana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai penggantinya akan dibentuk suatu badan pengelola pajak otonom (Badan Penerimaan Negara) yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.

"Ide pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan sebenarnya bukan hal baru. Ini merupakan salah visi-misi kampanye Presiden Joko Widodo di tahun 2014. Ketika saya menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 pun telah dibahas

masalah ini. Namun, hingga kini belum terealisasi," ujar Bamsoet dalam media gathering bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Sabtu (18/3/23).

Hadir, antara lain Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K. Harman, Sekretaris Fraksi PKB MPR RI Eem Marhamah, Plt. Deputi Administrasi/Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Ariawan serta para wartawan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (MPR/ DPR/DPD-RI).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, kebijakan pemisahan DJP dengan Kemenkeu sebenarnya sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dibuat pemerintah pada tahun 2015. Di pasal 95 disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Nantinya, DJP akan dibentuk dalam satu badan bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) yang bersifat otonom. Pemisahan DJP sebagai lembaga mandiri yang bersifat independen bertujuan agar institusi tersebut lebih kuat dan efektif. Sama halnya ketika pembentukan badan baru, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, jika badan khusus yang mengurus perpajakan dibentuk maka otoritas pajak akan lebih leluasa dan fleksibel menentukan kebijakan, rekrutmen pegawai hingga penataan regulasi perpajakan. Termasuk meningkatkan penerimaan negara.

Terlebih, saat ini penerimaan pajak Indonesia mencapai lebih dari 75% dari pendapatan negara. Pemerintah sendiri dalam APBN 2023 telah menargetkan penerimaan negara mencapai Rp 2.463 triliun. Di mana pendapatan dari pajak sebesar Rp 2.021,2 triliun atau sekitar 82% dari total penerimaan negara.

"Sejumlah negara juga telah melakukan pemisahan badan pajak dengan Kemenkeu. Semisal, Amerika Serikat yang memiliki lembaga pajak otonom terpisah dari Kemenkeu, bernama Internal Revenue Service (IRS). Singapura memiliki Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), otoritas pajak semi otonom yang tidak berada di bawah Kemenkeu. Beberapa negara lain juga telah membuat lembaga pajak semi otonom," pungkas Bamsoet. □



Kunjungan Dubes Republik Sudan

HNW: Hubungan Indonesia-Sudan Harus Lebih Ditingkatkan Lagi

Persahabatan dua negara Indonesia dan Sudan telah terjalin sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) Tahun 1955

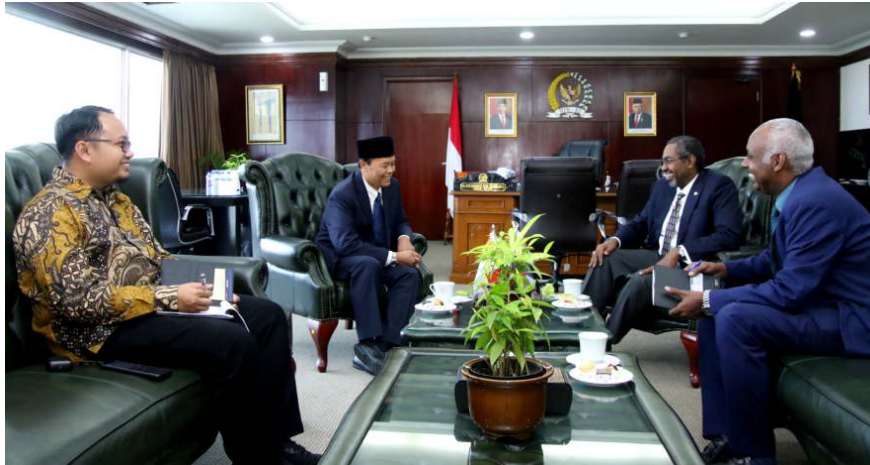


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc., MA., menerima kunjungan persahabatan Dubes Republik Sudan untuk Republik Indonesia Dr. Yassir Mohamed Ali, di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Kepada tamunya, Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menerangkan bahwa persahabatan Indonesia dan Sudan sudah berjalan panjang dan sangat kuat, yaitu sejak peristiwa fenomenal dunia

Konferensi Asia Afrika 1955 hingga hari ini.

Lebih lanjut, HNW – begitu Hidayat Nur Wahid biasa disapa— menjelaskan, persahabatan Indonesia-Sudan berjalan di berbagai aspek, mulai dari keagamaan, kebudayaan, ekonomi, perdagangan, riset, dan penelitian. “Mengingat jejak historikal dan saling membutuhkan antarkedua negara, hubungan baik itu mesti dijaga serta ditingkatkan ke depannya,” katanya.

“Sebagai Pimpinan MPR, saya mendukung Sudan dalam meningkatkan hubungan dengan Indonesia. Saya juga berterima kasih

dan mengapresiasi langkah dan rencana visioner Dubes baru Sudan untuk Indonesia, semoga terwujud dengan baik,” tambahnya.

Terakhir, HNW menyampaikan semoga kemaslahatan terbaik bagi rakyat Sudan dalam menjalani transisi politik ke depan dan pentingnya nasionalisme sebagai jalan menghadirkan kemaslahatan terbaik bagi bangsa dan umat.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Republik Sudan untuk Republik Indonesia Dr. Yassir Mohamed Ali menyampaikan terima kasih dan rasa bangga dapat diterima bertemu dengan Pimpinan MPR, HNW. Yassir juga menyampaikan bahwa rakyat Sudan sangat mengenang jasa Indonesia bagi bangsa Sudan melalui penyelenggaraan KTT Asia Afrika 1955 di Bandung.

Pada masa awal tugas sebagai Dubes ini, Yassir mengungkapkan, dirinya sudah melakukan kunjungan kepada sejumlah pimpinan lembaga negara dan elemen-elemen kemasyarakatan di Indonesia. “Sudan berharap penguatan kerjasama dengan negara-negara sesama lintas khatulistiwa yang pada umumnya memiliki banyak kesamaan budaya dan social,” katanya.

Sebagai Dubes baru, Yassir mengatakan, akan melakukan berbagai program visioner dalam meningkatkan kerjasama dengan Indonesia, baik di bidang perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Salah satunya, berencana memecahkan masalah transaksi keuangan perbankan lintas negara, termasuk dengan Indonesia.

“Kami juga mohon doa dari rakyat Indonesia, sebab saat ini Sudan sedang menjalani proses transisi politik dan segera menghadapi tahapan pemilu demokratis, di saat masih mengalami dampak negatif embargo Amerika Serikat yang berakhir tahun 2020,” pungkasnya. □



DER

Wacana Pemisahan DJP dari Kemenkeu

Fadel Muhammad: “Saya ikut mendorong Pemisahan DJP dari Kemenkeu”

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, menilai, inilah saatnya negara kembali serius memikirkan untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kemenkeu.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DASAR pemikiran hingga munculnya wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah fenomena dunia perpajakan nasional yang sedang mendapat cobaan serius, yakni terungkapnya kasus sejumlah aparatur negara bidang perpajakan yang menimbun kekayaan tidak wajar, hingga menimbulkan kecurigaan adanya malapraktik dalam sistem perpajakan. Seperti, terbukanya kasus seorang pegawai di Kanwil DJP Jaksel yang merembet ke sejumlah pejabat lain.

Lebih mengejutkan, menurut Fadel Muhammad, Menko Polhukam Mahfud MD., menyebut bahwa ada transaksi janggal

senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu. Transaksi itu melibatkan lebih dari 460 pegawainya dalam periode 2009-2023 dan sebagian besar dilakukan oleh pegawai DJP.

“Kita akan tunggu kelanjutan penelusuran transaksi mencurigakan dengan nilai yang fantastis itu. Yang mengkhawatirkan adalah, akibat kasus-kasus tersebut, di tengah masyarakat ramai muncul imbauan agar tidak membayar pajak,” ujar Fadel Muhammad saat memberikan keterangan pers di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2023).

“Imbauan itu muncul karena mereka merasa pajak yang dibayarkan rakyat

digunakan hanya untuk memperkaya oknum--oknum DJP. Imbauan itu harus segera diredam melalui perbaikan di Kemenkeu agar kepercayaan publik pada Kemenkeu, khususnya DJP, kembali meningkat,” tambah dia.

Pertanyaan besarnya, lanjut Fadel Muhammad, adalah mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Apakah hierarki organisasi di Kemenkeu yang menyangkut DJP kurang ideal? Perlukan DJP dipisahkan dari Kemenkeu karena DJP memiliki beban pekerjaan yang besar sehingga pantas naik kelas menjadi lembaga setingkat menteri?.

Senator Dapil Provinsi Gorontalo ini mengungkapkan, dulu pernah terlontar adanya wacana agar DJP dipisahkan dari



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kemenkeu, dengan membentuk otoritas pengelola pajak independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

“Saya sempat mempraktikkan ide pemisahan itu dalam skala kecil ketika menjadi Gubernur Provinsi Gorontalo (2001-2009), dengan menarik biro keuangan yang semula berada di Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi lembaga otonom yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur dengan nama Badan Keuangan Daerah,” paparnya.

“Tentu tidak *apple to apple* membandingkannya dengan DJP. Saya cuma terinspirasi ketika pada periode 2014-2015 terpilih menjadi Ketua Komisi XI DPR RI. Pada saat itu, saya termasuk yang ikut mendorong agar DJP dipisahkan dari Kemenkeu, dengan membentuk lembaga baru yang bernama Badan Keuangan Negara yang bertugas untuk menghimpun pajak sebagai pengganti

atau perubahan nama dari DJP. Badan ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” terang dia.

Pemerintah, lanjutnya, sebenarnya sudah berinisiatif membuat draf RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (RUU KUP) pada tahun 2015. Di Pasal 95 disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Namun, sampai berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2014-2019, pembahasan tersebut tidak tuntas. Pada DPR RI periode berikutnya (2019-2024), pemerintah mengajukan RUU KUP dengan draf baru pada Mei 2021. Akan tetapi tidak menyebutkan mengenai posisi DJP menjadi

lembaga di bawah Presiden. “Saya tidak tahu apa alasannya,” ujarnya.

Fadel menilai, inilah saatnya negara kembali serius memikirkan untuk memisahkan DJP dari Kemenkeu. Dulu banyak ahli yang mendorong agar DJP dipisah dari Kemenkeu agar ada lembaga setingkat menteri yang fokus menangani pajak. Apalagi penerimaan pajak Indonesia saat ini mencapai lebih dari 75% dari pendapatan negara. Pada APBN 2023 dianggarkan penerimaan negara akan mencapai sebesar Rp 2.463 triliun dengan pendapatan dari pajak sebesar Rp 2.021,2 triliun atau sekitar 82%.

Memang pemisahan DJP dari Kemenkeu membutuhkan kajian mendalam menyangkut berbagai hal. Apakah DJP yang terpisah dari Kemenkeu itu berupa Badan Keuangan Negara yang bersifat otonom atau semi-otonom. Kalau mengacu pada janji Joko Widodo sebelum menjadi Presiden, salah satunya adalah akan membuat DJP menjadi lembaga otonom lepas dari Kemenkeu dan langsung berada di bawah Presiden.

Lagi pula, ungkap Fadel, pemisahan otoritas pajak dari Kemenkeu sudah banyak contohnya. Amerika Serikat, misalnya, lembaga pajaknya yang bernama Internal Revenue Service (IRS) merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu AS.

Singapura juga memiliki otoritas pajak yang semi-otonom bernama Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). IRAS tidak berada di bawah Kementerian Keuangan meskipun mendapat supervisi dari dewan pengawas yang diketuai oleh Menteri Keuangan Singapura.

Selain kedua negara itu, beberapa negara berkembang telah melakukan transformasi otoritas perpajakan dari konsep tradisional di bawah kementerian keuangan menjadi lembaga semi-otonom (Semi-Autonomous Revenue Authority- SARA).

Indonesia bisa saja membentuk otoritas perpajakan semi-otonomi seperti yang sempat diajukan pada RUU PUK 2015. Pertama, karena momentumnya saat ini tepat menyusul sorotan publik pada DJP dan Kemenkeu. Kedua, untuk memenuhi janji kampanye Jokowi yang akan memisahkan DJP dari Kemenkeu. Nama otoritasnya bisa Badan Penerimaan Pajak atau Badan Keuangan Negara, atau nama lain yang sesuai. □



Audiensi PP Pemuda Persis

HNW Ajak Generasi Muda Berperan Aktif Menghidupkan Demokrasi

Pemuda Islam tidak boleh kalah dalam berkiprah untuk demokrasi Indonesia, seperti para pemuda Islam zaman dahulu.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DILIHAT dari perjalanan sejarah bangsa, demokrasi yang sampai saat ini terimplementasi di Indonesia adalah juga hasil perjuangan bersama para tokoh pemuda Muslim dan pimpinan organisasi Islam, seperti Jong Islamiyeten Bond dan Mohammad Natsir, seorang tokoh dan ulama Persis, pimpinan Partai Masyumi.

Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur

Wahid, Lc, MA., mengungkapkan, saat berkiprah dalam konteks demokrasi, tujuan mereka sangat mulia, yakni ingin dalam menjalani kehidupan bernegara, berkontribusi untuk kemerdekaan dan kemajuan Indonesia, sekaligus juga sebagai sarana untuk menjalankan ajaran agama. “Dan, itu semua sesuai dengan Pancasila dari sila pertama hingga sila ke lima,” jelas HNW.

Oleh karena itu, HNW menegaskan, sudah selayaknya jika warisan bersejarah dalam hal yang terkait dengan demokrasi itu terus dijaga dan dilanjutkan oleh generasi muda saat ini. Caranya, para pemuda Islam Indonesia harus semakin artikulatif di dalam menghidupkan demokrasi sebagai upaya melanjutkan peran bersejarah itu. Tujuannya, untuk membantu umat dan bangsa, serta menjadi solusi atas berbagai masalah, serta menjawab berbagai peluang dan tantangannya. “Sehingga kekhawatiran akan terjadinya pembelahan warga bangsa dan berbagai krisis yang menyertainya akan semakin terminimalisir,” ujar HNW.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari PKS ini saat berdialog dengan delegasi PP Pemuda Persis yang dipimpin Ketua Umum-nya, Ibrahim Fahmi, di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Lebih lanjut, HNW menyatakan, bangsa Indonesia sudah memasuki tahun politik, karena pada tahun 2024 akan ada Pemilihan Umum. Tahun itu merupakan momentum pembuktian kiprah mensejarah generasi milenial, termasuk pemuda Islam yang terhimpun dalam Pemuda Persis untuk peduli akan nasib umat dan masa depan bangsa. Sebagai negara demokrasi, sebut HNW, itulah jalur rasional dan konstitusional bagi untuk generasi milenial untuk berkiprah demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

“Saya tekankan, hal itu sangatlah penting dipahami para generasi muda Islam. Sebab, mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemilih muda, sekitar 60%. Dengan kekuatan sebesar itu, generasi muda bisa ikut menentukan nasib bangsa, dengan mempergunakan kedaulatannya sebagai rakyat dengan memilih pemimpin nasional dan daerah yang berkualitas, serta wakil rakyat yang lebih baik dan jujur, profesional, dan benar-benar bekerja untuk negara dan



rakyat,” terang HNW.

Namun, lanjut HNW, tidak semua pemuda memiliki kepedulian. Banyak juga yang masa bodoh, menganggap enteng hak pilihnya bisa menentukan nasib bangsa, sehingga banyak yang anti politik. Bahkan, ada pemuda-pemuda Islam yang terpengaruh dengan pemahaman beragama yang sempit, sehingga ikut-ikutan melabeli demokrasi itu bid'ah. Padahal demokrasi bisa jadi wasilah (sarana) memperjuangkan sunnah, serta maslahat rakyat. Untuk itu, HNW berharap, pemuda yang peduli untuk bisa mengajak dan menularkan kepeduliannya kepada

generasi muda lain yang a-politik atau tidak mempunyai kepedulian terhadap nasib umat dan bangsa yang bisa diperjuangkan melalui media demokrasi.

“Saya mempunyai keyakinan, generasi muda bisa ulangi sejarah bahkan menjawab tantangan sejarah dengan mengalahkan apatisisme di kalangan generasi muda. Sebab, generasi muda memiliki kemampuan untuk saling memengaruhi. Apalagi era ini adalah eranya kemajuan teknologi informasi, seperti internet, smart phone, dan media sosial,” tandasnya.

HNW pun mengapresiasi program dan

kinerja PP Pemuda Persis yang sudah menjadwalkan adanya sekolah politik, dan kerja volunteer nyata dengan membina masyarakat di Pulau Nusakambangan.

“Begitu diterimanya mereka, sehingga pantai di sana ada yang dinamakan ‘Pantai Pemuda Persis’. Itu bukti nyata bahwa generasi muda Muslim tetap cinta bangsa dan negara, dan bisa memberikan kontribusi yang berkualitas dan bermanfaat untuk NKRI, karena Islam yang diyakini pemuda Muslim ini memang rahmatan lil ‘alamin,” pungkasnya. □

DER

Bertemu Para Pengusaha Korea

Bamsoet Dorong Korindo Group Tingkatkan Investasi di Indonesia

Bertepatan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea, MPR RI pada 12 Januari 2023 memberikan medali dan piagam penghargaan kepada Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho. Ini sebagai simbol persahabatan dan kerjasama antarkedua negara,

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Korindo Group yang sejak tahun 1969 telah mengembangkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea. Ke depan diharapkan Korindo Group bisa terus meningkatkan investasi di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat terpukul akibat pandemi Covid-19.

“Tahun ini tepat 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea. Sebagai simbol persahabatan dan kerjasama antarkedua negara, MPR RI pada 12 Januari 2023 memberikan medali dan piagam penghargaan kepada Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho. Medali dan piagam penghargaan diterima oleh putera Seung Eun Ho, Robert Seung, mewakili Seung Eun Ho yang berhalangan hadir karena sedang sakit,” ujar Bamsoet usai bertemu pimpinan Korindo Group di Jakarta, Rabu (22/3/23).

Hadir Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Arsul Sani. Sementara pimpinan Korindo Group yang hadir, antara lain Chair-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

man Seung Eun Ho, Senior Vice Chairman Robert Seung, Vice Chairman Park Inchul, President Mun Jinseok, Vice President Jo Myung Kook, Managing Director An Geunhyo, dan Kim Youngchoel, Executive Director Lee Sunghoon, serta Dosen IAIN Ali An Sungeun.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selama lebih dari 50 tahun Korindo Group telah menjalankan program investasi dan penciptaan lapangan kerja untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Antara lain di sektor perkebunan, pengolahan kayu dan hutan, produksi kertas, tenaga angin, industri berat, logistik, perdagangan, properti serta bisnis keuangan.

“Korindo Group melalui berbagai sektor bisnis yang ada telah menanamkan dana investasi di Indonesia mencapai sekitar USD 2,5 milyar. Serta memiliki lebih dari 20 ribu karyawan, di mana 99% atau sekitar 19.800 di antaranya adalah tenaga kerja Indonesia,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Korindo Group juga aktif melakukan program CSR di berbagai daerah melalui wadah Yayasan Korindo. Di antaranya, membangun fasilitas pendidikan seperti 9 PAUD, 9 TK, 13 SD, 6 SMP, 3 SMA, dan 2 perpustakaan. Serta fasilitas rumah ibadah, antara lain 23 masjid, 13 gereja, dan 7 katedral. Pemberian bantuan pembangunan rumah sakit, pembangunan fasilitas umum, bantuan sarana dan peralatan pendidikan, serta



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pemberian beasiswa bagi ribuan mahasiswa/pelajar berprestasi.

“Selain itu, Korindo Group juga melakukan aksi pelestarian lingkungan hidup, bantuan pembangunan perumahan, bantuan layanan dan fasilitas kesehatan masyarakat, bantuan modal bagi pelaku UMKM, bantuan

sosial kemanusiaan bagi korban bencana alam, bantuan sembako bagi kaum dhuafa, bantuan APD dan logistik selama masa pandemi Covid-19, dan masih banyak lagi program CSR yang dilakukan secara konsisten di berbagai wilayah di Indonesia,” pungkas Bamsoet. □

Kerjasama Indonesia-Korea

Untuk Pengembangan Kampus UNPERBA

Kampus UNPERBA di Purbalingga akan meningkatkan kerjasama dengan berbagai perusahaan Korea, baik yang ada di Purbalingga maupun di Indonesia.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan pendiri/Pembina Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Bambang Soesatyo menuturkan, dalam rangka meningkatkan hubungan baik Indonesia dengan Korea, kampus UNPERBA di Purbalingga akan meningkatkan kerjasama dengan berbagai perusahaan Korea di Purbalingga maupun yang ada di Indonesia pada umumnya. Mengembangkan kampus UNPERBA menjadi ‘UNPERBA. Indonesia-Korea.’

Melalui peningkatan kerjasama tersebut, berbagai lulusan UNPERBA akan mendapatkan kesempatan berkarir di berbagai perusahaan Korea. Baik yang beroperasi di Purbalingga maupun di



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berbagai wilayah Indonesia lainnya, termasuk yang berada langsung di Korea. Misalnya, untuk lulusan S-1 Informatika, S-1

Akuntansi, dan S-1 Manajemen UNPERBA, bisa diarahkan berkarir di Bank Bukopin. Sedangkan Program Studi S-1 Teknik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Mesin bisa berkarir di Hyundai dan berbagai perusahaan otomotif Korea maupun di perusahaan motor listrik yang akan segera dibangun oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) bersama Korea-Indonesia Association, di daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Sehingga lulusan S-1 Teknik Mesin UNPERBA bisa berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas kendaraan listrik Indonesia.

“UNPERBA juga akan membuka program studi baru, Bahasa dan Budaya Korea. Sebagai langkah awal akan didahului dengan pembukaan kursus Bahasa dan Budaya Korea, bekerjasama dengan King Sejong Institute Center Indonesia, sebuah Lembaga Bahasa Korea di bawah naungan Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Republik Korea.

Selanjutnya, setelah lancar berbahasa Korea mereka bisa dengan mudah berkarir

di berbagai perusahaan Korea yang ada di Purbalingga maupun di berbagai wilayah Indonesia lainnya, termasuk dapat berkarir di berbagai perusahaan yang berada langsung di Korea. “Mengingat, setiap tahunnya, Korea membutuhkan 4 ribu lebih tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di berbagai sektor industri di Korea,” ujar Bamsuet usai menerima Rektor UNPERBA Dr. Eming Sudiana dan Penghubung Komunitas Indonesia-Korea (Korea-Indonesia Association) Mr. Ali, di Jakarta, Senin (13/3/23).

Turut hadir, antara lain Dewan Pengawas Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Laras Shintya Putri Soesatyo, Dewan Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Widji Laksono, dan Pimpinan Cabang BRI Purbalingga, Yoga Aditya Pratama.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kerjasama UNPERBA dengan Korea telah ditunjukkan dengan baik melalui PT. Sung Chang Indonesia, salah satu produsen bulu mata palsu terbesar bukan hanya di Kabupaten Purbalingga dan Indonesia melainkan juga dunia. Sebagai tahap awal kerjasama, PT Sung Chang Indonesia telah memberikan beasiswa pendidikan kepada 18 orang karyawannya untuk menempuh pendidikan di UNPERBA.

“Melalui perluasan kerjasama dengan berbagai perusahaan Korea lainnya, warga Purbalingga selain bisa bekerja juga dapat kesempatan menempuh pendidikan yang lebih baik di UNPERBA. Jam kuliah bisa menyesuaikan dengan waktu pekerjaan mereka. Sehingga tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Hari kuliah, misalnya, bisa Sabtu dan Ahad dengan waktu kuliah di malam hari,” jelas Bamsuet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain bekerjasama dengan Korea, UNPERBA juga telah bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkait pengadaan fasilitas perbankan untuk menunjang operasional dan manajemen kampus. Seperti Cash Management System (CMS), BRIVA BRI Virtual Account), serta id Card.

UNPERBA juga akan bekerjasama dengan IMI untuk memberikan beasiswa pendidikan kuliah kepada para siswa SMA/SMK berprestasi di dunia otomotif. Dalam waktu dekat akan diberikan kepada siswa SMK YPT 1 Purbalingga yang turut berpartisipasi melahirkan sepeda motor listrik prototipe Purbalingga dengan nama Bralink EV-1.

“Salah satu fokus Program Studi S-1 Teknik Mesin UNPERBA, yakni melahirkan teknisi handal yang bisa berkontribusi bagi Indonesia dalam mengembangkan kendaraan listrik. Bersama berbagai perusahaan Korea, kita akan rekrut sebanyak mungkin talenta muda berbakat dari SMA dan SMK untuk menempuh pendidikan di UNPERBA. Sehingga setelah lulus, mereka bisa berkarir di berbagai perusahaan otomotif Korea, seperti Hyundai maupun perusahaan motor listrik kerjasama IMI dengan Korea-Indonesia Association,” pungkas Bamsuet. □



PT. BAMS Membuktikan:

Hasil Pertanian Indonesia Tak Kalah Dibanding Negara Tetangga

Ketua MPR RI Bamsuet dukung kerjasama PT. Banjarnegara Agro Mandiri Sejahtera (BAMS) dan Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) majukan UMKM Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan pendiri PT. Banjarnegara Agro Mandiri Sejahtera (BAMS), Bambang Soesatyo, bersama Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) yang dipimpin Ary Zulfikar, akan berkolaborasi memajukan UMKM Indonesia. Salah satunya, memasarkan berbagai

produk olahan pertanian PT. BAMS, seperti keripik salak, nangka, pisang, pepaya, edamame, hingga makanan olahan dalam kaleng, seperti opor ayam, garang asem, nasi goreng, dan berbagai produk lainnya, ke berbagai pasar luar negeri dalam satu merek kolektif "LUPBA".

"Berbagai produk PT. BAMS tersebut

sebelumnya telah menembus pasar Jepang, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, dan berbagai negara lainnya. Bahkan, untuk makanan olahan dalam kaleng juga telah tersedia untuk Ransum TNI-Polri. Melalui kolaborasi dengan Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) diharapkan berbagai produk PT. BAMS tersebut bisa semakin menembus berbagai pasar negara lain. Sehingga bisa membuat produk UMKM Indonesia membanjiri pasar internasional," ujar Bamsuet usai menerima pengurus PBA, di Jakarta, Jumat (17/3/23).

Pengurus PBA yang hadir, antara lain Ketua Umum Ary Zulfikar, Ketua Dewan Pengawas James Ibrahim, Sekretaris Umum Arie Budiman, Ketua Bidang Hubungan Lembaga dan Luar Negeri Dewi Tenty Septi Artiany, Ketua Bidang Promosi dan IT Hassan M. Lubis, dan Wakil Bendahara Peni.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kerjasama PBA dengan PT. BAMS melalui satu merek LUPBA juga untuk menyukseskan program Kementerian Hukum dan HAM RI yang mencanangkan tahun 2023 sebagai tahun merek. Perlindungan merek mutlak dibutuhkan untuk mencegah serta menghindari pelanggaran serta memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan merek.

"Lupba One Brand merupakan bukti keberhasilan dari Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) yang dapat menyamakan visi-misi para anggotanya untuk dapat maju bersama, bergerak bersama, dan bekerja sama dalam naungan merek kolektif. Pada awal di-launching hanya 6 produk saja, sekarang sudah lebih dari 30 varian produk yang tergabung di dalam Lupba. Banyak sekali keuntungan dari merek kolektif yang dirasakan oleh anggotanya, yaitu memudahkan pendaftaran merek, perlindungan merek dari merek kolektif itu sendiri dalam hal distribusi, penjualan, dan



promosi. Hal seperti itu yang harus dipahami oleh masyarakat tentang pentingnya merek kolektif,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, PBA telah menandatangani nota kesepahaman dengan SGT Handels GmbH, perusahaan ekspor-impor yang berbasis di Bern, Swiss. Serta menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan Korea Selatan, Prime Global

Network Co.Ltd. Melalui berbagai kerjasama tersebut, memudahkan pemasaran berbagai produk UMKM Indonesia yang tergabung dalam PBA ke pasar Swiss, Korea dan berbagai negara sekitarnya.

PT. BAMS didirikan Bamsuet pada tahun 2003 di Kabupaten Banjarnegara, salah satu daerah pemilihannya di Dapil 7 Jawa Tengah. Diresmikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Kehadirannya selain untuk membuka lapangan pekerjaan juga untuk membuktikan hasil bumi Banjarnegara memiliki

kualitas mumpuni untuk menguasai pasar internasional.

“Sebagai negara agraris sangat disayangkan jika hasil pertanian tidak kita olah lebih lanjut untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi. Melalui kegiatan pabrikasi berskala ekspor, serta kini ditunjang kolaborasi dengan PBA, PT BAMS telah membuktikan kepada dunia bahwa hasil pertanian Indonesia tidak kalah dibanding negara tetangga. Semisal, Thailand, Vietnam, dan Malaysia,” pungkash Bamsuet. □

Doa Kerukunan Provinsi Banten

Yandri Susanto Berharap, Isi Deklarasi Damai Umat Beragama Sampai ke Akar Rumput

Indonesia punya banyak suku, ras, agama, budaya, pulau, warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya. Perbedaan itu sejatinya adalah kebanggaan kita.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR H. Yandri Susanto, S.Pt., menghadiri Doa Kerukunan, penandatanganan Prasasti SBSN dan pembukaan Rapat Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Ballroom Royale Krakatau Hotel Cilegon, Banten, Senin, 20 Maret 2023. Bersama dengan itu para tokoh lintas agama (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindhu, Budha, dan Kong Hu Chu) mengucapkan Deklarasi Damai Umat Beragama yang dipandu Ketua Forum

Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Banten, AM. Romli.

Sekitar 450 orang yang hadir turut mengucapkan Deklarasi Damai Umat Beragama ini. Deklarasi ini berisi, antara lain menyampaikan pesan tentang pentingnya komitmen untuk merawat kebhinnekaan, mengupayakan bersama gerakan moderasi beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan harmonis, komitmen untuk menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan

tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik, dan komitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah untuk aktivitas politik praktis sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu.

Yandri Susanto menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap Doa Kerukunan dan Deklarasi Damai Umat Beragama, serta penandatanganan prasasti SBSN, dan Rakerwil Kemenag Provinsi Banten. Dia berharap, Deklarasi Damai Umat Beragama bisa didengungkan sampai ke akar rumput. “Deklarasi Damai Umat Beragama ini jangan hanya didengungkan di gedung ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana frekuensi suara Deklarasi Damai Umat Beragama ini sampai ke akar rumput. Sebab, biasanya gesekan terjadi di akar rumput,” katanya.

Tampak hadir Koordinator Staf Khusus Menteri Agama, H. Abdur Rochman, Staf Ahli Gubernur Banten, Agus Setiawan, Kepala Kanwil Kemenag Nanang Fatchurahman, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, Ketua FKUB Banten AM Romli, Ketua Umum MUI Banten KH. Tb. Hamdi Ma’ani, Ketua PWNu Banten KH Bunyamin Hafidz, para penyuluh agama, kepala KUA, kepala madrasah, Ormas Islam (Al Khairiyah, Muhammadiyah, Mathlauh



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Anwar, Aisyiyah, Persis), KPU dan Bawaslu Banten.

Yandri mengharapkan makna dan pesan Deklarasi Damai Umat Beragama ini bisa

sampai ke akar rumput, yaitu rakyat yang ada di Provinsi Banten. "Makna dan pesan kuat dalam Deklarasi Damai Umat Beragama yang kita bacakan hari ini hendaknya bisa

kita tularkan kepada akar rumput, yaitu rakyat yang ada di Provinsi Banten. Maka, dengan deklarasi ini, kami dari MPR berharap, Provinsi Banten bisa menjadi contoh untuk provinsi lainnya di seluruh Indonesia," ujar anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Menurut Yandri, para ulama dan tokoh lintas agama perlu bersatupadu untuk memastikan keberlangsungan dan persatuan Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan lainnya. "Sehingga jangan sampai ada yang berpikiran untuk mengubah dasar negara Pancasila, atau memecahbelah NKRI. Kalau masih ada pikiran-pikiran seperti itu maka pasti terjadi pergolakan, gesekan, dan pertengkarannya yang tidak perlu dan melelahkan kita semua," imbuh anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten II ini meliputi Kabupaten dan kota Serang, serta kota Cilegon ini.

Dia menegaskan bahwa perbedaan sudah pasti ada dan perbedaan-perbedaan itu jangan dipaksakan untuk menjadi sama. Indonesia ada karena adanya perbedaan-perbedaan. Indonesia punya banyak suku, ras, agama, budaya, pulau, warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya. "Perbedaan itu sejatinya adalah kebanggaan kita. Kalau kita memaksakan perbedaan itu menjadi persamaan maka kita bakal ribut dan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Karena itu, perbedaan harus kita syukuri dan kita rawat," tuturnya.

Perbedaan, lanjut Yandri Susanto, tetap ada termasuk dalam pilihan politik atau memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, gubernur, bupati, walikota, dan lainnya. Karena perbedaan itu maka perlu pemilihan umum (Pemilu). "Pesan saya, dalam Pemilu yang akan datang, pilihan boleh berbeda, warna boleh beda, tetapi di dalam dada kita tetap Merah Putih. Jangan kita korbankan Merah Putih hanya karena persoalan perbedaan pilihan politik," ujarnya.

"Maka, sekali lagi, melalui doa kerukunan dan Deklarasi Damai Umat Beragama ini, tahun politik dan puncaknya Pemilu pada 14 Februari 2024 bukan menjadi sebuah ketakutan tetapi menjadi kegembiraan dan suka cita bagi kita. Mudah-mudahan Provinsi Banten menjadi contoh," pungkasnya. □



Fadel Muhammad Bertemu Pj Gubernur Gorontalo

Bahas Wacana Kawasan Pangan Nasional dan Bandara Nani Wartabone

Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar di bidang pertanian, seperti jagung dan beras. Potensi itu jika dikembangkan akan menjadi lumbung pangan nasional.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir H. Fadel Muhammad, melakukan kunjungan kehormatan ke Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer. Pertemuan dan dialog digelar di Ruang Kerja Gubernur, Kompleks

Kantor Gubernur, Botu, Kota Tim, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Rabu (8/3/2023).

Dalam dialog dengan gubernur, Fadel Muhammad membahas wacana tentang Kawasan Pangan Nasional di Kecamatan Marissa dan Randangan. Menurut Ketua

Dewan Jagung Nasional ini, hampir semua wilayah Gorontalo memiliki potensi menjadi lumbung pangan, bukan hanya untuk kebutuhan provinsi tapi juga nasional.

“Pertanian di Gorontalo, terutama jagung, sangat baik. Dulu, pada masa kepemimpinan saya sebagai gubernur, produksi jagung sangat tinggi hingga bisa melakukan ekspor ke beberapa negara. Hal ini sangat berdampak baik buat kesejahteraan rakyat petani,” kata Fadel usai pertemuan. Fadel menyatakan, sangat mendukung jika ada rencana untuk menjadikan kawasan Marissa dan Randangan menjadi Kawasan Pangan Nasional, dan akan membantu agar terwujud.

Satu hal penting lagi yang menjadi materi pembahasan dalam dialog kedua tokoh tersebut adalah soal ide perubahan nama Bandar Udara Djalaludin Gorontalo menjadi Bandar Nani Wartabone.

“Saya sampaikan kepada beliau (gubernur) bahwa Gorontalo memiliki seorang Pahlawan Nasional Nani Wartabone yang menjadi kebanggaan rakyat Gorontalo. Beliau seorang pemberani dan dikenal sebagai Proklamator Kemerdekaan Indonesia di Gorontalo pada 23 Januari 1942 atau dikenal Hari Proklamasi Gorontalo,” ungkap mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini.

Sebagai warga Gorontalo, Senator asal dapil Provinsi Gorontalo ini tidak ingin sejarah dan nama Nani Wartabone lama-kelamaan menghilang seiring perjalanan waktu. “Karena itulah, saya bersama teman-teman dari Paguyuban Masyarakat Gorontalo Rantau ‘Lamahu’ membuat surat resmi berisi usulan pergantian nama itu ke Gubernur. Kami berharap, Gubernur menyurati Menteri Perhubungan perihal pergantian nama tersebut. Respon gubernur sangat baik dan berjanji akan mempelajari dan membicarakannya dengan stakeholder terkait,” pungkasnya. □

DER



Diskusi Empat Pilar 'PPHN Tanpa Amandemen'

Bamsoet: TAP MPR Salah Satu Solusi Manakala Terjadi Kebuntuan Konstitusi

Ketua MPR RI Bamsoet tegaskan, untuk mengantisipasi terjadinya kebuntuan persoalan bangsa, MPR perlu kembali memiliki kewenangan subjektif superlative.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, Indonesia perlu segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi terjadinya situasi darurat konstitusi atau kedarutan yang memaksa tidak dapat terlaksananya konstitusi yang dapat mencegah sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara, termasuk dalam upaya menghadirkan kembali PPHN sebagai peta jalan pembangunan bangsa.

Mengembalikan kewenangan MPR RI menggunakan kewenangan subjektif superlatif MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Kewenangan subjektif superlatif penting berada di MPR jika negara dihadapkan pada situasi kebuntuan politik antarlembaga negara atau antarcabang kekuasaan.

Misalnya, kata Bamsoet, kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan (pemerintah/eksekutif) dengan lembaga DPR (legislatif). Atau bagaimana jika terjadi kebuntuan politik antara Pemerintah dan DPR (eksekutif dan legislatif) dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (yudikatif)? Atau terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan MK, padahal sesuai asas peradilan yang berlaku universal, yaitu hakim

tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri, maka MK tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara.

"Menurut saya, TAP MPR merupakan salah satu solusi manakala terjadi kebuntuan konstitusi dan kedarutan atau kegentingan yang memaksa, seperti halnya Presiden yang memiliki kewenangan PERPPU manakala terjadi kedarutan atau kegentingan yang memaksa," ujar Bamsoet dalam Diskusi Empat Pilar 'PPHN Tanpa Amandemen' di Media Center Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3/23).

Bamsoet juga mengingatkan tentang kekhawatiran yang pernah disampaikan oleh Ahli Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra tentang perlunya Indonesia memikirkan tata cara pengisian jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum atau Pemilu yang karena suatu kedarutan penyelenggaraan Pemilu ditunda.

"Misalnya kedarutan disebabkan gempa bumi megathrust di selatan Pulau Jawa, kerusuhan massal, maupun karena pandemi global yang terulang kembali, sehingga Pemilu harus ditunda," jelas Bamsoet.

Dikatakannya, Pasal 431 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur tentang penundaan Pemilu, yakni

disebabkan karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian dan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

"Namun, tidak ada ketentuan dalam konstitusi maupun dalam perundangan mana pun tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu," tegas Bamsoet.

Tidak adanya ketentuan hukum tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu, lanjutnya, menjadi salah satu yang terlewatkan pada saat melakukan amendemen konstitusi yang dimulai pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Padahal kata Bamsoet, bisa saja suatu saat nanti bangsa Indonesia menghadapi kondisi force majeure yang luar biasa sehingga menyebabkan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan, termasuk kita juga tidak pernah membayangkan jika suatu ketika capres/cawapres hanya calon tunggal yang terpaksa berhadapan dengan kotak kosong dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

Pasangan Capres dan Cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50 % dari jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikitnya 20 % suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Hadir sebagai pembicara antara lain Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fahri Hamzah, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil, dan Direktur Eksekutif Voxpol Indonesia Pangi Syarwai Chaniago.

Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fahri Hamzah sependapat MPR perlu kembali diberikan kewenangan politik dari sekedar kewenangan seremonial seperti yang dimiliki sekarang. Mengaktifkan kembali tools yang dimiliki oleh MPR berupa Ketetapan MPR sangat penting. Hal tersebut akan sangat efektif mengurai problem konstitusional dan ketatanegaraan. Jika intervensi politik tingkat tinggi diperlukan dalam mengurai kebuntuan politik, maka yang melakukannya adalah sebuah lembaga yang cukup kuat dalam sejarahnya.

“Ada banyak contoh kebuntuan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Konsitusi kita. Seperti pengaturan tentang anggaran pendidikan 20%, kemungkinan terjadinya perang, dan juga apabila presiden bersama DPR bersepakat untuk mengambil kebijakan yang dampaknya ekstrim bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Semua ini memerlukan instrumen intervensi yang levelnya bukan pada presiden atau DPR dan DPD, juga bukan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsitusi. Tetapi intervensi diperlukan pada level Majelis Permusyawaratan Rakyat,” urai Fahri.

Fahri menambahkan, dalam hirarki peraturan perundangan, TAP MPR memang berada pada posisi ke dua di bawah UUD NRI Tahun 1945. Namun berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, yang dimaksud dengan Ketetapan MPR tersebut adalah TAP MPRS dan TAP MPR sampai tahun 2002.

“Artinya, MPR tidak lagi bisa membuat Ketetapan MPR karena Ketetapan MPR produk di atas tahun 2002 tidak masuk dalam hirarki peraturan perundangan. Maka penjelasan pasal 7 UU 12/2011 mutlak harus dihapus dengan revisi UU atau yudicial review. Dengan demikian berbagai kebuntuan

persoalan bangsa, termasuk PPHN, langsung bisa ditarik ke MPR dengan ditetapkan sebagai TAP MPR,” tandas Fahri.

Direktur Eksekutif Voxpol Indonesia, Pangi Syarwai Chaniago, menegaskan, bangsa Indonesia butuh haluan negara. Bahkan, Perdana Menteri Singapura dari tahun 1959–1990 Lee Kwan Yew mengaku terinspirasi GBHN yang dibuat Presiden RI Soeharto dalam membangun Singapura. Adanya GBHN membuat negara punya trayek, arah serta intensitas dalam melakukan pembangunan. Sehingga, menginspirasi

Berbeda dengan negarawan yang berpikir panjang, tidak hanya 5 tahun, tetapi bisa 25 tahun bahkan 50 ke depan dalam membangun bangsa.

Menurut Pangi, ada kecenderungan politisi kita kurang mengapresiasi dan kurang menghargai terhadap politisi, kepala daerah atau presiden sebelumnya. Buktinya hampir semua kepala daerah atau presiden ketika ganti kepala daerah atau presiden maka ganti pula program pembangunan yang dijalankan. “Pokoknya harus ganti program, ganti kebijakan baru, gengsi kalau melanjutkan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Singapura saat berganti kepemimpinan tidak membuat kehilangan arah, kehilangan intensitas dan trayek, dan jalan yang tetap dalam pembangunan selanjutnya.

“Saat ini masih ada kekhawatiran jika Presiden Jokowi sudah tidak menjadi presiden, apakah legacy beliau semisal pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tetap dilanjutkan. Kalau kita ada PPHN mungkin kekhawatiran itu tidak terjadi. Boleh presiden berganti, boleh kepala daerah berganti, tetapi legacy keberlanjutan, kesinambungan pembangunan itu akan terus laju jalannya,” ujar Pangi.

Pangi menambahkan, saat ini bangsa Indonesia memiliki banyak politisi hebat, namun sedikit memiliki sosok negarawan. Kalau politisi hanya berpikir bagaimana bisa menang dan berkuasa dalam 5 tahun.

legacy dari pimpinan terdahulu. Karena itulah, perlu adanya haluan negara agar pembangunan bisa tetap berkesinambungan, sekalipun terjadi pergantian kepemimpinan,” urai Pangi.

Sementara Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, menilai, menghadirkan PPHN tanpa amandemen sangat mungkin dilakukan. PPHN diperlukan jika memang banyak permasalahan negara disebabkan karena tidak adanya haluan negara dalam pembangunan nasional.

“Kita butuh konsistensi dan berkesinambungan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional. Karenanya, menghadirkan PPHN tanpa amandemen ini sesuatu yang masuk akal. Bisa saja kita lakukan tidak harus ada operasi konstitusi,” pungkas Nasir. □

Tolak Tidak Timnas Israel Di Piala Dunia U-20

Piala Dunia U-20 yang akan digelar pada bulan Mei - Juni 2023 merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penggemar sepakbola di Indonesia. Karena dalam event itu akan hadir di tanah air timnas dari negara-negara jago main bola. Namun, pelaksanaan kegiatan itu ada ganjalan yang sangat berarti, karena Israel termasuk salah satu partisipan Piala Dunia U-20. Ia dianggap bermasalah, sebab negara Israel dianggap masih berstatus sebagai penjajah. Indonesia sejak dulu menentang keberadaan negara Israel. Bagaimana menyikapi rencana kehadiran Israel ke Indonesia untuk berkontestasi dalam laga sepakbola dunia? Berikut pendapat wakil rakyat.

Jazuli Juwaini, Anggota MPR Fraksi PKS

Menjaga Marwah Konstitusi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PKS terang-terangan menolak rencana kedatangan Timnas Israel U-20 yang dijadualkan akan berlaga di Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. PKS meminta agar Pemerintah dan PSSI juga menolak kedatangan Timnas Israel U-20. Apalagi, penolakan luas disuarakan oleh berbagai elemen bangsa mulai dari ormas seperti MUI, Muhammadiyah, DDII, hingga kalangan DPR. Demikian rilis yang disebar ke berbagai media.

Sudah seharusnya Pemerintah dan PSSI menolak kontingen Israel dengan argumentasi yang rasional dan objektif. Kita dengan jelas dapat mengatakan bahwa Indonesia menolak kehadiran negara penjajah

di wilayah kedaulatan Republik Indonesia sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945, amanat Konferensi Asia Afrika, dan legasi sikap RI sejak masa Bung Karno.

Sikap tegas menolak segala bentuk hubungan dan aktivitas kerjasama dengan Israel harus selalu digaungkan oleh Indonesia di forum apapun. Tidak ada tempat bagi negara penjajah yang membunuh rakyat Palestina dan merampas tanah mereka. Kebiasaan Israel harus mendapat respon setimpal dari dunia internasional, apalagi Indonesia yang berdiri tegak bersama bangsa Palestina. Apa gunanya diplomasi kita membela kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa Palestina jika kita bermanis-manis

menerima kontingen olahraga mereka di negara kita.

'Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,' begitu bunyi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang dihafal betul oleh rakyat Indonesia. Lalu dalam berbagai forum, baik pemerintah, parlemen, maupun elemen masyarakat sipil bicara lantang membela bangsa Palestina dengan mengatakan "Palestina selalu ada di hati bangsa Indonesia, ada dalam jantungnya diplomasi Indonesia, dan seterusnya."

Bukankah sebuah pengkhianatan atas amanat konstitusi dan perjuangan kita bersama selama ini jika kita membuka kerjasama dengan negara Israel, termasuk dalam olahraga? Kita harus tegas mengatakan, Israel jangan merasa punya hak atas penerimaan bangsa-bangsa dunia, sementara mereka setiap hari membunuh dan merampas hak dasar bangsa Palestina.

Oleh karena itu, PKS meminta dengan tegas agar Pemerintah dan PSSI menolak kedatangan Timnas Israel U-20 untuk menjaga marwah konstitusi, menjaga kemanusiaan, dan menjaga kewarasan sebagai bangsa yang beradab.

Sikap tegas itulah yang dicontohkan Proklamator kita Bung Karno yang menolak kesertaan Israel dalam berbagai event olahraga di masa lalu, seperti dalam Asian Games 1962 meski harus berhadapan dengan sanksi dari federasi olahraga dunia. Pemboikotan atas kontingen Israel juga pernah dilakukan oleh sejumlah Negara, seperti Turki, Mesir, Sudan, Indonesia, dan

negara lain sebagai bentuk penolakan atas praktik penjajahan dan keberpihakan kepada Palestina yang berpuluh tahun dijajah oleh

Israel.

Jangan sampai Pemerintah sekarang justru membuat preseden buruk dengan

mengizinkan kehadiran negara penjajah itu masuk wilayah NKRI. □

AWG

Sjarifuddin Hasan, Wakil Ketua MPR/Anggota MPR Fraksi Demokrat

Kedua Negara Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik

PEMERINTAH harus bersikap tegas terhadap rencana keikutsertaan Timnas sepakbola Israel di ajang Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia, 20 Mei - 11 Juni 2023. Terlebih, saat ini penolakan terhadap rencana kedatangan Timnas sepakbola Israel di ajang Piala Dunia U-20 itu sudah disuarakan oleh berbagai ormas, mulai dari yang bersifat keagamaan hingga kepemudaan.

Penolakan berbagai kelompok masyarakat terhadap rencana kedatangan Timnas sepakbola Israel bisa dimengerti. Apalagi memang, sejauh ini kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik dan itu menjadi persoalan tersendiri.

Pemerintah harus tegas menyikapi rencana kedatangan Timnas Israel ke Indonesia. Jangan membiarkan persoalan ini semakin meluas, apalagi penolakan masyarakat terhadap rencana kedatangan Timnas Israel semakin hari semakin bertambah banyak.

Mengingatkan, rencana kehadiran Timnas Israel harus dipertimbangkan secara matang-matang. Bagaimanapun, olahraga bisa sangat berpengaruh terhadap dunia



diplomatik. Karena itu, pemerintah harus bersikap dengan tegas, apalagi sampai saat ini Indonesia tidak mengakui keberadaan Israel.

Pemerintah harus konsisten terhadap sikap yang dipegang selama ini. Yaitu, terhadap masalah perdamaian dan kemerdekaan di muka bumi. Jangan sampai di satu sisi menentang penjajahan Israel di Palestina, tetapi menerima kedatangan tim bola negara Israel untuk bertanding di Indonesia.

Sejak dulu, secara tegas konstitusi

bangsa Indonesia selalu konsisten menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dan, sampai kapanpun, dukungan itu tidak akan pernah lekang, sebelum kemerdekaan Palestina bisa terwujud secara utuh.

Kita juga telah menerima konsekuensi bahwa Bangsa Indonesia tidak memiliki hubungan dengan Israel dalam hal apapun. Karena itu, kita juga tidak memiliki keharusan untuk mengakomodir. Jadi sekali lagi pemerintah harus tegas. □

AWG

Kuliah Umum di Universitas Pohnomo

Fadel Muhammad: Kualitas SDM Kunci Majunya Sebuah Negara

Sebuah negara akan berkembang dan maju jika generasi mudanya muncul menjadi SDM unggul dan berkualitas



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DALAM rangkaian kunjungan kerjanya di berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menyempatkan diri menyambangi Universitas Pohnomo untuk memberikan Kuliah Umum kepada para mahasiswa dan mahasiswi lintas fakultas.

Kuliah Umum yang mengambil tema: 'Leadership dan Enterpreneurship' ini di gelar di Aula Universitas Pohnomo, Duhiadaa,

Provinsi Gorontalo, Senin (6/3/2023), dihadiri Ibu Hana Hasanah Fadel Muhammad, Wakil Rektor I Rusni Djafar, dan para dosen.

Kepada para mahasiswa, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kunci majunya sebuah bangsa. Dengan SDM yang handal, pengelola negara akan mampu mengelola kekayaan dan potensi bangsanya semaksimal mungkin untuk kepentingan

rakyat.

"Soal SDM ini jangan dianggap enteng. Adik-adik mahasiswa bisa melakukan riset sederhana. Negara sebesar Afrika kaya akan sumber daya alam, seperti berlian, minyak bumi, batubara. Tapi dengan semua kekayaan itu, Afrika tetap menjadi negara yang jauh di bawah negara kecil yang minim SDA, seperti Belgium yang sangat kaya dengan sumber daya manusia," ujar Fadel Muhammad.

Melihat pentingnya sumber daya manusia, mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini menekankan kepada mahasiswa agar serius, rajin dalam menempuh pendidikan di kampus. Sebab, di lembaga pendidikanlah SDM yang unggul bisa tumbuh dan berkembang.

"Pada saat saya menjabat Gubernur Gorontalo, pengembangan SDM menjadi salah satu dari tiga program besar, selain pertanian dan perikanan/kelautan. Dengan itu (tiga program besar) Alhamdulillah, saya bisa mengelola Gorontalo menjadi lebih baik. Tanpa tiga program besar itu tidak mungkin mengelola Gorontalo," jelas Fadel Muhammad.

Namun, lanjut Fadel, semua hal baik yang dikerjakan mesti ada generasi penerus agar kebaikan itu berlanjut tanpa henti, bahkan lebih. Generasi muda mahasiswa-lah yang akan meneruskannya.

"Saya sudah bicara dengan Bupati, Wakil Bupati, dan para pejabat Pemkab Pohnomo agar mulai dari sekarang mengembangkan branding daerah. Saya sampaikan bahwa branding kabupaten ini adalah pertanian, terutama jagung. Dengan itu, kabupaten ini di masa depan bisa menjadi lumbung pangan provinsi, bahkan nasional. Mudah-mudahan hal ini terwujud dan kalian di masa depan — saat kepemimpinan bergeser — bisa melanjutkan, bahkan bisa menyempurnakan branding daerah kalian," pungkasnya. □

DER



Kunker ke Pabrik Corn Dryer

Fadel Muhammad Harap, Kuantitas dan Kualitas Produksi Jagung Rakyat Meningkatkan

Hasil jagung petani Gorontalo sangat bagus, pabrik pengolah jagung rakyat harus dikembangkan.

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, bersama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Rahmat, Selasa (7/3/2023), meninjau salah satu pabrik yang dimiliki perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri perdagangan dan pengeringan (Silo Dryer) jagung milik PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) Plant Gorontalo, di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Gorontalo.

Kunjungan ini dilakukan Fadel Muhammad di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo, tujuannya melihat langsung aktivitas pabrik dalam pengelolaan jagung di Gorontalo. Saat diterima oleh Pimpinan Regional PT CPI untuk wilayah Timur Indonesia, Ketua Dewan Jagung Nasional ini langsung melakukan diskusi dan dialog seputar pengelolaan jagung rakyat.

Kepada para Pimpinan PT. CPI, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini menyampaikan bahwa dirinya bercita-cita dan ingin mewujudkan Gorontalo sebagai Kawasan Lumbung Pangan dalam lingkup provinsi, dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

lebih luas lagi mampu berkontribusi secara nasional. "Untuk itu saya meninjau ke pabrik untuk mengetahui secara detil dan langsung mendapat gambaran produksi jagung Gorontalo," tambahnya.

Dari penjelasan PT. CPI, Fadel Muhammad mengetahui bahwa bahan baku utama pabrik, yakni jagung, dibeli langsung dari para petani di berbagai kabupaten di Gorontalo dan juga dari Provinsi Sulawesi Tengah dan





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sulawesi Utara. Bahkan, pabrik juga menerima dan membeli jagung yang dibawa petani memakai karung dengan transportasi motor, masuk ke pabrik.

Sejak mulai beroperasi tahun 2020 hingga saat ini, pabrik telah membeli sekitar 177 ribu ton jagung rakyat dengan harga yang dirasakan Fadel cukup baik.

“Saya berkeliling melihat-lihat kegiatan pabrik secara langsung, pabrik beroperasi menggunakan sistem otomatis berteknologi tinggi untuk mengeringkan jagung. Bahkan, mampu menerima sampai 1000 ton jika sedang musim. Beda dengan dulu, sebelum ada pabrik, masyarakat petani mengeringkan jagungnya hanya mengandalkan

terpal dan panas matahari,” ungkapnya kepada wartawan, usai berkeliling meninjau kegiatan pabrik.

Dengan adanya pabrik seperti ini, lanjut Fadel Muhammad, semestinya Gorontalo bisa menghasilkan produksi jagung lebih besar lagi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. “Namun, memang ada kendala saat ini, seperti benih/ bibit dan pupuk terbatas dan juga mahal. Tapi, alhamdulillah PT. CPI melalui program kemitraannya dengan para petani membantu penyediaan bibit jagung dan insektisida yang bagus,” ujar Senator dapil Gorontalo ini.

Fadel Muhammad juga mendorong PT. CPI agar, ke depan, memperluas bantuan kepada

mitra taninya dengan menyediakan bibit dan pupuk yang bagus. “Bibit yang berkualitas harus bisa didapatkan para petani. Ini penting, sebab dengan bibit yang bagus maka produksi jagung akan berkualitas juga,” katanya.

Fadel Muhammad juga meminta, pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola dengan baik bibit dan pupuk subsidi untuk rakyat. Jika subsidi bibit dan pupuk itu ternyata kurang maksimal dinikmati rakyat dan kurang merata maka harus dicari mekanisme lain. Seperti, membeli bibit dan pupuk non subsidi.

“Soal harga, nanti kita akan mengupayakan bekerjasama dengan lembaga keuangan pemberi kredit seperti BRI, agar mempermudah petani mendapatkan kredit lunak,” tambahnya.

Fadel juga menyampaikan, sebagai tindak lanjut rencana untuk menjadikan Gorontalo sebagai lumbung pangan nasional akan digelar pertemuan dan diskusi tingkat nasional di Gorontalo bersama Menteri Pertanian RI dan stakeholder jagung, termasuk pelaku industrinya. Tujuan utamanya, agar masyarakat kembali bersemangat bertani jagung di Gorontalo.

“Saya akan gerak cepat, besok tanggal 8 Maret 2023, saya akan coba bicarakan hal ini langsung dengan PJ Gubernur Gorontalo, mudah-mudahan lancar. Pada intinya, kita sama-sama bersinergi, bekerjasama ingin secara sistematis bisa menaikkan kuantitas dan kualitas produksi jagung di Gorontalo,” tandasnya. □

DER





Perempuan Bersatu Menuntut Hak

Sejarah pergerakan perempuan diawali dengan berbagai masalah yang dihadapi. Jam kerja yang tinggi, upah yang tidak sepadan, serta tidak dilibatkan dalam urusan politik membuat kaum perempuan atau kaum ibu merasa tertekan. Perasaan yang sama membuat kaum perempuan bersatu turun jalan dan memperjuangkan ide serta gagasan dalam berbagai konferensi. Gerakan perempuan muncul di banyak negara. Hari Perempuan pun beda negara beda tanggal. Agar Bersatu dan satu tujuan maka PBB menetapkan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret.

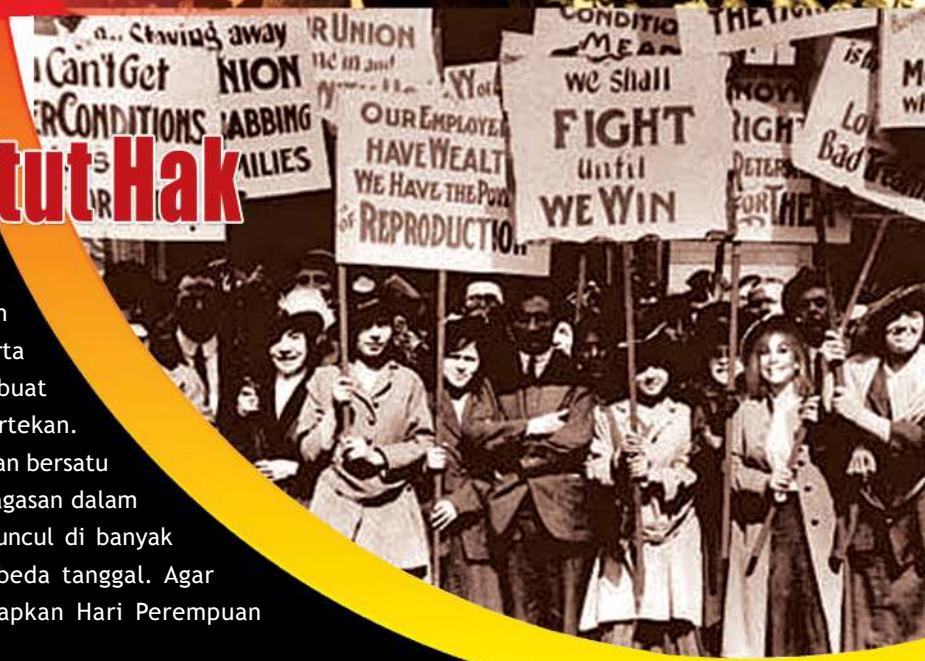


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SITUASI Amerika Serikat pada tahun 1908-an serba ketidakpastian. Meski kehidupan kota-kota besar di sana terlihat glamour, namun sejatinya di sana banyak kesulitan. Keluarga-keluarga di sana hidup penuh dengan tekanan ekonomi. Kaum perempuan atau ibu-ibu di sana yang juga merupakan tulang punggung keluarga mengalami perihnya derita kehidupan.

Sebagai ibu yang mengasuh anak dan melayani suami, ditambah jam kerja kantor yang panjang, serta upah yang diterima tidak sepadan membuat mereka gelisah dan stres. Kegundahan dan kesulitan hidup kaum perempuan tersebut rupanya dialami oleh mayoritas kaum ibu di Amerika.

Perasaan senasib itu rupanya menjadi isu yang hangat di negeri Paman Sam itu. Sebagai negara demokrasi, mereka ingin menyuarakan penderitaannya. Mereka bersuara agar pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja mau menaikkan upah dan memangkas atau menyesuaikan jam kerja bagi kaum perempuan.

Agar tuntutan itu tercapai, mereka tidak sekadar curhat saat berkumpul, namun pada tahun 1908 mereka melakukan aksi besar-besaran. Di Kota New York pada waktu itu berkumpul sebanyak 15.000 ibu. Mereka turun ke jalan atau demonstrasi untuk menuntut 'Tritura,' yakni: Upah kerja yang lebih baik, hak untuk memilih, serta jam kerja yang singkat dan layak.

Satu tahun kemudian, tepatnya 28 Februari 1909, Amerika Serikat kali pertama memperingati Hari Perempuan Nasional. Perayaan ini bisa berlangsung atas inisiatif Partai Sosialis Amerika. Perayaan itu terus dilakukan hingga Minggu terakhir Februari tahun 1913.

Gerakan kaum perempuan tersebut rupanya menjadi isu hangat dan ditangkap oleh para aktivis dan partai politik untuk memperjuangkannya. Seorang aktivis pembela hak-hak perempuan yang bernama Clara Zetkin menangkap isu demonstrasi yang dilakukan di New York tersebut dengan mengusulkan pembentukan hari perempuan internasional. Ia juga Pemimpin 'Kantor



FOTO-FOTO: ISTMIMEWA

Wanita' untuk Partai Sosial Demokrat di Jerman.

Isu tersebut dibawanya ke berbagai konferensi perempuan. Saat digelar Konferensi Internasional Perempuan Pekerja II di Kopenhagen, Denmark, tahun 1910, Zetkin mengusulkan idenya itu. "Peringatan tersebut penting untuk mendesak tuntutan mereka akan hak-hak kesetaraan perempuan," ujarnya. Idenya diterima oleh seratus peserta konferensi yang datang dari 17 negara. Semua bulat mendukung ide Zetkin.

Dalam catatan dari salah satu sumber yang ada tentang Hari Perempuan Internasional, disebutkan tanggal 19 Maret 1911 ditetapkan sebagai perayaan pertama

Hari Perempuan Internasional. Hari perempuan pertama kali itu dirayakan di berbagai negara Eropa, seperti di Austria, Jerman, Denmark, dan Swiss.

Sementara dalam *Wikipedia* disebut, Hari Perempuan Internasional pertama kali dirayakan pada tanggal 28 Februari 1909 di New York dan diselenggarakan oleh Partai Sosialis Amerika. Partai ini memang partai yang menolak sistem kapitalisme. Propaganda yang disebarluaskan pada masyarakat, seperti menawarkan solusi atas masalah yang muncul akibat sistem kapitalisme, yaitu masalah terkait kesejahteraan buruh, rasialisme, diskriminasi terhadap perempuan, dan anti perang.

Meski Hari Perempuan Internasional sudah



Clara Zetkin



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dirayakan di Amerika dan negara-negara di Eropa, namun sepertinya itu belum menjadi kesepakatan nasional. Ada satu peristiwa lagi yang selanjutnya akan dijadikan Hari Perempuan Internasional. Pada 8 Maret 1917, kaum perempuan di Petrograd melakukan demonstrasi.

Petrograd adalah salah satu kota yang

ada di Rusia. Sekarang kota ini bernama Sankt-Peterburg. Dulu juga pernah disebut Kota Leningrad. Terlepas dari nama, kota ini merupakan kota pelabuhan yang terletak di tepi Sungai Neva dan Teluk Finskiy. Penduduknya berjumlah 4.848.700 jiwa berdasarkan sensus tahun 2010. Di kota ini mengalir lebih dari 40 sungai dan kira-kira

20 kanal. Kota ini merupakan pusat industri, ilmu, dan budaya yang penting serta mempunyai industri mesin, besi, baja, kimia, dan pangan.

Demonstrasi yang dilakukan oleh kaum perempuan di Petrograd tersebut intinya sama dengan tuntutan kaum perempuan yang lain, yakni adanya kehidupan yang sejahtera. Pada masa itu dunia tengah dilanda Perang Dunia I. Perang ini terjadi pada masa 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini melibatkan kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu: Sekutu (Inggris, Prancis, dan Rusia) dan Blok Sentral (Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia).

Kondisi perang yang berkepanjangan inilah yang membuat penderitaan masyarakat Eropa, Kaum perempuan atau ibu yang menjadi tulang punggung keluarga menjadi paling terpuak sehingga mereka melakukan demonstrasi akan arti pentingnya kesejahteraan dan perdamaian sehingga aksi yang dilakukan disebut dengan 'roti dan perdamaian'.

Mereka tidak hanya melakukan aksi, namun juga mogok kerja. Dalam salah satu sumber sejarah diungkap, aksi para perempuan tersebut terjadi pada hari Minggu





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

23 Februari dalam Kalender Julian, yang saat itu digunakan di Rusia. Jika dihitung dalam kalender Gregorian, aksi tersebut jatuh pada 8 Maret.

Aksi yang dilakukan oleh kaum perempuan tersebut sangat dahsyat. Gerakan yang dilakukan juga memicu terjadinya Revolusi Rusia. Dalam *Wikipedia* disebut Revolusi Rusia pada 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintahan Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet.

Lebih lanjut diungkap, Revolusi Rusia berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas II yang memerintah secara diktator. Rakyat Rusia yang merasakan kehidupan di berbagai bidang akibat kediktatoran Tsar Nicholas II akhirnya berhasil menghimpun kekuatan dan menentang kekuasaannya dalam bentuk revolusi. Revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kediktatoran Rusia.

Kembali kepada aksi perempuan Rusia, bila Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sudah memiliki Hari Perempuan Internasional, maka Uni Soviet juga mencanangkan harinya tersendiri. Pada 8 Maret itulah mereka memperingati hari itu sebagai Hari Perempuan Internasional versi Uni Soviet. Ketika Blok Timur kokoh berdiri,

ia dirayakan dan diperingati di negara-negara yang masuk blok itu.

Masyarakat dunia mungkin bingung hari perempuan internasional mana yang akan dirayakan bila masing-masing negara memiliki harinya. Agar tidak membuat bingung sembari menyatukan masyarakat dunia maka PBB pada tahun 1975, ada pula yang menyebut tahun 1977, memilih 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional. Pada hari itu PBB menyebut sebagai hari untuk

memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam *katadata.co.id*, 8 Maret 2023, ditulis soal 'Arti Warna Ungu Saat Hari Perempuan Internasional'. Dijelaskan dalam *website* itu Hari Perempuan Internasional atau *International Womens Day (IWD)* yang diperingati setiap 8 Maret identik dengan warna ungu. Penggunaan warna dominan ungu dalam peringatan telah berlangsung sejak lama. Namun, warna ungu lebih sering





FOTO-FOTO: ISTMENWA

digunakan meski sebenarnya terdapat 3 warna yang dipakai dalam seremonial Hari Perempuan Internasional. Masing-masing, yakni ungu, hijau, dan putih.

Lebih lanjut dalam *website* itu, dikutip dari laman resmi IWD, arti warna ungu dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia adalah menandakan keadilan dan martabat, serta setia kepada tujuan. Sementara itu, dalam konteks yang sama, arti dan makna warna hijau melambangkan harapan, lalu warna putih mewakili kemurnian, kendati konsepnya masih kontroversial.

Hari Perempuan Internasional tahun ini mengusung tema "*DigitALL: Innovation and Technology for Gender Equality*". Dalam ditsmp.kemdikbud.go.id, 08/03/2023, dijelaskan pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi kesenjangan *gender* yang terjadi kepada perempuan terhadap akses teknologi. Representasi mereka yang kurang dalam pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering and Math) serta karier di bidang teknologi digital tetap menjadi penghalang utama bagi partisipasi mereka dalam desain dan tata kelola teknologi.

Selain kesenjangan *gender* pada pendidikan dan karier teknologi, dunia digital juga kurang memberikan keleluasaan akibat ancaman kekerasan *online* berbasis *gender*. Selain itu, ditambah dengan kurangnya bantuan hukum untuk kasus-kasus kekerasan *daring*.

Lebih lanjut dalam *website* itu diterangkan, pada saat yang sama, teknologi digital membuka pintu baru bagi pemberdayaan perempuan, anak perempuan, dan kelompok terpinggirkan lainnya secara global. Dari pembelajaran digital yang responsif *gender* hingga layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang difasilitasi teknologi, era digital telah menunjukkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk menghilangkan segala bentuk kesenjangan dan ketidaksetaraan.

Dalam hari perempuan tahun ini, *website* itu mengajak pada momen Hari Perempuan Internasional ini untuk bersama-sama menyerukan dan memberikan dukungan agar dunia digital lebih aman, lebih inklusif, dan lebih adil. Dalam menghadapi berbagai krisis global, kita memiliki peluang untuk menciptakan masa depan lebih baik, tidak hanya untuk perempuan dan anak perempuan, tetapi juga untuk seluruh umat manusia dan semua kehidupan di bumi. □

AWGI dari berbagai sumber



Menuntut Hak Dari **Balik Tembok**

Budaya yang mengungkung membuat Kartini harus rela menepikan cita-citanya untuk sekolah di Belanda dan Batavia. Dalam keterbatasan ia merangkai kata untuk memperjuangkan kesetaraan kaumnya. Berhasil mendirikan Sekolah Wanita. Cita-citanya dikenang sehingga sekarang.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

JAUH sebelum kaum perempuan di Eropa bersuara tentang diri dan hak-haknya, di Hindia - Belanda (Indonesia) muncul sosok perempuan yang memperjuangkan kesetaraan kaumnya. Kesetaraan dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Sosok itu adalah bernama Kartini yang bergelar raden ajeng dan raden ayu.

Dari berbagai sumber yang ada, perempuan yang lahir pada 21 April 1879 itu merupakan anak dari Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat. Ia adalah Bupati Jepara. Sebagai anak dari bangsawan pada masa itu, Kartini dapat menikmati dunia pendidikan. Ia bersekolah di *Europeesche Lagere School* (ELS) hingga usia 12 tahun.

Selepas itu di sinilah muncul masalah bagi Kartini. Hidup dalam budaya dan tradisi yang masih tertutup, membatasi aktivitas kaum perempuan. Ada pingitan di masanya membuatnya harus tinggal di rumah.

Kartini mengakui, ayahnya adalah orang yang berpikiran maju, terbukti menyekolahkan

anak-anaknya. Dalam suratnya diungkapkan mengasihi dirinya. Ayahnya mengizinkan Kartini belajar di Betawi untuk menjadi guru walau sebelumnya ia melarang Kartini sekolah di Belanda atau STOVIA.

Meski tinggal di rumah, Kartini tidak tinggal diam atau sekadar menikmati kemewahan sebagai anak bupati. Ia belajar sendiri di rumahnya. Ketrampilan berbahasa Belanda dimanfaatkan untuk bertukar kabar dengan

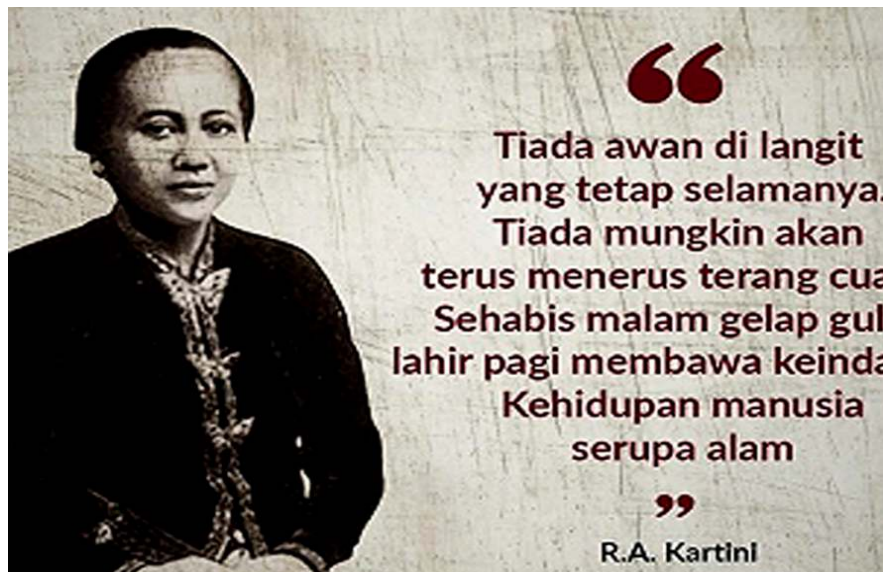




FOTO-FOTO: ISTIMEWA

orang-orang Belanda. Lewat surat menyurat, ia bertukar pikiran dengan banyak orang dan aktivis, seperti Rosa Abendanon, Stella Zeehandelaar, P van Kol, M. C. E. Ovink-Soer, N. Adriani, H.G. de Booy-

Boissevain, dan Prof. Dr. G.K. Anton.

Dari korespondensi, ditambah dengan berbagai macam buku, koran, dan majalah, Kartini bisa melihat dunia akan kemajuan dan kesetaraan perempuan Eropa. Pengetahuan



Kartini akan dunia luar juga didapat dari kakaknya, Raden Mas Sosrokartono.

Dari sumber yang ada, Sosrokartono selepas tamat dari ELS di Jepara melanjutkan Pendidikan di HBS di Semarang. Ia rupanya memiliki cita-cita yang tinggi. Buktinya, pada tahun 1898, Sosrokartono melanjutkan pendidikan ke Belanda. Ia masuk di Sekolah Teknik Tinggi di Delft. Rupanya, jiwanya tidak cocok dengan bidang keteknikan sehingga ia pindah ke Jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur. Dunia Pendidikan kesusastraan rupanya dunia yang dinikmati sehingga ia meraih gelar *Doctorandus in de Oostersche Talen* dari Universitas Leiden. Dari catatan yang ada, Sosrokartono merupakan orang Indonesia pertama yang kuliah di Belanda.

Kembali ke Kartini, saat di rumah atau ketika dipingit, ia rajin membaca surat kabar *De Locomotief* yang didapat dari Semarang. Tak hanya majalah asuhan Pieter Brooshooft yang ia baca, berbagai majalah dan koran yang beredar pada masa itu, seperti *De Hollandsche Lelie* dan yang lainnya juga ia baca.

Tercatat ia juga membaca buku *Max Havelaar*, *Surat-Surat Cinta* karya Multatuli, *De Stille Kraacht*, serta karya-karya tulisan dari Augusta de Witt, Goekoop de-Jong Van Beek, Berta Von Suttner, dan Die Waffen Nieder. Semua buku dan sumber bacaan itu berbahasa Belanda.

Dari kegemarannya membaca itulah membuat dirinya banyak menemukan hal-hal baru tentang peradaban manusia, seperti tentang emansipasi dan masalah sosial dan umum. Semua buku yang dibaca akhirnya membentuk pikiran pada otaknya dan mengalir pada perjuangan untuk mengangkat derajat kaum perempuan.

Di saat dirinya bersemangat bertukar pikiran dengan orang-orang Eropa, ayahnya menjodohkan dirinya dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat. Suaminya rupanya tahu cita-cita dan kemauan Kartini akan pentingnya emansipasi dan dunia pendidikan sehingga ia memberi kebebasan, mendukung, dan mengizinkan Kartini untuk mendirikan Sekolah Wanita di kompleks pendopo



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kabupaten Rembang.

Takdir menemukan jalan baginya, setelah melahirkan anak yang pertama, 13 September 1904, empat hari kemudian, tepatnya 17 September 1904, dirinya meninggal dunia. Ia pergi untuk selamanya di usia 25 tahun.

Cita-cita besar Kartini terungkap setelah Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, Jacques Abendanon, mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirim Kartini pada sahabat-sahabatnya di Eropa. Kumpulan

surat Kartini yang dibukukan itu diberi judul *Door Duisternis tot Licht*. Dalam bahasa Indonesia artinya *Dari Kegelapan Menuju Cahaya*. Buku yang sekarang terkenal dengan judulnya *Habis Gelap Terbitlah Terang* itu diterbitkan kali pertama tahun 1911.

Banyak gagasan besar Kartini terungkap setelah dirinya tiada. Mengutip dari *Wikipedia*, dirinya menceritakan tentang kondisi sosial saat itu. Ia mengeluh akan kondisi yang dialami kaum perempuan di

Jawa. Menurutnya, budaya yang ada dipandang sebagai penghambat kemajuan kaumnya. Kartini ingin kaum perempuan memiliki kesempatan dan kebebasan untuk menuntut ilmu dan belajar.

Dalam satu suratnya ia menggambarkan derita perempuan Jawa karena dikungkung adat sehingga tidak bisa bebas bersekolah. Kaum perempuan pada masa itu harus dipingit dan harus rela dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal. Dalam suratnya ia mencurahkan perasaannya ketika menghadapi tantangan yang dihadapi untuk menjadi perempuan Jawa yang lebih maju.

Gagasan besar, cita-cita, dan ide Kartini atas emansipasi tersebut membuat pemerintah memberikan banyak tanda jasa. Presiden Soekarno pada 2 Mei 1964 mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 yang menetapkan dirinya sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Tak hanya itu pada hari dirinya dilahirkan ditetapkan sebagai Hari Kartini. Setiap 21 April bangsa ini memperingati Hari Kartini.

Mungkin ada yang menganggap hanya satu buku Kartini yang berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang*, padahal buku tentang diri dan pemikirannya banyak. Dalam *Wikipedia* disebut buku-buku tentang dirinya selain *Habis Gelap Terbitlah Terang* adalah *Surat-surat Kartini*, *Renungan Tentang dan Untuk Bangsaanya*. Ini merupakan buku kumpulan surat Kartini versi Sulastin Sutrisno.

Ada juga *Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 1900–1904*. Buku ini diterjemahkan Joost Coté. Disebut Cote tidak hanya menerjemahkan surat yang ada dalam *Door Duisternis Tot Licht*, namun juga menerjemahkan seluruh surat asli Kartini pada Abendanon-Mandri hasil temuan terakhir. Dalam buku ini bisa ditemukan surat yang tergolong sensitif dan tidak ada dalam *Door Duisternis Tot Licht* versi Abendanon.

Panggil Aku Kartini Saja. Buku ini merupakan karya sastrawan Pramoedy Ananta Toer. Buku ini disebut merupakan hasil dari pengumpulan data dari berbagai sumber oleh sang penulis, Pramoedy. □

AWGI dari berbagai sumber



Melissa Sandra

Pekerja Warung Kuliner Tamendou

Berharap Perguruan Tinggi Terjangkau Masyarakat Kecil



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEBAGAI masyarakat biasa, saya menginginkan kehidupan yang lebih baik. Mungkin, bukan saya saja tapi banyak anak muda lain yang berpikiran yang sama. Namun, untuk meraih masa depan lebih baik kan butuh pendidikan lanjutan atau pendidikan tinggi. Saya inginlah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, bahkan sampai S2

Namun, buat rakyat kecil, pendidikan tinggi merupakan suatu hal yang mewah. Karena mahal, tidak terjangkau, mereka tak memikirkan terlalu jauh. Mereka lebih baik memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya berharap pada pemerintah agar menyediakan pendidikan yang ramah buat rakyat kecil. Ramah dalam artian terjangkau dari sisi biaya.

Saya rasa, jika ini terjadi maka akan terwujud keadilan yang merata, sesuai sila kelima Pancasila. Dengan demikian, rakyat secara keseluruhan akan memiliki masa depan yang lebih baik lagi. □

DER

Uci

Pedagang di Pasar Rakyat Marisa Pohuwato

Pedagang Pasar Harus Lebih Diperhatikan

SAYA sangat suka dan senang jika ada pejabat negara mengunjungi kami pedagang di pasar, seperti yang dilakukan oleh Pimpinan MPR, Bapak Fadel Muhammad.

Beliau tidak sungkan, berbecek-becek dan berpanas-panas mengunjungi kami untuk melakukan dialog dan bertanya-tanya tentang keadaan kami. Beliau antara lain menanyakan, apa yang membuat kami susah atau apapun soal ekonomi. Namanya pedagang kecil, didatangi pejabat negara, ya kami langsung saja mengadu soal kesulitan kami.

Bapak Fadel memberikan kami berbagai nasihat atau wejangan dan tips untuk menaikkan omzet dagangan kami. Beliau juga menjanjikan, jika kami kesulitan mengenai sesuatu maka beliau akan membantu atau berjanji akan membicarakan dengan pihak terkait.

Saya maunya begitu, aspirasi kami sebagai pedagang kecil didengar oleh pejabat. Maka sering-seringlah pejabat, terutama pejabat daerah, datang kepada kami. Dengarlah keluh kesah kami, karena kami kan rakyat yang harus dilindungi. □

DER



Narwan, Relawan Kemanusiaan

Di Balik Setiap Bencana Ada *Rasa Syukur*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BAGI relawan kemanusiaan, khususnya yang beragama Islam, Ramadan menjadi saat yang ditunggu-tunggu untuk menebar kebaikan semaksimal yang mereka mampu. Sebagaimana lazimnya umat Islam, para relawan juga percaya kebaikan yang mereka ulurkan selama bulan puasa memiliki timbangan pahala yang lebih berat dibanding hari biasa.

Karena itu, meski diterpa lapar dan dahaga, kegiatan relawan membantu meringankan beban korban bencana, tak berkurang sedikitpun. Sebaliknya mereka semakin bergairah, agar dalam aktivitas sosial yang dilaksanakan, mereka juga bisa meraih kemuliaan dari langit.

Semangat seperti itu juga dirasakan Narwan (36), Direktur Response dan Recovery Dompot Duafa (DD). Karena itu, selama Ramadan ini, Narwan beserta teman-temannya, tak sedikitpun mengendurkan semangat membantu para korban. Seperti membangun rumah sementara, MCK darurat, ataupun sekolah sementara bagi para korban gempa dan tanah longsor di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Sebagai relawan, Narwan harus siap bekerja selama 24 jam. Kapan saja tugas memanggil, dia harus selalu siap untuk diterjunkan. Di Gempa Palu pada 2018

misalnya, Narwan dituntut menjalankan tugas selepas dua hari menikah. Bahkan, saat ada beberapa saudaranya meninggal, ia tak sempat menengok, dan baru takziah setelah tugasnya selesai.

Tidak itu saja, ketika dia tengah melaksanakan tugas, dan ada tugas lain yang harus dikerjakan, maka Narwan tidak bisa balik badan. Apalagi, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Response dan Recovery.

“Waktu Depo Pertamina Plumpang

terbakar, saya masih di Cianjur. Karena, butuh reaksi cepat, jadi saya langsung arahkan tim kesehatan, pencarian dan tim barzah untuk menuju ke lokasi kebakaran. Saya sendiri tidak bisa turun, karena butuh waktu lama untuk sampai di tempat kebakaran,” kata Narwan kepada *Majalah Majelis* beberapa waktu lalu.

Bagi Narwan, kejadian darurat seperti itu sudah sering dihadapi, apalagi dia sendiri sudah 13 tahun mengabdikan untuk Dompot



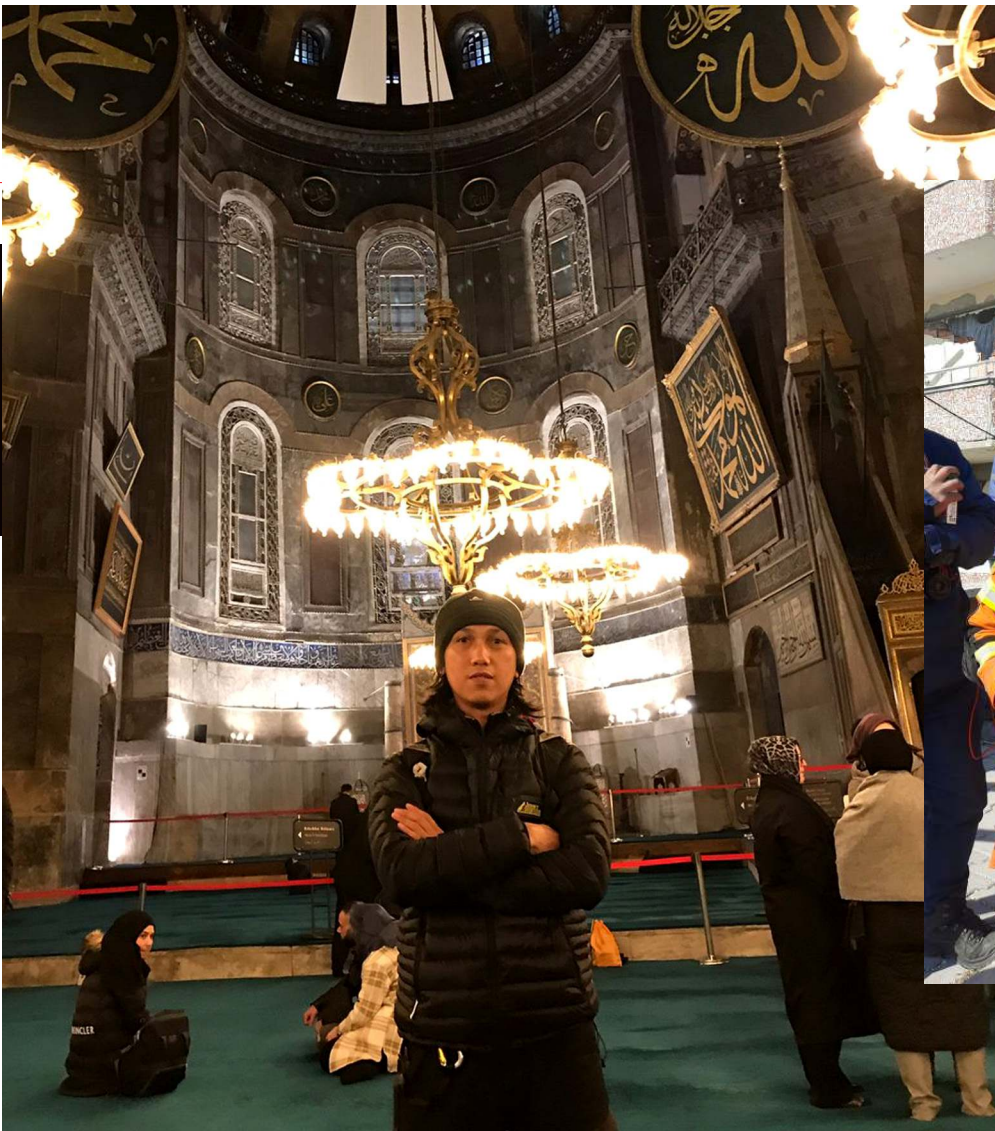


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Duafa. Dalam 13 tahun itu, sudah ratusan kejadian bencana, yang ditangani pria kelahiran Tangerang 15-06-1987. Mulai dari bencana alam, non-alam maupun kerusuhan sosial. Baik di dalam maupun di luar negeri

Tim Rescue

Dalam menangani bencana, keselamatan para korban maupun tim penolong menjadi prioritas. Tetapi, saat tim penolong terjun dilokasi kerusuhan sosial, acapkali keselamatan mereka malah dipertaruhkan. Bahkan, pada beberapa kasus, tim rescue memilih pulang, karena ancamannya sangat besar.

Dari ratusan bencana yang menuntut keterlibatannya, kasus Mesuji Lampung tahun 2012 adalah salah satu yang memberi kesan mendalam. Saat itu keterlibatannya di Lampung adalah kasus bencana akibat kerusuhan sosial pertama yang dia ikuti. Sempat ada rasa ragu-ragu, tetapi Narwan berusaha untuk tetap tenang menghadapi medan. Karena, di sana ia menemukan adanya dua golongan masyarakat saling

berhubungan. Pro dan kontra pemerintah.

Pada gempa Palu 2013 Narwan juga ikut tim rescue. Saat itu terdapat sedikit salah paham dari masyarakat. Kebetulan, kebanyakan korban beragama Nasrani sudah dapat bantuan dari gereja, sedangkan yang muslim belum dapat bantuan.

“Kami bergerak dulu ke tempat yang belum dapat bantuan. Ternyata, langkah ini dianggap pilih kasih, sehingga sempat ada salah paham, bahkan saya sempat diancam dengan parang. Padahal kita sudah siapkan juga buat masyarakat Nasrani, cuma belum ada kesempatan membagikan, karena prioritasnya yang belum dapat bantuan dulu,” ungkap Narwan.

Kasus yang lebih mengekam terjadi di Rohingya tahun 2017. Saat itu, Narwan beserta tim menumpang speedboat untuk mencapai daerah konflik. Tetapi belum sampai turun, mereka ditodong dengan senjata AK-4.

“Itu adalah kali pertama saya ke luar negeri, dan kali pertama ditodong, badan terasa lemes yang muncul adalah rasa takut yang

sangat. Tetapi, setelah diterangkan bahwa ini adalah tim kemanusiaan mereka baru percaya, bahkan memberikan pengalaman, selama di sana,” kata Narwan lagi.

Narwan sendiri bergabung dengan DD sejak 2010. Saat itu, ada seorang kawannya yang sudah terlebih dahulu menjadi bagian dari Dompok Duafa. Dari teman itu, Narwan tahu kalau DD membuka lowongan untuk tim respon cepat.

Berbekal pengalamannya menjadi mahasiswa pecinta alam Imapala Uhamka, Narwan pun mengajukan lamaran. Rupanya ia langsung diterima dan sudah terjunkan di ratusan tempat bencana.

Selama 13 tahun menjadi relawan, Narwan semakin sering mensyukuri nikmat kesehatan dan keselamatan yang dia peroleh. Rasa syukur itu akan terus bertambah, manakala mata dan kepalanya menyaksikan banyak bencana, di lingkungannya bekerja.

“Saya menganggap kegiatan ini adalah mencari ilmu dan pengalaman. Selama ilmu dan pengalaman yang saya dapat masih kurang, saya akan terus mengabdikan, sampai saya benar-benar merasa ilmu serta pengalaman saya cukup,” ungkap Narwan mengakhiri dialognya dengan *Majelis MPR RI*. □

MBO

Konferensi Internasional AAFIIC 2023

Syarief Hasan: Filsafat Islam Jangan Hanya Sebatas Diskursus

Filsafat Islam memang sangat dibutuhkan umat Islam di Indonesia untuk menambah wawasan pengetahuan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., atau biasa disapa Syarief Hasan, menghadiri dan didaulat memberikan keynote speech dalam acara Konferensi Internasional Asosiasi Aqidah dan Filsafat Islam (AAFIIC) 2023 dengan tema: 'Filsafat Islam, Etika, dan Politik di Dunia yang Tak Pasti,' di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu

(15/3/2023).

Dalam paparannya, Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini menyambut baik terselenggaranya acara yang diinisiasi oleh Asosiasi Aqidah dan Filsafat Islam (AAFI) bekerjasama dengan MPR RI yang berlangsung selama dua hari penuh, 15-16 Maret 2023.

Konferensi Internasional AAFIIC ini, menurut Syarief Hasan, sangat menarik dan

berkualitas. Filsafat Islam memang sangat dibutuhkan umat Islam di Indonesia. "Kebutuhan ini bukan hanya sebatas diskursus atau wacana belaka, tapi lebih luas lagi sebagai proses pendidikan atau edukasi, sehingga memperkaya wawasan umat Islam di Indonesia dan dipergunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Hal ini, jelas Syarief Hasan, sesuai dengan amanah yang tertulis pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-empat yang berbunyi: '...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa'.

Filsafat, lanjut Syarief Hasan, juga diyakini memiliki kedudukan yang penting dalam dialektika keilmuan. Bahkan, filsafat seringkali dianggap sebagai ilmu dari segala ilmu atau mother of science.

Filsafat juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu ekonomi dan analisis ekonomi, serta peningkatan kualitas pakar ekonomi sehingga memiliki kemampuan berfikir, bersikap, dan perilaku.

"Maka saya berharap agar konferensi ini begitu selesai bisa menghasilkan berbagai terobosan untuk mencerdaskan umat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan," ujar mantan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua AAFIIC Kholid Al-Walid mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Konferensi Internasional AAFIIC yang pertama diselenggarakan bekerjasama dengan MPR dan dihadiri Prof. Syarief Hasan sebagai Pimpinan MPR ini merupakan goresan sejarah yang luar biasa.

"Poin luar biasanya, antara lain Filsafat Islam bisa tampil menjadi pembahasan dan diskusi yang bersifat nasional dan sangat penting, sebagai bagian dari peradaban Is-



lam yang dibangun untuk kemaslahatan. Semoga ini akan menjadi sebuah tanda kebaikan untuk umat dan bangsa ke depan yang telah dimulai oleh MPR dan Prof. Syarif Hasan,” tandasnya.

Kegiatan konferensi ini berlangsung dua hari (15-16 Maret 2023), dengan agenda diskusi dan pembahasan tentang tema utama bersama

para pakar filsafat Islam, akademisi dan tokoh Islam nasional, dan dunia, sebagai narasumber.

Mereka yang tercatat sebagai narasumber, antara lain: Rektor PTIQ dan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar; Al-Mustafa International University Iran Prof. Dr. Hossein Muttaghi; Guru Besar Filsafat Islam UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara; Pendiri Mazhab Cinta Dr. Haidar Baghir; Islamic Philosopher Algeria Dr. Abdelaziz Abbagi; Istac IIUM Malaysia Dr. Nurul Ain Norman; serta Cendekiawan dan Dosen STF Driyakara Dr. Budhy Munawar-Rachman. □

DER

Kunjungan National Defence College UEA

Mereka Tanyakan Perihal Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia

Dalam sistem kekuasaan, tidak ada satu pun penguasa di Indonesia yang bersifat absolut, termasuk presiden.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, M.M., M.B.A., beserta Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menerima kunjungan Perguruan Tinggi Pertahanan Nasional Uni Emirat Arab (National Defence College (NDC) UEA. Pertemuan berlangsung di Ruang Delegasi, lantai 2, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2023). Delegasi NDC UAE dipimpin BG Salim Saeed Humaid Binharmal Alshamsi.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi NDC UAE antara lain menanyakan perihal

pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Perkembangan gerakan reformasi yang pernah terjadi pada 1998. Serta penerapan check and balance di antara lembaga negara.

Menjawab pertanyaan tamunya itu, Sjarifuddin Hasan yang akrab disapa Syarif Hasan, antara lain mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang luas, mencapai 7,81 juta km². Dari luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Sisanya, atau sekitar 2,01 juta km² berupa daratan. Wilayah Indonesia sendiri

terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan 17.499 pulau di dalamnya.

Dalam sistem kekuasaan, tidak ada satu pun penguasa di Indonesia yang bersifat absolut, termasuk presiden. Selain itu, Konstitusi Indonesia membatasi kekuasaan Presiden selama lima tahun. Presiden juga tidak bisa sebebas-bebasnya menentukan pembantunya. Untuk menunjuk Panglima TNI, Kapolri hingga Duta Besar misalnya, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. DPR juga diberi kewenangan untuk melakukan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI, Kapolri, hingga Duta Besar

yang akan ditunjuk oleh presiden.

“Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Masa jabatan presiden selama lima tahun ditentukan melalui pemilihan umum, dan setelah itu hanya bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Selain presiden dan wakil presiden, pemilu juga dilakukan untuk memilih anggota DPR dan DPD,” ujar Syarif Hasan.

Salah satu tugas MPR, jelas Syarif Hasan, adalah mengubah dan menetapkan konstitusi. MPR juga bisa memberhentikan presiden dan wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir, menurut UUD NRI tahun

1945. Sedangkan anggota MPR sendiri terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Inilah sebagian dari gerakan reformasi yang dulu pernah menjadi tuntutan rakyat Indonesia. Reformasi juga telah mengubah sistem ketatanegaraan menjadi berbeda dibanding sebelumnya reformasi,” pungkasnya.

Sementara Fadel Muhammad menjelaskan seputar pergantian presiden selama 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka ada tujuh presiden yang pernah berkuasa, yaitu: Ir. Soekarno, Soeharto, BJ. Habibie, KH. Abdurrahman

Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Joko Widodo.

“Bung Karno adalah presiden yang berhasil meletakkan dasar dan tujuan kita bernegara. Dia juga mampu meletakkan sistem pemerintahan yang paling cocok dengan bangsa Indonesia. Sedangkan Soeharto adalah presiden yang sangat kuat. Ia berhasil mengatur ormas dan organisasi politik sehingga semua tunduk dan patuh. Sementara SBY merupakan presiden pertama yang langsung dipilih oleh rakyat, melalui pemilu *one man one vote*,” ujar Fadel. □

MBO



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Platform Digital

Pemanfaatannya dalam Merdeka Belajar Butuh Kolaborasi Semua Pihak

Sejumlah platform digital diharapkan mampu mendorong proses implementasi Merdeka Belajar lebih cepat dan efisien. Perluasan dan peningkatan kemampuan guru dalam pemanfaatan platform digital itu harus segera dilakukan.

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Ahad (19/3) menyatakan, tahapan pengaplikasian program Merdeka Belajar yang dicanangkan Pemerintah merupakan salah satu langkah penting bagi pelaksanaan sistem pendidikan nasional dalam upaya peningkatan proses belajar mengajar di tanah air.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengangkat 202 guru terpilih, Sabtu (18/3), sebagai Duta Teknologi dan Kapten Belajar. id, yang bertujuan untuk menginspirasi pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan Merdeka Belajar melalui berbagai pemanfaatan platform teknologi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, pada semester ganjil Tahun Ajaran

(TA) 2022/2023 terdapat 3,3 juta guru di seluruh Indonesia.

Menurut Lestari, dengan jutaan jumlah guru yang merupakan sasaran penanaman pola belajar baru dengan memanfaatkan platform teknologi membutuhkan lebih banyak lagi duta-duta teknologi untuk menginspirasi.

Karena itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, agar upaya penyebaran dan peningkatan pemanfaatan platform teknologi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di 34



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

provinsi dapat berlangsung dengan baik dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap, upaya

untuk mengakselerasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka dipersiapkan dengan cermat dan baik, sehingga perluasan pemanfaatan platform digital dapat dilakukan di tanah air.

Hingga saat ini, ungkap Anggota Majelis

Tinggi Partai NasDem itu, Kemendikbudristek antara lain telah memperkenalkan platform Rumah Belajar, yaitu platform konten pembelajaran bagi siswa SD, SMP, dan SMA.

Selain itu, tambah dia, juga ada platform Merdeka Mengajar (PMM), yaitu platform edukasi untuk menjadi teman penggerak guru dalam mengajar, belajar dan berkarya, dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

Berikutnya, ujar Rerie, juga ada platform Rapor Pendidikan (PRP), yaitu platform berbasis data yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.

Pemanfaatan sejumlah platform tersebut, menurut Rerie, membutuhkan pemahaman dan keterampilan yang baik dari para peserta didik dan pengajar, sehingga dibutuhkan upaya sistematis dan terukur guna mengakselerasi perluasan kemampuan para peserta didik dan pendidik di tanah air. □

Peresmian Ruang Kelas MI Al-Khairiyah Bendung Malang

Yandri Susanto: Pendidikan Menentukan Maju Mundurnya Sebuah Bangsa

Banyak pondok pesantren dan madrasah, yang kyai dan santrinya berkontribusi melawan penjajah. Kini setelah Merdeka, sudah sewajarnya, jika negara turut membantu popes dan madrasah untuk memajukan keduanya.

DI HADAPAN keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Bendung Malang, Desa Carenang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Wakil Ketua MPR RI H. Yandri Susanto S.Pt., Rabu (8/3/2023), menegaskan, pendidikan adalah sesuatu yang penting. Karena keberhasilan pendidikan bisa menentukan maju mundurnya suatu bangsa.

Karena itu, Yandri Susanto mengapresiasi seluruh pihak yang sudah berkontribusi mengembangkan dunia pendidikan, baik secara pribadi maupun lembaga. Karena dunia pendidikan merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Bahkan para pelakunya selalu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menjalankan tugasnya dengan ikhlas, tidak beralih untuk kepentingan pribadi.

“Saya sangat mengapresiasi dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan mampu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

melahirkan anak-anak yang sangat pandai. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, juga beriman serta bertakwa,” kata Yandri Susanto saat meresmikan bangunan dua ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Bendung Malang tersebut.

Acara yang di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Bendung Malang, Desa Carenang, itu turut hadir, antara lain: Kepala Seksi Penmas Kemenag Provinsi Banten, Ahmad Suahimi, S.Pd., M. Pd.; Kepala Seksi Pendidikan Agama Kemenag Kabupaten Serang Ahmad Suaimi; Ketua PB

Alkhairiyah, KH. Ali Mujahidin; Ketua DMI Provinsi Banten, Rasna Dahlan; Ketua Yayasan Bani Hamdal Bendung Malang, H. Samsuri Dahlan, S.Sos., M.M.; Kepala MI Al-Khairiyah, Khulaifatul Bharoh; dan tokoh masyarakat serta wali murid.

Selama berlangsungnya acara peresmian, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto bertubi-tubi mendapat ucapan terima kasih dari semua para penyampai sambutan. Mereka menyanjung Wakil Ketua Umum PAN itu karena kepedulian dan keteguhan hatinya membantu lembaga pendidikan Islam,

khususnya Al-Khairiyah. Yandri juga disebut sebagai anggota legislatif pertama yang pernah mengunjungi MI Al-Khairiyah, karena sejak berdiri pada Mei 1945 belum pernah ada seorang anggota DPR pun yang datang, termasuk DPR Kabupaten dan Provinsi.

Sebuah negara, lanjut Yandri, akan maju dengan pesat jika program pendidikannya mendapat perhatian serius. Karena itu, Yandri tegas menolak jika keberadaan Madrasah dianaktirikan. Karena, seperti pesantren, madrasah turut meneteskan darah untuk mempertahankan kemerdekaan.

“Madrasah dan pesantren itu sudah meneteskan darah, saat perang kemerdekaan, demikian pula Alkhairiyah. Karena itu, kini saatnya negara memberi balasan pada Al-Khairiyah. Bukan malah mengerdikannya dari sistem pendidikan nasional,” ujar Yandri.

Pada kesempatan itu, Yandri juga mengapresiasi keberhasilan MI Al-Khairiyah yang mampu membangun dua ruang dari bantuan pemerintah. Padahal, bantuan yang diterima, semestinya hanya cukup untuk membangun satu ruangan saja, tetapi dengan semangat dan perjuangan tak kenal lelah, kini kedua ruangan itu sudah siap dimanfaatkan. □



Sarasehan Pimpinan Pondok Alumni Gontor Se-Indonesia

HNW Ajak Alumni Gontor Berkontribusi Membela Umat, Bangsa, dan Negara

Alumni Pondok Gontor, tidak harus melulu mengurus agama. Tetapi bisa turut berkontribusi membangun bangsa, seperti juga para alumni terdahulu.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN ratusan Pimpinan Pondok Pesantren Alumni Gontor, Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., atau HNW mengajak para Pimpinan Pesantren dan Santrinya untuk melanjutkan peran menyejarah pesantren dengan terus aktif peduli dan lebih berkontribusi membela dan memperjuangkan kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Hal yang dulu sudah dilakukan oleh ulama, kiai dan santri. Termasuk pendiri, pimpinan, dan pengurus serta para santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor.

HNW mengingatkan bahwa salah satu spirit yang melatarbelakangi berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor adalah keinginan berkontribusi menghadirkan solusi. Karena, saat itu, sulit mencari utusan yang menguasai bahasa Arab dan Inggris untuk menghadiri kongres di Mekah setelah runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Kesaksian itu disampaikan KH. A.Sahal pada saat menghadiri Kongres Umat Islam di Surabaya. Dan, KH. A.Sahal adalah salah satu dari tiga serangkai pendiri

Pondok Modern Darussalam Gontor.

“Sejak awal trimurti (pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor) terobsesi dan menghendaki berdirinya pondok pesantren modern yang berkeunggulan, bukan pondok yang biasa-biasa saja. Tetapi, pondok dan para santrinya yang hebat, memiliki berbagai keunggulan, bukan hanya bisa berkomunikasi dengan tingkat lokal, tetapi juga bisa bermanfaat di tingkat global,” kata HNW.

HNW menyampaikan hal itu pada acara Sarasehan Pimpinan Pondok Alumni Gontor Se-Indonesia bersama Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Acara tersebut berlangsung di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ahad (5/3/2023). Turut hadir pada acara tersebut, Pimpinan Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pimpinan Forum Pesantren Alumni Gontor.

Pada zaman perjuangan kemerdekaan RI, pengasuh dan pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, menurut Hidayat, tidak hanya berdiam diri di Pondok. Selama era perjuangan fisik dan sesudahnya, santri dan kiai Pesantren Gontor terlibat aktif membersamai perjuangan bangsa,

mempertahankan Indonesia Merdeka. Sebagaimana ditunjukkan oleh KH. R. Imam Zarkasyi, salah satu trimurti pendiri Pondok Gontor, yang saat itu turut aktif mempersiapkan dan menggembelng laskar Hizbullah di Bogor. Juga, KH. Idham Kholid, alumni Gontor generasi pertama yang pernah menjadi Wakil Perdana Menteri, ketua Partai dan Ketua MPR/DPR.

“Ketika terjadi pemberontakan PKI, baik pada tahun 1948 maupun 1965, pesantren Gontor menjadi target dan korban. Maka, para kiai dan santri ikut melakukan perlawanan, bekerjasama dengan TNI dan lainnya menggagalkan makar PKI, menyelamatkan ideologi umat, bangsa, dan negara,” ungkap alumni Gontor yang pernah menjabat Ketua MPR RI periode 2004-2009.

Pilihan sikap yang diambil Pesantren Gontor itu, menurut HNW, sesuai dengan teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafa Rasyidin, seperti Umar bin Khatthab RA, sikap yang sangat relevan dan diperlukan oleh umat, bangsa dan negara.

Jelang satu abad pesantren Gontor pada 20 september 2026, kata HNW, patut ditegaskan bahwa posisi pesantren Gontor memang tidak berpolitik praktis. Tetapi, para alumninya tetap penting meneruskan cita-cita para pendiri pondok, terus membersamai membela kepentingan umat, bangsa dan negara. Alumni Gontor bisa ada di mana-mana, termasuk ormas dan parpol, mencintai umat, bangsa dan negaranya, dengan hadirkan santri-santri unggulan yang bisa melakukan peran “mundzirul qaum” (pemberi pencerahan bagi warganya) dalam makna yang seluas-luasnya, dengan etika tinggi yang diajarkan di pesantren.

“Alumni Pesantren Gontor dan Pondok-pondok Pesantren yang didirikan alumni penting benar menghayati sejarah pondok dan sekaligus hymne Pondok Gontor, yang luar biasa mengajarkan dan menginternalisasi

cinta pesantren dan cinta bangsa dan negara, yang bahkan sama disebut sebagai Ibu, sebagaimana Ibu kandung. Itu harus menjadi bagian dari tradisi dan spirit besar untuk melanjutkan berkontribusi mewujudkan cinta kepada umat, bangsa, dan negara sebagaimana cinta para santri kepada Ibu kandung mereka masing-masing, untuk menjaga dan menyelamatkan Indonesia dengan cita-cita Proklamasi maupun reformasinya. Begitulah seharusnya dunia Pesantren Gontor memaknai seratus tahun Gontor untuk menyongsong peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia emas pada tahun 2045,” pungkasnya. □

MBO



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Diskusi Penyakit Langka dan Teknologi Terpadu

Lestari Moerdijat: Deteksi Dini Harus Ditingkatkan

Dukungan realisasi deteksi dini harus terus didorong agar tindakan pencegahan dan pengobatan penyakit langka di tanah air dapat terus ditingkatkan.

PENYAKIT langka kerap mengancam jiwa. Melalui upaya preventif dan dukungan tindakan pengobatan yang konsisten, paparan penyakit langka di masyarakat diharapkan dapat ditekan lebih rendah,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring dengan tema: ‘Penyakit Langka dan Teknologi Terpadu’ yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/3).

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes., (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI), Prof. Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, Sp.A(K) (Kepala Pusat Penyakit Langka RSUPN Cipto Mangunkusumo—Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), Dr. Rachmita Maun Harahap, S.T., M.Sn., (Komisioner Komnas Disabilitas) dan Peni Utami, S.E., M.M., (Ketua Yayasan MPS dan Penyakit Langka Indonesia) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Premana W. Premadi, Ph.D., (Ketua dan Pendiri Yayasan ALS Indonesia) dan Drs. Gufroni Sakaril, M.M.,

(Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, optimalisasi dalam pencegahan dan pengobatan penyakit langka harus didorong lewat kolaborasi sejumlah pihak dan strategi yang tepat, agar Indonesia mampu menangani penyakit langka dan mengembangkan pengobatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup penderitanya.

Jumlah penduduk Indonesia yang terpapar penyakit langka berdasarkan catatan Kemenkes, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, harus menjadi acuan untuk segera berbenah dalam mengatasi berbagai kendala.

Saat ini, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, kendala yang dihadapi dalam penanganan penyakit langka di tanah air, antara lain belum sepenuhnya deteksi dini dilakukan dan tahapan pengobatannya masih mahal.

Selain itu, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, proses diagnosa penyakit langka masih membutuhkan waktu lama, serta penanganan penyakit melibatkan ahli dari sejumlah disiplin ilmu.

Menurut Rerie, para pemangku kepentingan perlu memastikan tata kelola

penanganan penyakit langka di Indonesia berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, jelas dia, perlindungan dan dukungan jaminan sosial kepada penyintas penyakit langka penting untuk dilakukan.

“Kolaborasi pemerintah, lembaga swasta penyedia layanan kesehatan, peneliti, dan kelompok advokasi pasien perlu diperkuat dalam penanganan penyakit langka di tanah air,” tegasnya.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, Eva Susanti mengungkapkan, 50% penyandang penyakit langka adalah anak-anak, namun hanya 5% ketersediaan obat-obatan untuk penyakit langka itu.

Menurut Eva, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut, tetapi untuk mengatasi penyakit langka saat ini memerlukan penguatan surveilans, deteksi dini dan tata laksana yang tepat dari setiap kasus.

Namun, jelas Eva, kurangnya tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan deteksi dini penyakit langka, alat diagnosa dan pengobatan serta terapi yang mahal masih menjadi tantangan di Indonesia.

Dengan kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam upaya mendeteksi jenis penyakit langka ini, menurut Eva, kolaborasi multi sektor harus segera direalisasikan dalam upaya membangun sistem pengobatan penyakit langka di tanah air.

Kepala Pusat Penyakit Langka RSUPN Cipto Mangunkusumo, Damayanti Rusli Sjarif, berpendapat, pengobatan penyakit langka adalah never ending process.

Menurut Damayanti, penyakit langka di setiap negara berbeda-beda, tergantung ketersediaan alat diagnosa yang dimiliki negara tersebut.

Batasan penyakit disebut langka di Indonesia, ujar Damayanti, ketika jumlah pasien penyakit tersebut kurang dari 2.000 pasien.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Diperkirakan saat ini 10% populasi dunia menderita penyakit langka.

Dalam penanganan penyakit langka, tegas dia, tahapan diagnosa sangat penting. Karena keterbatasan dalam skrining, obat dan proses terapi, penanganan penyakit langka di Indonesia banyak menghadapi tantangan.

Tantangan semakin kompleks, tambahnya, karena sejumlah institusi belum cukup mendukung dalam proses pengadaan obat dan tata laksana terapi yang dibutuhkan penderita.

Damayanti mendorong agar para wakil rakyat di parlemen bersama Pemerintah untuk membuat undang-undang agar

penanganan penyakit langka sepenuhnya dijamin oleh negara, mengingat proses yang panjang dan biaya yang tidak terjangkau oleh masyarakat.

Komisioner Komnas Disabilitas, Rachmita Maun Harahap, berpendapat, penyakit langka memiliki kaitan erat dengan kondisi disabilitas, baik disabilitas fisik maupun intelektual.

Rachmita mendorong pemerintah pusat membuat komitmen kerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra swasta untuk meningkatkan akses yang tepat waktu dan adil terhadap pembiayaan BPJS, obat-obatan, serta proses diagnosis bagi penderita penyakit langka. Rachmita juga mengusulkan pembentukan pusat penyakit langka untuk

penanganan dalam bentuk diagnosa dan pengobatan pasien penyakit langka yang lebih terpadu.

Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan MPS dan Penyakit Langka Indonesia, Peni Utami, mengungkapkan, sejumlah peran yang dilakukan yayasan yang dipimpinnya dalam membantu penanganan penyakit langka di Indonesia. Antara lain, ungkap Peni, pada 2016 Yayasan MPS dan Penyakit Langka Indonesia ikut mengatasi kendala pajak impor obat-obatan dan bahan pangan untuk penderita penyakit langka di Indonesia.

Yayasan yang dipimpinnya, tambah dia, juga berupaya membantu pembiayaan pengobatan penyakit langka dengan

menggalang dana masyarakat untuk membiayai proses diagnostik yang mahal.

Ketua dan Pendiri Yayasan ALS Indonesia, Premana W. Premadi, berpendapat, saat ini sudah terlihat upaya secara institusional dalam upaya penyembuhan hingga perbaikan kualitas hidup penderita penyakit langka di Indonesia. Upaya itu, jelas Premana, antara lain terlihat dalam bentuk penguatan deteksi dini melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

Selain itu, tambahnya, perlu dukungan sejumlah kebijakan lewat pembuatan sejumlah aturan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk penanganan penyakit langka.

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Gufroni Sakaril, berpendapat, penderita penyakit langka berpotensi mengalami disabilitas. Sehingga kunci dalam penanganan penyakit langka, tegas Gufroni, adalah diagnosa sejak dini harus dilakukan, tetapi terkendala biaya tinggi.

Sehingga, tegas Gufroni, bila penyakit langka sudah memberatkan masyarakat, negara harus hadir. Untuk itu perlu ada mekanisme agar penyakit langka memiliki pola pendanaan untuk membiayai deteksi dan pengobatan agar terjangkau.

Karena penderita penyakit langka, ujar Gufroni, juga ada yang bisa disembuhkan dan penyintasnya bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. "Jadi ada potensi anak bangsa yang harus diselamatkan," ujarnya.

Di akhir diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat memuji peran Prof. Damayanti atas perannya dalam meningkatkan penanganan penyakit langka di tanah air.

Saur juga mendukung dorongan agar Pemerintah Indonesia belajar penanganan penyakit langka ke Vietnam, yang memberikan bebas biaya selama 5 tahun dalam penanganan anak dengan penyakit langka.

Pada kesempatan itu, Saur juga mengusulkan, dana abadi bea siswa LPDP di Kementerian Keuangan senilai Rp145 Triliun sebagian dimanfaatkan untuk membiaya tenaga kesehatan dan dokter belajar penanganan penyakit langka, dalam rangka peningkatan tenaga diagnosa penyakit langka di tanah air. □

Kunjungan Delegasi MGMP PPKn Kabupaten Lebak

Indro Gutomo: Istilah **Empat Pilar** MPR RI Sesuai Keputusan MK



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PERUBAHAN istilah dari Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara menjadi Empat Pilar MPR RI masih menarik perhatian masyarakat. Terbukti, perubahan istilah tersebut menjadi salah satu pertanyaan yang disampaikan anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Selasa siang (14/3/2023) MPR menerima delegasi MGMP PPKn Kabupaten Lebak dipimpin Jajang Nurjaman, SH., M.Pd. Delegasi ini diterima Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Humas dan Sistem Informatika, Sekretariat Jendral MPR RI, Indro Gutomo, SH., MH., didampingi Kasubag Pemberitaan dan Layanan Informasi, Euis Karmila, S.Ip., di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pada sesi tanya jawab yang dimoderatori Euis Karmila, S.Ip., ada seorang guru PPKn menanyakan alasan penggantian nama Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara menjadi Empat Pilar MPR RI. Dia juga menanyakan, mengapa dalam Empat Pilar MPR itu posisi Pancasila disejajarkan dengan pilar yang lain. Padahal sebagai dasar dan ideologi, juga sumber dari segala sumber hukum, kedudukan Pancasila lebih tinggi dari pilar lainnya.

Menjawab pertanyaan itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan

Hubungan Antar Lembaga, Biro Humas dan Sistem Informatika, Sekretariat Jendral MPR RI, Indro Gutomo, SH., MH., menjelaskan, perubahan tersebut adalah perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan yang dikeluarkan pada April 2014, MK melarang MPR menggunakan frasa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Karena itu, MPR mengubah istilah Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara menjadi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

“Dengan Istilah Empat Pilar MPR RI itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan, berniat menyosialisasikan empat nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia, yakni: Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Melalui istilah ini, MPR juga tidak bermaksud membandingkan atau malah mensejajarkan Pancasila dengan pilar-pilar lainnya,” jelas Indro Gutomo.

Pada kesempatan itu, Indro Gutomo juga menjelaskan bahwa pasca reformasi, MPR kehilangan sebagian besar tugas dan fungsinya. Akibatnya, MPR yang dulu merupakan lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang sejajar dan sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Beberapa tugas dan fungsi MPR yang dicabut, antara lain tidak lagi punya kewenangan memilih dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, serta membuat GBHN. Saat MPR masih menetapkan GBHN, MPR dapat meminta pertanggungjawaban Presiden dan Wakil presiden.

“Sejak itu praktis MPR tidak memiliki tugas dan fungsi yang strategis. Baru setelah

adanya UU MD3, MPR memiliki tugas melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR serta mengkaji sistem ketatanegaraan Indonesia, dan itu berlaku hingga sekarang,” pungkas Indro Gutomo.

Pertemuan MGMP PPKn Kabupaten Lebak dengan Humas MPR berlangsung kondusif.

Kedua belah pihak berinteraksi dengan baik. Kegiatan yang menjadi bagian dari kunjungan MGMP PPKn ke kompleks Parlemen itu juga sudah dilakukan pihak-pihak lain, mulai dari Lembaga Pendidikan, komunitas pengajian, para guru hingga profesi yang lain. Selain berdiskusi dengan Humas MPR, peserta kunjungan bisa menyaksikan Museum DPR dan perpustakaan MPR.

Hingga kini, kompleks Parlemen Senayan Jakarta selalu menarik bagi anggota masyarakat, terlebih yang pertama kali datang dan melihat langsung kawasan tersebut. Itu bisa dilihat dari aksi mereka mengabadikan keberadaannya di gedung wakil rakyat. Berbagai spot foto menarik, tak luput dari aksi selfi, baik sendiri maupun bersama-sama. Itu pulalah yang dilakukan pengurus serta anggota MGMP PPKn Kabupaten Lebak ketika berada di kompleks Parlemen. □

Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Gorontalo

Fadel Muhammad: Jangan Berkhayal Kesuksesan Bisa Diraih Secara Instan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MERAIH kesuksesan dalam hidup adalah impian setiap orang, terutama untuk generasi milenials. Namun, untuk meraihnya perlu perjuangan dan konsistensi diri.

Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa kunci meraih kesuksesan di usia muda adalah memunculkan, menjaga, dan meningkatkan kapabilitas diri, lalu sinergikan dengan perjuangan atau upaya keras dan konsisten untuk mendapatkannya.

“Kesuksesan adalah sebuah perjalanan bukan tujuan akhir. Ini membutuhkan proses. Jadi, jangan berharap dan berkhayal

kesuksesan bisa diraih secara instan,” ujar Fadel Muhammad, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya Gorontalo (AMPKPR-G), Rabu (8/3/2023).

Hadir dalam acara yang berlangsung di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo itu, antara lain Pimpinan DPRD Bone Bolango Amran Mustapa, Staf Khusus MPR Hasan Shahab, Kepala Desa Kramat Mohamad Yamin Podungge, Pimpinan dan anggota AMPKPR-G serta generasi muda sekitar sebagai peserta.

Lebih lanjut, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini, mengungkapkan, kesuksesan yang instan itu memang ada, tapi karena pondasi yang tidak kuat maka akan berpotensi merusak dirinya sendiri atau merugikan orang lain.

“Ingat, jangan andalkan yang instan itu. Fokus saja ke tujuan. Sebab, ketika kemampuan diri kita ada, kesempatan besar akan datang. Tapi, jika kemampuan tidak ada, tidak akan ada kesempatan,” papar Fadel Muhammad.

Maka dari itu, ujar Fadel, kalian para milenials mulailah meningkatkan kapabilitas kalian. “Rajin belajar adalah langkah awal dalam upaya peningkatan kapabilitas itu,” jelasnya.

Peningkatan kapabilitas diri, lanjut Fadel Muhammad, bukan hanya dari sisi penguasaan IPTEK, tapi juga karakter dan jati diri sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Dua hal ini harus ada dan menyatu serta saling melengkapi

“Untuk itu, mulai sekarang kalian harus mengenal dan implementasikan nilai- nilai luhur bangsa yang menjadi bagian dari Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Banyak cara belajar untuk mendapatkan wawasan seputar Empat Pilar. Salah satunya, dengan mengikuti dan menjadi peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR,” tandasnya. □



Peluncuran Buku PPHN Tanpa Amandemen

Bamsoet: Pengawasan Pelaksanaan PPHN Bisa Dilakukan DPR RI Melalui RUU APBN



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Bambang Soesatyo menuturkan pengawasan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat dilakukan sesuai sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI Tahun 1945. Mekanismenya dapat dilakukan oleh DPR RI berupa pengembalian RUU APBN untuk diperbaiki oleh pemerintah manakala tidak sesuai dengan PPHN.

Misalnya, presiden yang menggantikan Presiden Joko Widodo dalam RUU APBN mendatang tidak memasukan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, maka DPR RI bisa mengembalikan RUU APBN tersebut. Karena tidak sesuai dengan PPHN yang didalamnya turut mengatur tentang pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur.

“Kehadiran PPHN dapat membuat

pembangunan nasional kembali menemukan roh dan jati dirinya sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan konstitusi. Di tahun 1947 Presiden Soekarno dan pendiri bangsa sudah mampu menggambarkan pentingnya pemanfaatan nikel di Sulawesi, Emas di Papua, Gas Alam dan Timah di Sumatera, serta Batubara di Kalimantan. Seharusnya saat ini kita juga harus mampu membuat perencanaan jangka panjang dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia untuk memakmurkan Indonesia,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Peluncuran Buku PPHN Tanpa Amandemen, di Universitas Terbuka Convention Center, Tangerang Selatan, Selasa (21/3/23).

Turut hadir antara lain, Anggota DPR RI Darul Siska, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Ulla Nuchrawaty, Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darajat, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2013-2015 Prof. Dr. Hamdan Zoelva, Ketua Dewan Pakar Brain Society Center Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Andi Irmanputra Sidin, serta Kepala Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana. Hadir pula secara virtual para mahasiswa Universitas Terbuka dari berbagai wilayah Indonesia serta dari 45 negara dunia.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, keberadaan PPHN dapat menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Karena mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun terjadi peralihan kekuasaan lembaga eksekutif, yaitu Presiden, termasuk juga lembaga legislatif yaitu MPR, DPR dan DPD, bahkan hingga di tingkat pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa.

“Tidak seperti saat ini, karena ketiadaan peta jalan pembangunan, setiap presiden, gubernur, hingga walikota/bupati terpilih memiliki paradigma pembangunannya masing-masing. Jangankan beda partai,



antara pemimpin satu partai saja terkadang bisa saling berseberangan. Masing-masing memiliki ego sektoral, sehingga pembangunan yang dilakukan antarperiode pemerintahan terkesan tidak selaras dan tidak berkesinambungan,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan seperti Srilangka dan Ghana. Tidak boleh juga seperti tiga negara lainnya yang saat ini terancam sebagai negara gagal, yaitu Pakistan, Mesir, dan Bangladesh. Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai Kahar Fiscal.

“Karena itu, Indonesia perlu menghadirkan PPHN sebagai produk hukum yang dapat menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara dengan menggunakan kekuasaan subjektif superlatif yang pernah



dimiliki MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Kewenangan subjektif superlatif itu juga penting untuk dapat mengatasi jika terjadi kondisi force majeure/kedaruratan, kondisi Kahar Fiscal dalam skala besar, hingga memutuskan jalan keluar atas suatu

kebuntuan politik di bidang keuangan antarlembaga negara. Misalnya, siapa yang berhak memutuskan suatu perencanaan jangka panjang yang telah diputuskan tidak dapat diteruskan atau diubah,” pungkas Bamsuet. □

Peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa

Pecahkan Rekor MURI, Penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Peserta Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa Terbanyak

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama tiga organisasi penggerak pemerintahan desa, yaitu: Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), di Gelora Bung Karno Jakarta, Ahad (19/3/23).

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diadakan dalam rangka Peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa ini diikuti oleh ribuan anggota APDESI, PPDI dan ABPEDNAS. Inilah Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan peserta Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa terbanyak. Dan, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini, tercatat memecahkan rekor Museum



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rekor Indonesia (MURI).

Pemberian rekor MURI ini melengkapi 4 Rekor MURI sebelumnya yang diterima Bamsuet. Pertama, Rekor MURI

Penyelenggaraan Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI dengan peserta Master Terbanyak di Dunia 2019. Kedua, Rekor MURI Penyelenggaraan Turnamen Catur dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan pecatur terbanyak 2020. Ketiga, Rekor MURI Katagori Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Komunitas Motor Terbanyak 2020. Dan, keempat, Rekor MURI Penyelenggaraan Kejuaraan Tembak Reaksi Level III Sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Peserta Terbanyak 2020.

Turut hadir, antara lain Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Boy Rafli Amar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APDESI Surta Wijaya, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PPD I Widhi Hartono, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS Indra Utama.

Di hadapan ribuan peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini, Bamsoet menegaskan, membangun Indonesia tanpa membangun desa adalah omong kosong. Karenanya, komitmen kolektif dari puluhan ribu desa untuk bersatu, bekerjasama bahu-membahu, adalah modal penting dan fundamental dalam

membangun Indonesia. “Sangatlah tepat jika semangat desa bersatu membangun Indonesia bisa diwujudkan bersama,” ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, desa adalah unit pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan kehidupan rakyat. Sehingga menjadi ujung tombak pembangunan, di mana aspirasi rakyat digali, dihimpun, dikelola, dan disalurkan.

“Desa merupakan dinamisator dan akselerator pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sekaligus menjadi parameter dan indikator kekuatan perekonomian nasional yang memberikan daya tahan dan daya tangkal, ketika kita dihadapkan pada berbagai ancaman krisis perekonomian,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,

Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, desa juga berperan sebagai stabilisator iklim politik. Di mana isu-isu yang cenderung menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara dapat direduksi dan diminimalisir oleh kesahajaan kehidupan sosial masyarakat desa.

“Desa merupakan sumber nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk jati diri dan kepribadian bangsa. Dimana masih dapat dirasakan kehidupan masyarakat yang penuh dengan gotong royong, tepa selira, jiwa solidaritas, dan semangat kebersamaan. Desa juga pilar utama kedaulatan pangan, di mana berbagai produk pertanian dihasilkan dan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan bangsa, dari generasi ke generasi,” urai Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini mengapresiasi atas beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan desa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Data Kementerian Keuangan mencatat, jumlah desa dalam kategori ‘sangat tertinggal’ mengalami penurunan sangat signifikan. Dari 14.047 desa ‘sangat tertinggal’ pada tahun 2018, menjadi 4.365 desa pada tahun 2022. Sedangkan desa dengan kategori ‘tertinggal’ sebanyak 33.339 desa pada tahun 2018, turun menjadi 9.221 desa pada tahun 2022.

Catatan menggembirakan lainnya adalah dalam ranah kehidupan sosial politik, semakin banyak program desa yang diselenggarakan dalam kerangka membangun wawasan kebangsaan. Misalnya, pencaanaan program ‘Desa Pancasila’ atau ‘Desa Konstitusi’ yang diselenggarakan untuk membunikan nilai-nilai Pancasila, dan membangun masyarakat sadar Konstitusi di tingkat desa.

“Sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tanpa beliau barang kali perhatian negara pemerintah ke desa amatlah minim. Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah akan lebih besar lagi kepada desa-desa. Termasuk menyetujui usulan agar anggaran dana desa dinaikan menjadi 10 persen dari APBN,” pungkas Bamsoet. □



Sarasehan Kehumasan MPR Lampung

Pentingnya Keterwakilan Daerah dalam Lembaga Perwakilan Indonesia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DR. H. Bustami Zainudin, S.Pd., MH., anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI, menyatakan, para mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan menjadi pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, kata Bustami Zainudin, mahasiswa sebagai generasi muda harus menjadi orang hebat di masa depan. Karena, “di tangan adik-adik semualah negara ini bergantung,” papar Bustami, selaku narasumber Sarasehan Kehumasan MPR RI di Universitas Sang Bumi Ruwa Jarai, Bandar Lampung, Rabu (08/03/2023).

Sarasehan Kehumasan MPR RI di Universitas Sang Bumi Ruwa Jarai ini, selain diikuti oleh anggota DPD RI Dr. H. Bustami Zainudin, juga dihadiri, antara lain: Ketua Yayasan Saburai, Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, MS., Dr. Idham S. Ag., SH., MH.; Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM.; Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR, Indro Gutomo, SH., MH.; dan sekitar 100 mahasiswa sebagai peserta.

Lebih lanjut, Bustami mengingatkan bahwa para mahasiswa juga harus menyadari bahwa dia berhadapan dengan era globalisasi. Berada di kondisi demikian, mahasiswa harus betul-betul dapat menyadari bahwa generasi mudalah yang sangat intens berhadapan dengan setiap aktivitas bersamaan dengan kemajuan

teknologi yang ada saat ini.

Dalam kesempatan itu, sebagai perwakilan daerah, Bustami menjelaskan tentang arti penting dari perwakilan daerah. Prinsip utama adanya sebuah negara paling tidak memenuhi tiga unsur: Pertama, adanya rakyat; kedua, adanya wilayah; dan, ketiga, adanya pemerintahan. Menurut Bustami,



Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd., MH.



Dr, Idham S.Ag, SH.,MH.

adanya rakyat direpresentasikan oleh DPR RI melalui partai politik.

Sedangkan wilayah direpresentasikan melalui DPD RI. “Di sinilah pentingnya keterwakilan daerah dalam lembaga perwakilan Indonesia,” ungkap Bustami. Melalui DPD RI, lanjut Bustami, kita harus senantiasa memupuk semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka menjadi NKRI. Salah satu cara memupuk semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah melalui sarasehan ini.

Narasumber lain dalam sarasehan bertema: “Nasionalisme Kebangsaan Pemuda Indonesia Era Globalisasi” di Universitas Sang Bumi Ruwa Jarai ini adalah anggota DPD RI, Dr. Idham, S.Ag., SH., MH. Tampil sebagai pembahas, Dr. Idham memaparkan hal penting menyangkut tema sarasehan tersebut. Nasionalisme, menurut Idham, adalah paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan kepada



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

negara dan bangsa.

Kedua, nilai kebangsaan di mana seseorang harus memiliki loyalitas. Artinya, kata Idham, adalah nurut, manut, patuh, tidak menentang, kemudian tidak ikut-ikutan dalam kegiatan yang kira-kira akan membuat perpecahan di kalangan anak bangsa.

Selanjutnya, Idham berharap, MPR melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kebangsaan, termasuk juga Empat Pilar MPR RI, tetap akan berlanjut, sebagai salah satu metode untuk memberikan atau pengetahuan kepada para mahasiswa berkenaan pemahaman yang berkaitan dengan kebangsaan.

Sambutan Plt. Deputy Administrasi Setjen MPR RI

Kegiatan sarasehan ini diawali kata sambutan dari Plt. Deputy Administrasi Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM. Bu Titi, sapaan

Siti Fauziah, menjelaskan tentang penyelenggaraan kegiatan Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan, dengan tema: Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pentingnya Keterwakilan Daerah Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia.

Makna dari penggunaan diksi “Menyapa Sahabat Kebangsaan,” menurut Bu Titi, adalah MPR mengajak adik – adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini untuk menjadi sahabat dari MPR. Kenapa kita memakai kata kata sahabat? Menurut Siti Fauziah, sahabat itu artinya kita ingin berbagi cerita, kesusahan, dan kegembiraan. “Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, adik – adik di sini bisa berbagi ke MPR,” ungkap Siti Fauziah.

Mengenai jarak yang jauh antara MPR di Jakarta, sementara adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu ada di Lampung bukan halangan untuk dapat berbagi. Menurut Siti Fauziah, MPR mempunyai beberapa alat komunikasi, seperti instagram, dan juga buku digital yang bisa diakses dengan cara mendownload di *app store*.

“Jadi, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu ke Jakarta,” katanya. Khusus buku digital MPR, jelas Siti Fauziah, bisa dimanfaatkan untuk melihat hasil kerja dari MPR, yang di dalamnya terdapat proseding, makalah, resume, majalah MPR, dan lain – lain.

Selain itu, Siti Fauziah juga menyampaikan, apabila para mahasiswa dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jarai ingin berkunjung ke MPR RI, dipersilahkan berkirim surat ke Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI. □



Siti Fauziah, SE., MM.

Delegasi Al Jauharotunnaqiyah Kota Cilegon

Yandri Susanto: Generasi Penerus Bangsa Harus Paham Empat Pilar MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SENIN (20 Maret 2023), Gedung Nusantara V di Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, terlihat ramai. Hari itu, sekitar 400 siswa dari Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Perguruan Islam Al Jauharotunnaqiyah, Cibeber, Kota Cilegon, Banten, mengisi kursi-kursi yang ada.

Kehadiran delegasi yang dipimpin oleh H. Irsyad Hambali M.H., ke kompleks Parlemen,

selain dengan tujuan *study tour*, juga untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR.

Dalam sambutannya, Irsyad Hambali menjelaskan bahwa delegasi yang dipimpinnya baru kali ini berkunjung ke kompleks Parlemen. “Selama ini, gedung ini biasa kami lihat di televisi, namun hari ini

bisa melihat dan merasakan langsung,” ungkapnya. Dia mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. “Apresiasi telah menerima kami dengan baik,” tuturnya.

Kehadiran mereka disambut langsung oleh Wakil Ketua MPR, H. Yandri Susanto S.Pt. “Selamat datang di gedung wakil rakyat. Selamat melihat langsung kompleks Parlemen,” sapa Yandri Susanto kepada para tamunya datang dari Cilegon ini. Yandri berharap, kehadiran mereka di “rumah rakyat” ini bisa menjadi kenangan terindah dalam hidup.

Selanjutnya, Yandri menjelaskan tentang MPR dan kewenangannya. MPR, kata Yandri, adalah kepanjangan dari ‘Majelis Permusyawaratan Rakyat.’ Sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Disebut tertinggi, sebab kewenangan yang dimiliki seperti mengubah dan menetapkan konstitusi atau UUD, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan GBHN. “Pada masa Orde Baru, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh anggota MPR,” ujar pria asal Bengkulu itu.

Setelah UUD Tahun 1945 diamandemen, menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. Setelah diamandemen, MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Meski demikian lembaga ini masih memiliki kewenangan tertinggi, yakni bisa menetapkan dan mengubah UUD. “Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih lewat pemilu juga masih dilantik oleh MPR,” paparnya.

Dulu, tambah Yandri, MPR juga menetapkan GBHN, dan sekarang kewenangan itu tak lagi dimiliki oleh MPR. Namun, lanjut Yandri, saat ini MPR tengah merancang PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara). “Ini yang akan menjadi roadmap pembangunan nasional,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil II Banten itu.

Tugas lain yang dimiliki oleh lembaga ini, kata Yandri, adalah melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Empat Pilar MPR sangat penting, sebab





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

nilai-nilai itu adalah pengawal kehidupan berbangsa dan bernegara. "Jadi generasi penerus bangsa harus paham hal ini," ucapnya.

Kemudian, Yandri menjelaskan mengenai

keanggotaan MPR RI. Jumlah anggota MPR sebanyak 711 orang. Jumlah anggota sebanyak itu merupakan gabungan dari jumlah anggota DPR dan DPD. Dengan

rincian, anggota DPR RI sebanyak 575 orang, dan anggota DPD ada 136 orang.

Yandri Susanto memotivasi para siswa agar tidak minder dalam kehidupan. Menurutnya, di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. "Dalam hidup ini apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin," tegasnya. Dia memberi contoh tentang dirinya. Dia menceritakan perjalanan hidupnya sebagai anak kampung hingga akhirnya bisa menjadi Wakil Ketua MPR. "Kalian yang berada di sini juga bisa menjadi anggota MPR," tegasnya.

Untuk mencapai hal tersebut, Yandri menyarankan, agar para siswa belajar tekun dan giat serta memegang 5 prinsip dalam kehidupan. Pertama, dekat pada Allah; kedua, jangan pernah melawan orangtua; ketiga, berdoa dan berusaha; keempat, harus berani tampil; dan kelima, fokus dalam setiap aktivitas. "Jangan main-main saat sekolah, sebab bila tidak fokus maka kelak akan melewati jalan yang tidak benar," tuturnya. □



Forum Komunikasi Pendidikan Qur'an (FKPQ) Provinsi Banten

Yandri Susanto: Kobarkan Gotong-royong Pengentasan Buta Aksara Alqur'an

WAKIL Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto S. Pt., menegaskan, tugas umat Islam mengentaskan buta aksara Alqur'an masih jauh dari kata berhasil. Bahkan, beban yang harus dipikul untuk mengenalkan Alqur'an kepada seluruh umat Muslim semakin berat.

Saat ini jumlah umat Islam yang buta huruf Alqur'an masih sangat besar. Berdasar data dari Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta, sebanyak 72% dari jumlah umat Islam, belum melek huruf Alqur'an. Jumlah itu lebih besar dibanding data BPS yang mengatakan bahwa pada 2018, umat Islam yang buta huruf Alqur'an mencapai 53,57%.

Karena itu, dibutuhkan langkah besar yang dilakukan secara bersama-sama atau gerakan bergotong-royong dalam mengentaskan buta aksara Alqur'an. Gerakan ini harus bisa menggerakkan seluruh kalangan agar berkontribusi dalam menyebarkan dan mengajarkan Alqur'an. Bukan semata dilakukan dan menjadi tanggung jawab ulama, ustaz, ataupun guru ngaji saja.

"Pemerintah, anggota DPR, para pengusaha dan guru ngaji bahu-membahu terlibat dalam kegiatan gotong royong mengentaskan buta aksara Alqur'an. Kita



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tidak bisa menyerahkan tanggung jawab kepada para ustaz dan guru ngaji saja, tetapi semua harus terlibat. Karena persoalan ini hanya akan selesai jika dilakukan secara bergotong-royong dari seluruh kalangan," ujar Yandri Susanto.

Peringatan itu disampaikan Yandri Susanto saat memberikan pengarahan dan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pengurus dan anggota Forum Komunikasi Pendidikan Qur'an (FKPQ) Provinsi Banten,

Selasa (8/3/2023).

Acara yang berlangsung di Nunia Tamansari Hotel, Kota Serang, Banten, itu dihadiri, antara lain: Ketua FKPQ Nasioal, Dr. H. Syaefudin Zuhri, Kabid Pakis Kanwil Kanwil Depag Provinsi Banten Dr. Icep Muhi, Ketua DMI Banten H. Rasna Dahlan, serta perwakilan Walikota Serang Subagyo.

Pemerintah, menurut Yandri, patut mendukung gerakan pemasyarakatan Alqur'an dengan mengeluarkan peraturan yang mendukung. Karena, dengan adanya aturan dimungkinkan juga adanya bantuan dana, baik dari sumber pusat maupun daerah.

"Gerakan ini juga termasuk dalam delapan asnaf penerima manfaat zakat. Karena itu, lembaga seperti BAZNAS sudah waktunya mendukung gerakan ini. Semua harus terlibat, minimal bisa dilakukan di Kota atau Kabupaten Serang sebagai percontohan," ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Para pengusaha, kata Yandri, semestinya juga bisa terlibat aktif dalam gerakan gotong-royong ini. Mereka bisa membantu pengadaan Alqur'an atau memberikan kesejahteraan para guru ngaji. Jangan sampai, anak-anak mereka ternyata tidak bisa ngaji karena tidak ada guru ngaji di sekitar rumahnya.

"Jumlah guru ngaji harus ditambah agar mereka tersedia di semua tempat. Dan, jangan menyalahkan mereka yang masih buta huruf Alqur'an, karena bisa jadi bukan karena mereka malas, tapi belum ada kesempatan," kata Yandri.

Yandri berharap, gerakan gotong-royong mengentaskan buta aksara Alqur'an ini bisa segera terlaksana, sehingga mampu mencegah ambruknya bangsa Indonesia. Apalagi, pertanda bakal ambruknya bangsa Indonesia makin nyata. Yaitu, dengan semakin bobroknnya mentalitas masyarakat. Seperti makin senang terhadap mabuk-mabukan dan narkoba, dibanding belajar mengaji atau melaksanakan salat. □

MBO



Hadiah Doorprize Media Gathering Bandung

Bamsoet Serahkan Sepeda Motor untuk Irandi Kasmara

Dalam sambutannya Bamsoet mengajak para wartawan untuk menyambut Pemilu 2024 dengan penuh suka cita.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyerahkan satu unit sepeda motor kuning Yamaha Mio kepada Irandi Kasmara, wartawan Rakyat Merdeka, hadiah doorprize Media Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang diselenggarakan di Bandung beberapa waktu lalu. Bamsoet juga mengajak para wartawan untuk menyambut Pemilu 2024 yang sudah di hadapan mata dengan penuh suka cita. Mengingat Pers punya peran penting sebagai pilar keempat demokrasi.

“Dalam menghadapi Pemilu, selain mengabarkan tentang fakta dan memberikan edukasi kepada masyarakat, Pers juga memiliki ‘tugas tambahan’ untuk merajut ikatan kebangsaan ketika Pemilu usai dilaksanakan. Karena berdasarkan pengalaman, Pemilu hampir selalu menyisakan residu. Kontestasi politik yang tidak sehat akan memicu polarisasi rakyat pada kutub yang berseberangan yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat berujung pada konflik sosial,” ujar Bamsoet usai menyerahkan sepeda motor disela Diskusi Empat Pilar ‘PPHN Tanpa Amandemen’, di Media Center MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam konteks kehidupan demokrasi, salah satu tolok ukur yang dapat dijadikan rujukan untuk menakar implementasi dan kualitas demokrasi di Indonesia, adalah dengan mengacu pada nilai indeks demokrasi. Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai indeks demokrasi didasarkan pada tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Menurut data BPS, indeks demokrasi Indonesia selama kurun waktu, antara tahun 2009 hingga 2020, telah mengalami penurunan 4 kali pada periode tahun 2010, tahun 2012, tahun 2015, dan tahun 2016. Sedangkan indeks demokrasi pada tahun 2020 berada di angka 74,92 atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 72,39,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, secara global, salah satu rujukan yang telah mendapatkan pengakuan global adalah indeks demokrasi yang disusun oleh The Economist Intelligence Unit, suatu divisi penelitian dari Economist Group yang berbasis di Inggris. Lembaga ini mengukur kualitas implementasi demokrasi dari lima instrumen, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil.

Merujuk pada laporan The Economist Intelligence Unit yang dipublikasikan pada awal

Februari 2022, indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021 menempati urutan ke 52 dari 167 negara, dengan nilai 6,71 pada skala 0 sampai 10. Di satu sisi, bangsa Indonesia patut berbangga bahwa capaian indeks demokrasi pada tahun 2021 lebih baik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, di mana indeks demokrasi berada di peringkat 64 dunia dengan nilai indeks sebesar 6,30 yang merupakan skor terendah sejak tahun 2006.

“Di sisi lain, peningkatan indeks tersebut masih belum mampu mengeluarkan posisi kita dari kategori demokrasi tidak sempurna, atau demokrasi “cacat” (flawed democracy). The Economist Intelligence Unit mendefinisikan “demokrasi cacat” dengan karakteristik di mana demokrasi procedural seperti Pemilu dilaksanakan secara adil dan bebas, kebebasan sipil dasar dihormati, tetapi masih memiliki persoalan, misalnya terkait kebebasan media, pembangunan budaya politik, tingkat partisipasi politik, atau fungsi pemerintahan,” pungkas Bamsoet. □

Sosialisasi Empat Pilar di Komunitas IKADIM

HNW: Empat Pilar MPR Lahir untuk Lanjutkan Keteladanan Para Pendiri Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN Ikatan Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM) Universitas Negeri Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengajak para pakar dan kaum terpelajar untuk menguatkan komitmen meneladani kenegarawan para Bapak Bangsa, dan mengingatkan bahwa salah satu tugas MPR adalah menyampaikan keteladanan itu melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada komunitas IKADIM. Tetapi, sosialisasi yang disampaikan kepada IKADIM tentu bukan untuk menggarami air laut, maupun mengajari ikan berenang. Sosialisasi kepada IKADIM terkandung maksud menyegarkan ingatan dan menguatkan komitmen menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, dasar dan ideologi negara, serta konstitusi, agar dapat melanjutkan keteladanan para Bapak dan Ibu Bangsa.

Apalagi, hari ini, Jumat 9 Ramadhan 1444 H, adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada hari ini, 78 tahun yang lalu, adalah hari dan tanggal di mana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia digaungkan. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, waktu itu bertepatan dengan hari ini, Jumat tanggal 9 Ramadhan tahun 1364 H.

“Artinya, boleh jadi saat ini kita juga sedang merayakan kemerdekaan Indonesia ke-80 dalam hitungan kalender Hijriyah. Dan, kita patut mensyukuri karunia kemerdekaan

yang telah Allah hadirkan, sambil terus melakukan introspeksi apa saja yang sudah kita syukuri dan kita capai selama ini,” kata Hidayat Nur Wahid yang biasa disapa HNW.

Pernyataan itu disampaikan HNW pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Bedah Buku “MSDM Dalam Prespektif Islam”, karya tulis Ikatan Doktor Ilmu Manajemen. Acara tersebut berlangsung di Ruang Abdul Muis DPR RI Gedung Nusantara Kompleks MPR/DPR, Jumat (31/3/2023). Ikut hadir pada acara tersebut Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid SQ., MA., Presidium IKADIM yang juga Anggota Fraksi PKS MPR RI Dr. Jazuli Juwaini, MA., serta jajaran pengurus IKADIM dan Universitas Negeri Jakarta.

Adanya dua sistem penanggalan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, menurut Hidayat, menjadi bukti suburnya kebhinnekaan bangsa Indonesia. Yaitu, kebhinnekaan yang Tunggal Ika. Dan, itu sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum lahirnya bangsa Indonesia merdeka.

“Kompromi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia disepakati pada 22 Juni 1945. Tetapi pada 17 Agustus sore, masuklah berbagai aspirasi dan keberatan. Yang menarik keberatan itu bukan menjadi pembelah bangsa. Berbeda dengan kenyataan saat sekarang, di mana perbedaan memunculkan istilah kadrun, kampret, dan seterusnya. Padahal, para Bapak dan Ibu Bangsa sudah





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

memberikan keteladanan dalam menyikapi perbedaan, dan kemampuan membuat solusi dan kompromi untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” ungkap HNW.

Pidato tentang Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara pada Sidang BPUPK , 31 Mei- 1 Juni 1945, kata anggota Komisi VIII DPR RI, ini melahirkan dua poros ideologi besar, yaitu: kebangsaan dan keagamaan Islam. Tetapi, keduanya bukan saling membelah dan memisahkan. Baik poros ideologi nasionalis kebangsaan maupun nasionalis religius berupaya menemukan kompromi agar kebhinnekaan itu menghadirkan ketunggal-ikaan.

Selanjutnya dibentuklah panitia kecil terdiri dari 8 orang. Pada 1 Juni, sesudah

menyampaikan pidato tentang Pancasila, dibentuklah Panitia 8 untuk merumuskan kesepakatan. Oleh Bung Karno, keanggotaan panitia kecil itu diubah dengan alasan tidak seimbang. Karena dari 8 anggota panitia kecil, 6 diantaranya merupakan anggota poros ideologi kebangsaan, dan hanya dua orang dari keagamaan.

“Di sini, Bung Karno memperlihatkan kenegarawanannya, mengubah Panitia Delapan menjadi Panitia Sembilan dengan mengakomodir semua kelompok. Ada empat orang poros ideologi kebangsaan, yaitu: Soekarno, Hatta, Moh. Yamin, dan A. Soebardjo, serta satu kelompok kebangsaan Nasrani AA. Maramis. Lalu empat orang dari

kelompok kebangsaan Islam, terdiri dari dua ormas Islam, KH. Wahid Hasyim (NU) dan KH. Kahar Muzakir (Muhammadiyah), serta 2 dari partai Islam yakni H. Abikoeno Tjokrosoejoso dan H. Agus Salim. Kelompok Sembilan menghasilkan kompromi tentang Pancasila pada 22 Juni, dan dikenal sebagai Piagam Jakarta,” ungkap Hidayat.

Ternyata, hasil kompromi Pancasila 22 Juni itu diprotes oleh masyarakat Indonesia Timur. Dan, sesuai prinsip kenegarawanan yang mengedepankan maslahat terbesar, keberatan tersebut diterima, sehingga lahir kesepakatan final Pancasila 18 Agustus. Sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Inilah hikmah besar yang harus dipelajari dan diteladani dari para pendiri bangsa, terutama oleh kalangan terpelajar seperti IKADIM, dan oleh MPR maka dilahirkanlah Empat Pilar MPR RI. Agar dengan demikian pemahaman terhadap Empat Pilar MPR RI, selain mensejarah, melanjutkan keteladanan, juga berkemampuan untuk mengawal dan mengawasi perjalanan kebangsaan. Agar bila ada yang menyimpang bisa diluruskan. Agar bila ada masalah bisa dicarikan solusinya. Dan, agar mampu menjawab tantangan dan peluang zaman tanpa kehilangan jatidiri sebagai Bangsa dan Negara Indonesia. Agar dengan demikian cita-cita proklamasi dan reformasi selalu dapat diperjuangkan dan diwujudkan,” pungkasnya. □



Diskusi Empat Pilar MPR

Arsul Sani: Memenjarakan Pelaku dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Harus Berjalan Beriringan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Pr. M., mengatakan, sudah waktunya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi mempertimbangkan aspek pengembalian kerugian keuangan negara atas praktik kejahatan tersebut. Bukan semata fokus memenjarakan terpidana korupsi, seperti yang selama ini dilaksanakan. Jadi, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus berjalan beriringan, antara memenjarakan pelaku

tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi.

Untuk itu, menurut Arsul, perlu ada revisi terhadap UU Tipikor agar undang-undang tersebut lebih sesuai dengan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (United Nation Corruption -UNCAC) tahun 2003. Apalagi Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tersebut, sehingga UU Tipikor yang sekarang berlaku perlu disesuaikan dengan UNCAC.

“Proses penindakan hukum terhadap pelaku tindak korupsi harus berjalan beriringan antara upaya pemenjaraan dan pengembalian kerugian keuangan negara, bukan hanya salah satu saja,” tegas Arsul.

Pernyataan itu disampaikan Arsul Sani, saat menjadi narasumber pada diskusi Empat Pilar yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerjasama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI, di Media Center MPR/DPR, Rabu (5/4/2023).



Diskusi yang membahas tema: “Polemik 349 T, Peran Legislator Ungkap Keadilan Sosial Demi Selamatkan Pajak Negara” itu, selain menghadirkan Arsul sebagai narasumber, juga menampilkan narasumber lain, yaitu: Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra dan anggota Komisi XI DPR RI Ir. Kamrussamad, S.H., M.Si., serta Peneliti Ekonomi Indef Nailul Huda

Sila kelima Pancasila keadilan social,

menurut Arsul, harus diartikulasikan keseluruhan aspek kehidupan. Salah satunya dengan tax ratio. Tidak sekedar puas dengan pencapaian target yang sudah ditetapkan. Karena ternyata target yang ditetapkan masih terlalu kecil.

“Salah satu bentuk artikulasi sila keadilan adalah transparansi yang semakin jelas terhadap mekanisme penganggaran, tidak ditutupi atau malah

dikaburkan,” kata Arsul lagi.

Sebelumnya, Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Ir. Kamrussamad S.H., M.Si., menekankan, skandal 349 T yang menyeret kementerian keuangan harus berakhir buat kepentingan bangsa dan negara. Akhir dari skandal tersebut juga harus mendukung perbaikan tatakelola pemerintah.

“Selama ini kita mengakui reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik. Tetapi, karena kasus ini kemungkinan masih akan melahirkan tersangka baru, bisa dikatakan bahwa sebenarnya reformasi perpajakan belum selesai. Terbukti masih ada kegagalan yang harus dievaluasi,” kata Kamrussamad.

Skandal 349 T, menurut Kamrussamad, membuka mata terhadap praktik tak terpuji yang selama ini tersembunyi di Kemenkeu. Yaitu, adanya orang-orang pajak yang menjadi konsultan pajak.

“Praktik seperti itu berpotensi menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Karena itu, skandal ini harus diusut tuntas, dan memberikan sanksi yang memiliki efek jera bagi para pelakunya,” pungkas Kamrussamad. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Rakertas Setjen MPR

Ma'ruf Cahyono: Momentum untuk Mengingat di Pundak Kita Ada Tanggung Jawab



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DIBULAN Februari 2023, selama tiga hari, para pemangku jabatan eselon II hingga IV di lingkungan Setjen MPR mengikuti Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) di Tangerang, Banten. Pada acara pembukaan Rakertas, para peserta mendapat pembekalan dari Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI, Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.

"Hari ini kita melaksanakan Rakertas dengan tema: 'Rencana Operasional dan Rencana Aksi Program dan Kegiatan MPR Tahun 2023,' kata Ma'ruf Cahyono. Dia berharap, para pemangku jabatan tidak hanya melihat tema itu sebagai judul, nomenklatur dari Rakertas, namun dari tema itu dijadikan suatu semangat untuk membuat perencanaan operasional, aksi, dan program.

Ma'ruf Cahyono mengingatkan bahwa Setjen MPR beberapa hari lalu telah melaksanakan Perjanjian Kerja (PK), Performance Agreement, antara pemangku jabatan. "Nah, pada Rakertas ini kita jabarkan, turunkan, dalam rencana operasional dan rencana aksi," ungkapnya.

Dijelaskannya, PK adalah perjanjian kinerja yang saat ini menjadi tren pemerintahan bahwa bekerja saat ini semakin transaksional. Apa yang ada dalam perjanjian itulah yang harus dilaksanakan dan merupakan kewajiban setelah hak-haknya atas jabatan dari para pemangku jabatan dipenuhi. "Semuanya sudah diatur dalam undang-

undang," terangnya.

Menurut alumni Universitas Jenderal Sudirman itu, harapan pemerintah dari PK adalah akan semakin banyak capaian kinerja. Kinerja yang dicapai harus sesuai dengan patokan-patokan yang seperti diperjanjikan.

Lebih lanjut diuraikan, rencana operasional dan aksi sesungguhnya satu hal yang berulang setiap tahun, namun pemangku jabatan apalagi yang sudah melakukan PK, bisa memperkaya diri. Memperkaya diri di sini, jelas Ma'ruf, adalah bahwa pemangku jabatan selama dalam masa PK harus bisa melakukan langkah baru atau inovasi untuk menjawab kebutuhan ketika dalam rencana operasional dan rencana aksi tidak ditemukan solusi atau tidak cukup. "Ada yang harus diperbarui sesuai kondisi proyeksi," ucapnya. Sehingga dari PK yang ditandatangani akan mencapai target indikator berupa proses, kualitas, kuantitas yang semakin baik.

Performance yang baik, menurut Ma'ruf Cahyono, berarti kita sudah memenuhi janji dan mampu melaksanakan mandat dalam menjalankan program dan kegiatan. "Dari sini kita bisa mengklaim bahwa kita sudah melaksanakan rencana kerja, operasional, aksi, yang telah ditetapkan bersama," tandasnya. □

AWG/DER

Humas MPR Menerima Delegasi SMA Negeri 4 Denpasar Bali

BIRO Humas Setjen MPR menerima kunjungan delegasi pelajar dan guru SMA Negeri 4 Denpasar Bali, 9 Maret 2023. Kunjungan itu merupakan bagian dari program sekolah yang bertajuk 'Studi Pengenalan Universitas.' Kedatangan delegasi SMA Negeri 4 Denpasar ini diterima oleh Perwakilan Humas Setjen MPR, Kasub Hubungan Antarlembaga, Revi dan staf.

"Selamat datang di gedung MPR. Gedung MPR adalah rumah rakyat,

jadi sangat terbuka untuk rakyat Indonesia berkunjung. Di sini sangat banyak peninggalan bersejarah terkait parlemen Indonesia, mulai dari gedungnya sampai produk legislasinya," jelas Revi.

Setelah diterima di Gedung Nusantara V, rombongan pelajar dan guru SMA Negeri 4 Denpasar melakukan tour di sekeliling gedung Parlemen, termasuk mengunjungi Museum Parlemen dan berpoto di sekitar lokasi gedung MPR yang instragramable. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Perayaan Women's Day International 2023 di Gedung Parlemen



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

UNTUK memperingati Hari Perempuan Internasional 2023 yang jatuh pada 8 maret 2023, MPR menggelar 'Women's Day Run 10K'. Merupakan acara Fun Run diselenggarakan oleh Garda Media bekerja sama dengan MPR RI dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional.

Acara ini terbuka untuk masyarakat umum, laki-laki atau perempuan, dengan jarak tempuh sekitar 10 km, berlangsung hari Ahad, 12 Maret 2023.

Dengan mengambil tema: 'Equality today for a harmoy tomorrow', kegiatan digelar dengan lokasi start and finish di Lapangan Parkir Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Lomba untuk umum ini, pendaftarannya telah dibuka sejak 10 Januari hingga 28 Februari 2023.

Kegiatan lomba yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp 89 Juta ini, juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Hj. Intan Fauzi, Anggota MPR Fraksi PAN

Pakaian Bekas Impor Membawa Banyak Kerugian

BEBERAPA waktu terakhir ini, pakaian bekas impor kembali menjadi masalah. Belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut *thrifting* itu menjamur di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Padahal, pemerintah telah melarang impor pakaian bekas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Pada pasal 2 ayat 3 Permendag No. 40 Tahun 2022 disebutkan bahwa barang dilarang impor antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunaannya. Namun, pakaian bekas tetap membanjiri pasar Indonesia. Banyak juga pedagang yang selama ini bergantung pada penjualan baju bekas impor.

Menteri Koperasi dan UKM Teten

Masduki bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah menyepakati penutupan keran impor pakaian bekas mulai dari hulu, yaitu penyelundup yang merupakan importir atau produsen pakaian bekas impor ilegal. Selain itu, pemerintah juga membatasi impor di lapangan (*restriksi*) bagi para pedagang yang menjual pakaian bekas impor ilegal.

Persoalan pakaian bekas impor ini menjadi perhatian anggota MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hj. Intan Fauzi, SH., LL.M. Beberapa kali anggota Komisi VI, yang antara lain membidangi masalah Perdagangan, Koperasi dan UMKM menyoroti menjamurnya penjualan pakaian bekas impor (*thrifting*). Berikut ini penuturan Intan Fauzi, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kota Bekasi dan Depok.

Penjualan pakaian bekas yang dikenal dengan *thrifting* menjamur di kalangan masyarakat. Dengan *thrifting* itu, masyarakat bisa mendapatkan pakaian bekas dengan merek terkenal atau branded dengan harga miring.

Bahkan, berburu pakaian bekas atau *thrifting* ini sedang naik daun di kalangan anak muda. Bagaimana ibu melihat fenomena ini?

Kalau kita bicara impor pakaian bekas jangan dipersepsikan bahwa barang bekas ini adalah barang yang ada di tingkat retail UKM. Karena kita bicara impor pakaian bekas. Ini adalah kegiatan ilegal. Impor barang bekas (ilegal) jelas melanggar hukum, karena sudah diatur di dalam Permendag No.40 Tahun 2022, perubahan dari Permendag No.18 Tahun 2021. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan memusnahkan barang-barang bekas tersebut, pakaian bekas, sepatu bekas dan lain-lain yang masuk ke Indonesia secara ilegal untuk dimusnahkan karena, ya itu tadi, artinya melanggar hukum.

Jadi, kalau kita bicara pakaian bekas, ini sebenarnya adalah sampah dari negara asalnya. Kemudian masuk melalui pintu-pintu yang ada di Indonesia. Karena itu, pemerintah memusnahkan barang-barang impor ilegal itu. Seperti kemarin (18 Maret 2023) di Pekanbaru, Riau, Menteri

Perdagangan menyaksikan pemusnahan ratusan bal barang impor bekas berupa pakaian, tas, dan sepatu, nilainya mencapai Rp 20 miliar. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2023, di Mojokerto, Jawa Timur, juga dimusnahkan barang impor bekas senilai Rp 10 miliar. Artinya, barang impor bekas berupa pakaian, tas, dan sepatu itu memang sudah melanggar hukum.

Meski sudah ada aturan yang melarang impor pakaian bekas, tas, dan sepatu, mengapa barang-barang bekas itu masih membanjiri pasar Indonesia?

Itu karena mudahnya akses masuk barang bekas tersebut di berbagai pelabuhan di Indonesia yang sangat luas. Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kemendag, Bea Cukai, kemudian Angkatan Laut, harus lebih tegas dalam penegakan hukum. Ini bukan semata-mata hanya di hilir, tetapi juga perlu kerjasama dengan aparat, yaitu Bea Cukai, kemudian di perairan dengan Angkatan Laut dan sebagainya. Jadi, memang tidak bisa hanya satu kementerian/ lembaga. Ini lintas kementerian/ lembaga yang secara berkoordinasi untuk penegakan hukum importir ilegal pakaian dan barang bekas.

Jika permintaan terhadap barang bekas masih tinggi maka akan masih banyak oknum-oknum importir nakal yang berusaha memasukkan barang-barang *thrifting* tersebut ke Indonesia. Dan, kalau kita bicara barang yang masuk ke Indonesia itu harus memenuhi standar, yaitu SNI. Karena itu, perlu pengawasan, jangan sampai terjadi lagi seperti marak belakangan ini, para importir nakal, para oknum yang mengimpor barang-barang bekas, dalam hal ini pakaian, sepatu, tas bekas.

Sebagai masyarakat, kita juga harus membantu agar jangan sampai selalu ada demand (permintaan) terhadap barang-barang bekas itu. Dengan kata lain, kalau kita membeli barang bekas (pakaian, sepatu, atau tas) berarti otomatis demand-nya masih ada. Ini juga yang menjadi penyebab mengapa importir (nakal) itu kemudian merasa bahwa ada kebutuhan (permintaan) dalam negeri.

Di lapangan, banyak pelaku usaha yang membuka usaha *thrifting*. Bagaimana dengan nasib mereka yang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

berbisnis atau usaha *thrifting*?

Jadi, memang, pakaian bekas yang dimusnahkan adalah pakaian bekas di penjualan akhir karena memang di penjualan akhir barang itu ditemukan. Sekarang penjualan *thrifting* secara online sudah dilarang, tapi kemudian penjualan *thrifting* di mall dan pasar tradisional, juga masih marak. Memang penertiban harus dilakukan dari hulu hingga hilir.

Barang-barang bekas, seperti pakaian bekas impor, yang masuk ke Indonesia membawa kerugian. Barang-barang bekas impor ini akan menghilangkan berbagai pendapatan negara. Industri tekstil kita juga akan terdampak. Kemudian produsen-produk Indonesia juga akan terdampak. Juga dari sisi kesehatan. Pakaian bekas impor berpotensi membawa penyakit dari



luar ke Indonesia.

Dengan adanya barang (pakaian bekas, sepatu, tas) impor yang bermerek tetapi bekas, kemudian dijual bebas baik di pasar tradisional maupun mall secara terbuka dengan harga murah, ini juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat. Yaitu, masyarakat jangan membeli barang ilegal karena murah tapi bermerek. Ini tentu tidak bisa dibenarkan. Ini jelas melanggar hukum.

Untuk itu, kita meyakini bahwa produk-produk Indonesia, dalam hal ini produk UMKM Indonesia, seperti pakaian, sepatu, tas, dan sebagainya sudah sangat baik. Kita perlu memberi dukungan kepada produk UMKM Indonesia. Kalau industri tekstil kita, kemudian juga para pelaku UMKM bisa menghasilkan produk dalam negeri yang bagus, serta mendapat dukungan dari masyarakat dengan membeli produk dalam negeri, saya yakin maraknya pakaian bekas impor atau *thrifting* ini tidak perlu terjadi.

Bagaimana pengawasan atau langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan pakaian bekas impor yang membanjiri pasar Indonesia ini?

Penertiban pakaian bekas atau *thrifting* ini harus cepat dilakukan. Yang perlu kita awasi dan perlu kita tertibkan adalah importirnya. Aparatur penegak hukum harus menyelidiki dari sisi perizinan dan perusahaan yang mengimpor pakaian bekas. Jangan mereka menyalahgunakan izin impor, yaitu untuk barang-barang bekas, atau pakaian bekas. Kembali lagi, oknum-oknum importir nakal ini yang harus diselidiki.

Kegiatan impor pakaian bekas ini harus diselidiki secara menyeluruh. Jika nanti ditemukan adanya indikasi pelanggaran, oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan impor pakaian bekas harus ditindak karena sudah menghancurkan industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri.

Penertiban di lapangan juga tidak kalah penting, baik di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, mall, penjualan online dan sentra-sentra penjualan lainnya. Masyarakat juga agar jangan membeli pakaian maupun sepatu *thrifting* impor. Masyarakat Indonesia harus bisa lebih menghargai produk-produk dalam negeri yang secara kualitas juga tidak kalah dengan produk-produk dari luar. □



Peringatan Women's Day Tanpa *Make Up*



Marion Jola

ARTIS penyanyi jebolan Indonesia Idol 2018, Marion Rambu Jola Pedy alias **Marion Jola/Lala** memperingati International Women's Day pada 8 Maret 2023 dengan seharian tampil tanpa make up, baik di rumah ataupun saat melakukan aktivitas di luar rumah.

Dengan pedenya, dara kelahiran Kupang NTT tahun 2000 ini membagikan momen gak biasanya itu di akun sosmednya yang dibanjiri berbagai komentar.

"Women's day... Ini mungkin terdengar biasa saja, tapi kemarin aku merayakan Women's day dengan 1 hari full kerja tapi no make up. And It was Fun! i'm happy, to actually embrace my bare face yesterday to feel confident and gorgeous with my bare face just like when i had the full makeup on face. So it was such a healing troughout the day," ujar Lala, Kamis (9/3).

Penampilan penyanyi yang merilis album solo perdananya bertajuk: 'Marion' pada Juli 2019 malah terlihat cantik walaupun tanpa riasan make up sedikitpun di wajahnya. □

DER



Women's Day Kebaya Day

ARTIS film, pemeran, model, pembawa acara dan penyanyi Tissa Biani Azzahra atau biasa dipanggil **Tissa Biani** dalam momen memperingati Women's Day 2023 pada 8 Maret 2023 bersama rekan-rekan sejawatnya tampil luar biasa. Indonesia banget..

Artis kelahiran Depok, Jawa Barat, tahun 2022 ini, tampil elegan berkebaya, Tissa Biani pilih tema colorful dengan batik warna-warni. "Iya dong...mesti tampilin Indonesiannya, kan momennya keren hari perempuan internasional, biar kebaya bisa mendunia," ujarnya.

Peraih penghargaan Piala Citra 2014 untuk Pemeran Anak Terbaik ini tidak sendiri, dia berhasil memprovokasi temannya-temannya untuk ber-outfit kebaya juga. Aksinya ini menuai pujian dari netizen. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Tissa Biani



Ian Kasela

Buntut Ancaman Pembunuhan di Malaysia

PUBLIK Indonesia, terutama fans grup band Radja, sempat mendengar kabar yang langsung disampaikan vokalis **Ian Kasela** tentang adanya ancaman pembunuhan yang ditargetkan kepada seluruh personil band, saat manggung di Malaysia pada Sabtu, 11 Maret 2023.

Vokalis kelahiran Kalimantan tahun 1976 yang mengawali perjuangan hidupnya dari tukang bakso pada tahun 90-an, hingga menjadi vokalis band Radja yang terbentuk pada 17 Maret 1999, bercerita tentang ancaman pembunuhan itu di media social, dan langsung viral.

Mereka sempat disekap oleh 20 orang berbadan tegap selama hampir setengah jam. Akibat peristiwa itu, cerita Ian Kasela, membuat seluruh personil band mengalami cedera mental. □

DER



Museum Jenang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Menelisik Pesan-Pesan Surgawi dari Museum Jenang Kudus

INDONESIA memiliki banyak jenis makanan tradisional dari berbagai daerah. Sebagian dari makanan tradisional itu ada yang sudah merambah ke berbagai daerah. Salah satunya adalah jajan khas yang sudah melegenda menjadi buah tangan, yaitu Jenang Kudus. Yang menarik, sejarah, perkembangan, dan lika-liku jenang kudus ini diabadikan melalui sebuah Museum Jenang. Museum ini berdiri di Jl. Sunan Muria No.33, Glantengan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313.

Museum Jenang didirikan oleh PT. Mubarakfood Cipta Delicia - produsen jenang merek Mubarak. Museum Jenang digagas tepat pada momentum jenang merek Mubarak berusia satu abad, pada 2010. Tujuh tahun kemudian, yaitu pada 24 Mei 2017, gagasan itu terealisasi dan menjadikan Museum Jenang, sebagai museum jenang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Di Kudus sendiri terdapat banyak jenis dan merk jenang. Tetapi yang paling dikenal adalah jenang merek Mubarak. Jenang Mubarak disebut-sebut sebagai pelopor jenang dari Kudus. Mubarak jumlah yang dikenal sebagai jenang yang

pertama go national. Jenang Mubarak telah menempuh perjalanan panjang dan sudah dikelola oleh tiga generasi. Saat ini panganan tersebut bisa dijumpai di beberapa kota, di luar Kudus

Interior di museum jenang ini didominasi oleh kayu, berwarna cokelat. Berada di Museum Jenang seolah kembali ke masa

lampau. Dimulai dari awal adanya pembuatan jenang hingga perjalanan jenang Kudus dari masa ke masa. Bangunan Museum Jenang terdiri dari dua lantai. Lantai pertama berupa gerai Mubarak Food. Di sini tersedia beragam produk jenang Kudus merek Mubarak, beserta varian rasa. Juga aneka produk oleh-oleh lainnya.





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Interior klasik dan sangat memikat ditemukan di lantai dua yang merupakan ruang museum. Di sini terdapat informasi seputar entitas jenang Kudus, dan berkaitan erat dengan sosok Sunan Kudus. Dikisahkan, mula pertama Jenang Kudus berawal ketika cucu Mbah Denok Sopyono sedang bermain burung merpati di tepi sungai, lalu tercebur dan hanyut. Anak tersebut ditolong oleh warga. Saat itu, melintasilah Sunan Kudus dan muridnya, Syekh Jangkung, lalu menghampiri warga yang sedang berkerumun.

Sunan Kudus berkesimpulan, anak tersebut sudah mati. Namun, Syekh Jangkung mengatakan bahwa anak tersebut hanya mati suri. Untuk membangunkannya, Syekh Jangkung meminta para ibu membuat jenang. Dari situlah kemudian Sunan Kudus berucap, "*Suk nek ono rejaning jaman, wong Kaliputu uripe seko jenang.*" Artinya, suatu saat kelak sumber kehidupan warga Desa Kaliputu berasal dari usaha pembuatan jenang.

Dari legenda itu, produksi Jenang Kudus di Desa Kaliputu, Kecamatan Kota Kudus, berkembang hingga sekarang. Bahkan, sebagai rasa syukur atas berkah usaha jenang, setiap tanggal 1 Muharram digelar Kirab Tebokan atau disebut juga Arak-Arakan Jenang.

Patung orang sedang mengaduk jenang dipamerkan di museum ini. Patung tersebut menggambarkan proses pembuatan jenang.

Berbagai alat membuat jenang masa lalu juga di-display untuk membangun imaji

pengunjung pada proses pembuatan jenang dari masa ke masa. Misalnya, ada mesin parut kelapa, mesin peras kelapa, alat susuk, alu (penumbuk) dan tebok (tempat jenang). Juga lumpang; mesin mixer pengolahan jenang hingga mesin inkjet printing/labeling.

Dipajang pula potret pendiri dan pengelola Jenang Kudus merek Mubarak. Dimulai oleh perintis pertama jenang Mubarak, pasangan H. Mabruki dan Hj. Alawiyah sejak tahun 1910 hingga tahun 1940. Diteruskan generasi kedua, pasangan H.A. Sochib dan Hj. Istifaiyah sejak tahun 1940 hingga tahun 1992. Serta generasi ketiga, pasangan H. Muhammad Hilmy, SE., dan Hj. Nujumullaily, SE., sejak tahun 1992 hingga sekarang.

Ruang Gusjigang

Museum Jenang tak melulu berkisah tentang makanan yang dalam bahasa Betawi dinamakan dodol. Di tempat itu juga digambarkan sejarah Kudus. Ada pula Rumah Adat Kudus yang disebut "Joglo Kudus" atau "Atap Pencu". Museum juga menampilkan foto Bupati Kudus dari masa ke masa yang dipasang secara berjajar.

Tak hanya itu, Museum juga memamerkan potret Kudus tempo dulu, yang kerap menyita perhatian. Seperti, Jembatan Kereta Api di Tanggulangin tahun 1900, Interior Pendopo Kabupaten Kudus tahun 1923, Stasiun Kereta Api Tahun 1936, Kantor Polisi Kudus tahun 1928, Alun-alun Kudus Tahun 1936, serta Petugas Telkom Kudus tahun 1938.

Di Museum Jenang juga terdapat ruang khusus yang dinamakan Ruang Gusjigang atau Gusjigang X-Building. Di sini pengunjung dapat membaca kilas biografi/sejarah tokoh ulama Kudus dan pengusaha masa lalu Kudus. Di antaranya biografi Sunan Kudus, Sunan Muria, Kiai Telingsing, KH. Raden Asnawi, KH. M. Arwani Amin, KH. Turaichan Adjihuri, RMP. Sosrokartono, Nitisemito, H. Djamhari, dan lain sebagainya.

Gusjigang sendiri merupakan falsafah masyarakat Kudus sebagai *local wisdom* dan *local culture* serta ajaran moral warisan Sunan Kudus. Spirit Gusjigang terdapat dalam akronim Gusjigang, yaitu baGUS akhlaknya (spiritual), pintar ngaJI (intelektual), dan terampil daGANG (entrepreneurship). Melalui filosofi inilah Sunan Kudus menuntun para pengikut dan masyarakat Kudus menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian yang bagus, tekun mengaji, dan mau berusaha atau berdagang.

Di Ruang Gusjigang juga terdapat Ruang Galeri Alquran dan Asmaul Husna, Omah Kembar dan Pesawat Fokker Nitisemito, Omah Kapal, dan Ruang Trilogi Ukhuwah. Trilogi Ukhuwah mengandung tiga pesan persaudaraan, meliputi:

Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan antarsesama muslim), ukhuwah wathoniyah (ikatan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyah (ikatan kemanusiaan). Utamanya, dalam konteks dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. □

MBO

KH. H. Maman Imanul Haq, M.Ag

Saya Anggota DPR Korban *Kekeerasan Monas 2008*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PEMILIHAN umum 14 Februari 2024 semakin dekat. Suhu politik tanah air jelang pesta demokrasi 5 tahunan pun mulai meningkat. Para kandidat anggota legislatif, baik DPRD kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat (DPR RI dan DPD RI) terlihat semakin sering bersua dengan anggota masyarakat. Praktis kegiatan mereka di daerah pemilihan pun terus bertambah.

Begitupun kesibukan yang dirasakan K.H. Maman Imanul Haq, M. Ag., Anggota Badan Pengkajian MPR RI yang juga anggota MPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Fraksi PKB). Sejak awal tahun, Kang Maman—begitu dia biasa di sapa—sudah menambah frekuensi kegiatannya di dapil. Bahkan, kunjungan tersebut di lakukan di luar basis massa pendukungnya sendiri. Tujuannya adalah memperbesar potensi perolehan suara di luar kantong-kantong pemilih yang selama ini sudah memberikan pilihannya kepada pria kelahiran Sumedang, 8 Desember 1972 ini.

Praktis saban akhir pekan, Kang Maman angkat koper dari Jakarta menuju dapil. Kecuali, ada tugas dari fraksi maupun kegiatan di komisi. Selebihnya, Ia menghabiskan waktu dengan masyarakat dan konstituennya di dapil Jawa Barat IX, meliputi Kabupaten Majalengka, Subang dan Sumedang.

Meski berdiri sebagai incumbent, Kang Maman sadar, Pemilu 2024 akan berlangsung sengit. Sehingga butuh persiapan matang, tidak bisa bersantai-santai, apalagi merasa pasti menang dan terpilih kembali. Sebaliknya, Ia merasa tantangannya semakin rumit karena itu butuh perhitungan dan harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Situasinya makin tidak mudah, karena nalar sebagian masyarakat kerap menginginkan sesuatu yang baru, dan bosan terhadap sesuatu yang lama.

“Setiap Jumat saya pasti pulang, dan itu sudah berjejal dengan jadwal. Habis Subuh ngajar tafsir pada para santri, siangnya ngajar guru-guru, lalu khutbah keliling di dapil, malamnya ketemu jamaah sholawat. Setelah itu, mengisi kegiatan lain di dapil dari pagi hingga dinihari, terus begitu. Intinya, kita lebih sistematis mendatangi perdapil, kecamatan dan desa prioritas,” kata Kang Maman kepada *Majalah Majelis* MPR yang menyambangi ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Beruntung, sebagai petahana putera pasangan KH. Drs. Abdurrochim dan Hj. Lalih Halimah ini mendapat fasilitas yang sangat membantunya mempersiapkan diri menghadapi Pileg 2024. Tetapi, itu tidak bisa membuatnya menurunkan kewaspadaan.



Faktanya, banyak kandidat baru yang memiliki modal dan kemampuan sangat baik. Karena itu, dengan modal yang dimiliki, ayah tiga puteri hasil pernikahannya dengan Hj. Upik Ropiqoh itu terus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Selain menyambangi konsituen Kang Maman tak lupa membawa oleh-oleh, termasuk atribut pemenangan.

“Banyak kiai, penceramah hingga tokoh agama gagal dalam pileg karena hanya mengandalkan modal social yang dimiliki. Padahal, dalam politik, modal sosial saja belum aman. Masyarakat butuh suntikan lain. Apalagi anggota DPR seperti saya, masyarakat sangat faham bahwa anggota dewan dibekali anggaran yang tidak sedikit,” kata Kang Maman lagi.

Terbukti pada pemilu sebelumnya, banyak ulama dan tokoh agama yang gagal menjadi anggota legislatif karena mengandalkan modal social saja. Nama-nama seperti KH. Zainuddin MZ hingga Rhoma Irama tidak mendapat kursi di Senayan, karena suara yang dikantongi masih kurang. Tetapi, itu juga terjadi terhadap caleg agama lain,

bukan hanya Islam.

Untuk menghadapi kontestasi pada pemilu yang akan datang, Kang Maman sudah bersiap sejak lama. Ia berusaha merencanakan agenda politiknya lebih tertib dari sebelumnya. Ia sudah membuat tim pemenangan dan lebih proaktif menarik masyarakat. Ia juga menyiapkan berbagai perlengkapan kampanye, mulai dari kalender, brosur hingga kaos.

“Saya banyak dipanggil ceramah, salah satunya karena mereka mengharap bantuan. Bagi saya itu tidak mengapa, asal mereka bisa memenuhi persyaratan. Misalnya, sertifikat tanah, bukan lahan bermasalah dan untuk tujuan yang jelas,” kata Kang Maman lagi.

Namun, tidak sedikit pula, masyarakat yang mengundangnya benar-benar karena keinginan untuk mendengarkan ceramah. Bahkan, mereka ini memberikan uang transportasi, sebagaimana laiknya. Meskipun mereka tahu kalau Kang Maman adalah Anggota DPR. Tetapi oleh Kang Maman, uang tersebut biasanya diinfaqkan lagi untuk kegiatan yang lain.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pemilu Pertama

Kang Maman yang juga memiliki panggilan lain, AA dan Ustad Maman (Usman), adalah politisi PKB yang cukup berhasil meretas karier di dunia politik. Ia mulus melenggang ke Senayan berkat kemenangannya pada tahun pertama keikutsertaannya pada pemilu, yaitu tahun 2014. Padahal saat itu ia nyaris tidak mempunyai modal sama sekali. Bahkan, ketika orangtuanya menyerahkan sebidang tanah untuk dijual sebagai modal politik, tapi ditolak oleh Usman.

Beruntung PKB memberinya nomer urut satu, dan itu membikin langkahnya untuk menang menjadi relatif ringan. Apalagi di tengah persiapan pemilu, Usman dinobatkan sebagai satu dari dua caleg yang bersih oleh beberapa LSM. Seperti KontraS, ICW, serta beberapa Lembaga Bantuan Hukum. Dan, itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap Usman semakin besar.

“Saya percaya, keberhasilan saya di 2014 karena faktor garis tangan. Modalnya asal datang ke pengajian. Saya tidak memasang spanduk, sebagaimana caleg lain menempelnya di pohon. Apalagi saya juga mengikuti saran WALHI yang melarang caleg memasang spanduk di pohon,” kata Usman lagi

Jalan lempang Kang Maman dalam dunia politik tak lepas dari kedekatannya dengan KH. Abdurrahman Wahid, yang membuatnya menjadi salah satu magnet di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena itu, tak berlebihan, jika setelahnya, Kang Maman pun mendapat kemudahan untuk mendaftarkan diri menjadi caleg di PKB.

Sebelum bertemu Gus Dur, nama Maman sempat viral. Itu terjadi saat Usman menjadi korban pemukulan oleh oknum FPI di lapangan Monas tahun 2008. Saat itu, Maman mendapat luka di kepala sehingga memperoleh 14 jahitan. Akibat kejadian tersebut, Gus Dur menengoknya di rumah sakit. Pada kunjungannya, Gus Dur tegas menolak kekerasan. Ia berpesan tidak boleh lagi ada darah yang mengucur karena memperjuangkan kemerdekaan di tempat ini.

“Kemudian Gus Dur tersenyum, dia bilang, tapi Kyai Maman harus bersyukur 14 jahitan membuatnya terkenal, dibicarakan oleh seluruh orang bahkan para pemimpin dunia. Itulah peristiwa yang selalu saya ingat. Sejalan dengan itu, saat bertemu kadernya, Bu Mega mengatakan, lihat Kiai Maman, dia memperjuangkan Pancasila dengan darah, kepalanya bocor,” tutur Kang Maman.

Dalam hidup ini, menurut Kang Maman, setiap orang punya kesempatannya sendiri. Setiap orang juga harus percaya,

tertutupnya satu kesempatan akan diikuti munculnya kesempatan lain. Seperti yang dia rasakan ketika kesulitan merealisasikan ide-ide pembangunan dari NGO, tapi kemudian memperoleh kesempatan untuk terjun di kancah politik melalui jalan yang sangat lebar. Tidak harus merintis karier dari bawah, tetapi langsung duduk sebagai salah satu pengurus di DPP PKB, dan jadi anggota DPR RI.

Menteri NU

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Kang Maman tak habis pikir terkait lambannya penerapan regulasi tentang Pondok Pesantren. Meski sudah ditetapkan sejak 2019, nyatanya keberadaan UU No. 18 tentang Ponpes belum bisa diterapkan secara optimal. Terbukti, Dana Abadi Pesantren yang diharapkan bisa menjadikan pesantren punya nilai kemandirian tak kunjung mengucur.

Padaahal, masyarakat pesantren menyambut antusias lahirnya Undang-Undang Pesantren itu. Karena keberadaan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menyertai kemajuan dunia pesantren, menjadi semakin baik. UU Pesantren juga disambut gembira karena menjadi pengakuan negara terhadap peran pesantren. Di dalamnya kalimat yang paling penting gitu adalah soal kemandirian pesantren.

Kang Maman berharap, dengan adanya dana abadi pesantren, popes bisa menjadi pusat incubator ekonomi. Apalagi, sudah terbukti





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ada beberapa pondok yang bisa menjadi contoh pesantren yang mandiri secara ekonomi. Sebut saja Pesantren Sidogiri yang punya aset koperasi sangat besar. Ada juga pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, yang memberdayakan masyarakat lewat produk pertanian.

“Kita berharap, pesantren itu bisa menjadi percontohan untuk dikembangkan di pesantren lain. Tetapi, untuk mengembangkan itu, pondok memerlukan supporting dan karena itu dana abadi pesantren diperlukan. Agar bisa menstimulus pondok-pondok pesantren yang lain,” ungkap Ustad Maman lagi.

Peruntukan dana abadi pesantren, menurut Kang Maman, bukan hanya untuk beasiswa, meski semula memang diperuntukkan untuk dana siswa. Tetapi, kemudian lebih dari itu. Dirjen pesantren bahkan pernah menghitung satu pesantren dengan kemampuan manajemen yang baik itu bisa dapat Rp 5 Miliar.

Agar anggaran beasiswa itu bisa dimanfaatkan dengan benar, dibutuhkan santri yang menguasai tiga kitab, yaitu: kitab Kuning, Putih dan Abu-abu. Kitab kuning adalah kemampuan untuk memahami referensi tradisi keislaman dan kepesantrenan. Kitab Putih adalah kemampuan mencari dan menggunakan data, fakta, teori, dan strategi. Dengan dana abadi santri diharapkan juga bisa mengakses perguruan tinggi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Tidak hanya ilmu agama tetapi juga ilmu tentang manajemen bisnis, strategi bisnis, hingga komunikasi public.

“Kitab Abu-abu dibutuhkan agar mereka bisa menjawab pertanyaan, kenapa koperasi tidak pernah maju, kenapa ekonomi

di pesantren muncul tenggelam. Kitab Abu-abu juga dibutuhkan sebagai penunjuk arah, untuk mengerti strategi geopolitik dunia, para pemain komoditas pokok dan strategis, seperti beras gula,” ungkap Kang Maman.

Sayangnya, hingga kini pencairan dana abadi belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Jangankan menyoal dana abadi, sedangkan apa manfaat UU Pesantren masih banyak yang belum yakin. UU baru sekedar pemanis. Seolah-olah pemerintah telah melaksanakan janjinya, kalau terpilih akan memberi hadiah, tetapi hadiahnya belum boleh dibuka hingga sekarang. Kadonya masih tertutup rapat, dengan berbagai alasan. Mulai soal regulasi teknis dan sebagainya. Meskipun Wapres dan Menagnya dari NU

“Negara ini diurus bukan hanya oleh NU, tapi oleh banyak pihak. Dan, tentu mekanisme bukan hanya Wapres dan Menag, ada Bappenas dan Kemenkeu. Sayangnya, sampai hari ini Kemenkeu masih selalu bertanya sampai sejauh mana pesantren memiliki kesiapan dan turut menyumbang pemasukan negara. Dan, itu belum bisa dijawab juga oleh pesantren,” pungkasnya. □

MBO

Biodata

Nama : **KH. Maman Imanul Haq M. Ag**
Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 8 Desember 1972

Riwayat Pendidikan

- Lulus SD Negeri 3 Cimalaka (1984)
- Lulus MTs Baitul Arqom, Bandung (1987)
- Lulus MA Baitul Arqom, Bandung (1990)
- Lulus S-1 STAI PUI Majalengka (2001)
- Lulus S-2 STAIN Cirebon (2006)

Pengalaman Organisasi

- Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Majalengka (2004–2008)
- Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Majalengka (2005–2009)
- Wakil Ketua Thoriqoh Mu'tabroh An-Nahdiyah (2005–2009)
- Pendiri Tikar Media (2007)
- Penasehat Robithoh Ma'ahid Islamiyah (2007–2012)
- Dewan Kebijakan Fahmina Institute (2008–2012)
- Board KONTRAS (2010–sekarang)
- Majelis Nasional Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (2010–2014)
- Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Barat (2011–2015)
- Ketua Lembaga Dakwah PB NU (2015–2018)
- Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin (2018–2019)
- Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB masa bakti 2019-2024.

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris RM Langensari (1993-sekarang)
- Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan (1999-sekarang)
- Ketua Yayasan Al-Mizan (1999-2004)
- Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Mizan Langensari (2004-sekarang)
- Anggota DPR-RI (2014-sekarang)
- Anggota Komisi VIII (2014-sekarang)



Local Branding: Tak Cukup Sekadar Khas Daerah

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia selama 2022 mencapai 5,31%. Angka pertumbuhan tersebut di atas target pemerintah yang sebesar 5,2%. Tentu ini kabar menggembirakan yang seharusnya membuat kita makin optimistis memasuki tahun 2023 dan seterusnya. Salah satu poin penting yang bisa mendorong optimisme itu adalah pandemi Covid-19 sudah mereda hingga pemerintah pun berani mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia sejak 30 Desember 2022. Dengan dicabutnya PPKM, mobilitas dan aktivitas masyarakat berangsur normal, bahkan kini sudah bisa dikatakan relatif seperti sebelum pandemi.

Tantangan Daerah

Dilihat dari kontribusi daerah terhadap pertumbuhan itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tersebut masih dominan disumbang Pulau Jawa. Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 56,48%, dan tahun lalu pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa secara rata-rata adalah sebesar 5,31%, sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kontribusi daerah lainnya (berdasarkan pulau) adalah Pulau Sumatera yang berkontribusi sebesar 22,04% terhadap perekonomian nasional dan tahun 2022 tumbuh sebesar 4,69%. Kemudian Kalimantan yang kontribusinya pada ekonomi nasional sebesar 9,23% dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu sebesar 4,94%. Disusul kemudian Pulau Sulawesi dengan kontribusi kepada ekonomi nasional sebesar 7,03% (tahun lalu ekonominya tumbuh 7,05%), lalu Bali dan Nusa Tenggara dengan kontribusi 2,72% (tahun lalu ekonominya tumbuh 5,08%), serta Maluku dan Papua dengan kontribusi pada ekonomi nasional sebesar 2,50% dan ekonominya tumbuh 8,65% pada tahun yang sama.

Berdasarkan lapangan usaha, data BPS menyebutkan, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi, yakni sebesar 19,87% diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 11,97%. Secara sekilas bisa kita pahami bahwa tumbuh tingginya kedua kelompok lapangan usaha itu karena sepanjang tahun lalu mobilitas dan aktivitas masyarakat makin meningkat seiring diperlonggarnya kebijakan PPKM. Sedangkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling dominan pada PDB nasional adalah industri pengolahan dengan pertumbuhan tahun lalu sebesar 4,89%.

Sejak lama kita berharap sektor industri pengolahan bisa tumbuh impresif dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat kita memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah di setiap daerah. Akan tetapi hingga saat ini kita masih berhadapan dengan beragam kendala, terutama di luar Pulau Jawa.

Industri pengolahan hingga saat ini masih terkonsentrasi di

Pulau Jawa. Bagaimana industri pengolahan di luar Pulau Jawa bisa ditingkatkan? Dalam teori yang sudah sama-sama kita mafhumi, faktor pendorong utamanya (di sisi lain bisa menjadi faktor penghambatnya) adalah SDM, modal (investasi), dan teknologi. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa daerah yang sektor industri pengolahannya berjalan lambat pimpinan daerahnya tidak memerhatikan ketiga faktor itu. Semua daerah memerhatikan hal-hal tersebut. Perbedaannya adalah bagaimana mengoptimalkan SDM yang dimiliki, kegigihan dan kreativitas daerah menarik investor, serta memanfaatkan teknologi yang umumnya dibawa oleh investor. Tentu kita masih bisa mengurut hambatan berikutnya, seperti jalur distribusi yang masih terkendala, pemasaran, kualitas produk, pasar nasional dan dunia yang melambat, dan sebagainya.

Terkait hal tersebut, menarik untuk memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakomas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023 yang diselenggarakan di Bogor pada 17 Januari 2023 lalu. Di antara sejumlah arahnya, ada dua arahnya yang cukup relevan dengan industri pengolahan, yakni terkait investasi dan pengembangan komoditas. Dalam kaitan dengan investasi, Presiden meminta daerah untuk tidak mempersulit izin. Menurut Presiden, semua izin harus bisa selesai dalam hitungan hari, jangan sampai berbulan-bulan. Sudah sama-sama kita yakini bahwa kemudahan izin bisa meningkatkan daya tarik investasi daerah, namun masih banyak daerah yang izinya lama.

Poin lain yang menurut saya perlu mendapat perhatian serius di daerah adalah bahwa setiap daerah harus memiliki *brand*-nya sendiri-sendiri yang berhubungan dengan kekhasan yang dimilikinya. Ini menurut saya menjadi potensi yang sangat besar karena setiap daerah sudah tentu memiliki keunggulan yang merupakan ciri khasnya sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Dulu ketika saya menjadi Gubernur Gorontalo (2001-2009), saya membangun Gorontalo menjadi provinsi dengan *branding* sebagai provinsi jagung. Hingga saat ini, 20 tahun kemudian, *brand* Gorontalo sebagai provinsi jagung masih melekat kuat pada Gorontalo. Ini merupakan salah satu contoh pembentukan *local branding* untuk mendongkrak ekonomi daerah.

Kualitas dan Pasar

Ide tentang *branding* daerah ini sebenarnya sudah lama. Kalau kita melihat ke belakang, salah satu ide mem-*branding* daerah yang cukup berhasil dan bergaung di dunia adalah saat Gubernur Oita Prefecture, Jepang, yakni Morihiko Hiramatsu, menggagas gerakan “*One Village, One Product*” (OVOP) pada tahun 1979 dan mulai diimplementasikan pada tahun 1980. Konsep utama OVOP adalah untuk mendorong keterlibatan aktif warga lokal dalam bidang ekonomi dengan menghasilkan produk unik yang khas daerahnya dan mengembangkannya sesuai standar nasional dan global.

Standar nasional dan global berarti bahwa produk yang dimaksud

Oleh:
Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad
Wakil Ketua MPR RI



harus memiliki kualitas yang diakui secara nasional dan global. Untuk itulah maka pemerintah *prefecture* tersebut memberikan dukungan pada masyarakat dengan menyediakan tenaga ahli atau supervisor pendamping di bidang teknis, pemasaran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini tampak bahwa peran pemerintah daerah sangat besar untuk membangun gerakan itu dan memotivasi masyarakat serta menjamin kualitas sesuai standar pasar, dan juga menciptakan pasarnya.

Bagaimana pemerintah Oita *Prefecture* membangun pasar? Pertama, dengan mempromosikan program OVOP ke luar *prefecture*. Kemudian membangun imej tentang produk yang dihasilkan OVOP sebagai produk lokal berkualitas. Untuk menentukan produk atau komoditas unggulan itu, pemerintah Oita menyeleksi dari 300-an produk unggulan setempat. Ketika promosi bergema secara nasional, lalu muncul kepenasaranan masyarakat luar Oita akan produk unggulan khas daerah itu sehingga pada akhirnya tercipta pasar. Di samping itu penduduk setempat juga didorong agar bangga dengan produk mereka.

Sebagai akibatnya, beberapa produk dari Oita *Prefecture* menjadi komoditas top di Jepang, seperti jamur goreng, jeruk mandarin, dan sebagainya. Mereka juga mendorong pariwisatanya. Di Kota Yufuin yang hanya berpenduduk 12 ribuan jiwa, pada tahun 1979 (sebelum OVOP) hanya dikunjungi 1,9 juta wisatawan, namun pada 2004 jumlah wisatawan melonjak menjadi 3,88 juta orang (Widiyanti, A., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Oita *Prefecture* berhasil mem-*branding* daerahnya sebagai penghasil produk unggulan berkualitas tinggi yang memenuhi standar nasional dan global. Masalah standar (kualitas) menjadi penting. Konsep OVOP sendiri kemudian diadopsi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Di Indonesia

Di Indonesia sudah banyak daerah yang mengimplementasikan OVOP. Ada banyak yang berhasil, tetapi ada juga yang kurang optimal. Di antara yang berhasil adalah karena pemerintah daerahnya “*all-out*” mendukung program itu sampai produk yang jadi unggulannya menjadi *brand* khas daerahnya. Pemerintah daerahnya ikut mempromosikan dan membangun pasar produk mereka di luar daerahnya, termasuk membuka pasar ekspor.

Yang membedakan antara OVOP ala Oita *Prefecture*, di Indonesia kini banyak program OVOP yang digerakkan oleh Kementerian Perindustrian melalui dinas perindustrian di daerah. Memang harus dilakukan kajian apakah OVOP itu sesuai dengan harapan Presiden membangun kekhasan daerah, juga apakah cukup efektif OVOP di bawah Kementerian Perindustrian dibanding dikelola oleh pemerintah daerah. Saya berpikir, akan efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah karena ketika ditangani Kementerian Perindustrian, pemerintah setempat jadi kurang optimal berperan. Sementara untuk membangun dan memotivasi masyarakat agar gigih mengembangkan produk unggulan, pembinaannya harus lintas sektor. Jika hanya satu dinas

yang merupakan wakil kementerian akan sulit berkoordinasi dengan pihak lain di daerah tersebut karena beda kewenang. Beda jika dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Namun ini perlu kajian tersendiri dan tentu tidak bisa dipukul rata untuk seluruh daerah.

Saya sedikit punya pengalaman mem-*branding* daerah dengan komoditas unggulan, yakni tatkala Gorontalo dibangun menjadi “provinsi jagung”. Di antara catatan yang ingin saya *sharing* adalah:

1. Daerah memiliki produk spesial (dalam hal ini jagung) yang dikelola secara spesial dan dibangun menjadi penggerak ekonomi daerah yang signifikan.
2. Karena fokus untuk mengembangkan *brand* daerah sebagai “provinsi jagung”, segala sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun *brand* tersebut beserta nilai ekonominya tercurahkan pada sektor tersebut, mulai dari pengembangan SDM, kebijakan, teknologi, dan lain-lain.
3. Dari pengalaman saya, kepala daerah perlu membuat kebijakan sebagai penyangga pelaku usaha (UMKM) di sektor bersangkutan agar mereka bergairah menjalankan usahanya dan terutama membangun standar kualitas komoditas sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena komoditas jagung diperuntukkan bagi pakan ternak, standar jagung yang diproduksi masyarakat juga diberi standar kalau ingin diterima pasar. Misalnya, dengan kadar air tertentu. Untuk mendukung agar petani mau menanam jagung dan menghasilkan jagung sesuai standar, Pemerintah Daerah Gorontalo pada saat itu menetapkan harga dasar jagung terendah yang lebih tinggi dari harga pasar yang biasa dipermainkan para tengkulak. Pemerintah daerah menjamin, jika petani sulit menjual jagung ke pasar dengan harga sesuai aturan, pemerintah akan membelinya asal sesuai standar kualitas yang sudah ditetapkan (sesuai standar pasar yang sudah dibakukan dalam keputusan gubernur). Dengan begitu petani tetap bergairah memproduksi jagung karena pasarnya sudah terjamin dengan harga yang menguntungkan mereka. Gairah mereka dalam menanam jagung tetap terjaga karena masa depan mereka terjamin.

Masalah kualitas, menurut saya, merupakan sesuatu yang krusial yang harus terus diperjuangkan selain membuka pasar. Kekhasan daerah memang penting. Akan tetapi khas saja tidak cukup. Khas jika tidak diikuti dengan kualitas yang memenuhi standar nasional atau global atau pasar yang dibidiknya, perkembangannya akan sulit. Inilah yang menjadi salah satu PR dalam membangun *local branding* daerah terkait dengan produk unggulan tertentu. □

Resep Menuju Masyarakat Madani

Masa transisi merupakan waktu di mana struktur kekuasaan ditata ulang. Hal-hal yang lama direformasi agar membawa perubahan. Lewat buku, HNW menawarkan resep untuk membangun struktur kekuasaan mengganti masa lalu yang kelam.

SEBAGAI politisi, banyak kesibukan yang dilakukan oleh Wakil Ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid, Lc.MA. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tidak hanya rutin melakukan pertemuan dengan masyarakat dan pendukung, namun juga melakukan berbagai macam aktivitas lainnya. Sebagai alumni Pondok Pesantren Gontor, pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu juga kerap diundang atau menghadiri pengajian atau kegiatan agama untuk memberikan ceramah.

Sebagai pimpinan MPR dan anggota DPR, tentunya dia juga disibukkan dengan berbagai macam rapat, sidang, audiensi, menerima delegasi, sosialisasi berbagai macam kebijakan dan keputusan, serta aktivitas-aktivitas politik lainnya.

Di tengah kesibukan yang dijalani, pria yang gemar olahraga bulutangkis itu menyempatkan diri untuk menulis. Beberapa buku sudah diterbitkan, salah satunya adalah buku yang berjudul: 'Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani'.

Buku bersampul putih bergambar Masjid Istiqlal tersebut terburai dalam empat bab dengan ketebalan 205 halaman. Sebagai sosok yang hidupnya dihabiskan di dunia pendidikan pesantren dan perguruan tinggi di Arab Saudi, membuat isi bukunya banyak mengupas nilai-nilai agama Islam. Dalam Bab I berisi tentang *Islam, Kehidupan, dan Pluralisme*. Bab II, tentang *Keimanan, Ulama, dan Cinta Allah*. Bab III, soal *Islam, Harta, dan Zakat*, serta Bab IV berisi mengenai *Menuju Masyarakat Madani*.

Sesuai dengan judulnya, dijelaskan di sampul belakang buku itu bahwa setiap rezim selalu meninggalkan warisan yang buruk, dan beban yang sangat berat bagi penggantinya dan rakyat. Dari peralihan kepemimpinan, kita selalu melenceng dari apa yang kita inginkan.

Diuraikan lebih lanjut, masa transisi pada 21 Mei 1998 sesungguhnya merupakan kulminasi dari penolakan seluruh rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru. Seperti Soekarno, Soeharto meninggalkan begitu banyak catatan kelam dan segudang permasalahan. Kondisi demikian membuat pemerintahan transisi terkadang tampak seperti sosok yang berdiri kebingungan di atas puing-puing rumahnya yang baru runtuh.

Ada kegamangan, ketidakpastian, dan ketidakterarahan. Persoalan bangsa disebut tidak selesai dengan lengsernya Soeharto. Justru baru saja memasuki permasalahan yang sesungguhnya.

Untuk memasuki babak baru setelah Orde Baru lengser, dalam pengantar, pria yang namanya disingkat menjadi HNW itu memberi 'resep'. Disodorkan solusi, *pertama*, merumuskan ulang teori tentang negara, pemerintahan, dan pembangunan. *Kedua*, membangun ulang pola komunikasi politik. *Ketiga*, menata ulang pemerintahan.

Menurutnya, bila itu dilakukan dengan baik maka bangsa ini dapat mengelola krisis yang ada dengan menuju konstruksi masyarakat madani.

Resep yang disodorkan dalam pengantar tersebut dijelaskan oleh HNW di halaman 178. Disampaikan, mengapa kita perlu merumuskan ulang teori tentang negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dijelaskan dalam halaman itu, *pertama*, karena setiap teori adalah hipotesis dan hipotesis dibangun dari asumsi-asumsi yang validitasnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi setiap teori ada usianya. Itu bagian yang natural saja dari keterbatasan kita sebagai manusia.

Kedua, tempo perubahan (*speed of change*) yang terjadi di lingkungan strategis kita sangat cepat dan dengan skala yang kadang sangat masif. Proses globalisasi menjadikan Abad XX dan XXI sebagai abad perubahan dan abad transformasi. Hal demikian membuat asumsi-asumsi kita tentang lingkungan strategis mudah berubah dan salah

sehingga perlu menguji ulang dan teori.

Ketiga, kegagalan empiris dan teori-teori Orde Baru tentang negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Langkah-langkah di atas, menurut HNW, tidaklah dengan sendirinya akan mengakhiri krisis masa transisi dalam waktu yang singkat, namun diingatkan yang akan segera dirasakan adalah munculnya harapan, keterarahan, dan kepastian. Hal demikian merupakan kondisi psikologis yang paling dibutuhkan dalam proses normalisasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. □





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT





MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



**MPR
RUHMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT**



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI